



# LAPORAN TRIWULAN 2



# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	4
I. Rencana Kerja ICCTF Tahun 2021	7
II. Progres dan Capaian	13
1. Progres Proyek	13
A. Coremap–Cti World Bank	13
B. Coremap–CTI Asian Development Bank	54
C. Blended Finance	87
D. Penelitian Bioekonomi	93
E. Blue Carbon	93
2. Program Strategis dan Penggalangan Dana (Fundraising)	94
2.1. Pembahasan Concept Note dengan Agence Française De Développement (AFD)	94
2.2. Pembahasan Concept Note Proyek “Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development”	96
2.3. Rapat Dengan ADB Manila	98
2.4. Rapat Dengan Media Partner	99
2.5. Output Konvensi Jejaring’s Zoom Meeting	100
2.6. Indonesia Ocean Development Partners (IODP) Meeting	
3. Komunikasi, Outreach Dan Kemitraan	101
3.1 Media Sosial	102
3.2 Produksi Media	105
3.3 Media Monitoring	109
III. Audit, Keuangan Dan Operasional	114
3.1 Laporan Audit Tahun 2021	114
3.2 Informasi Keuangan Periode April – Juni 2021	114
3.3 Operasional / Kesekretariatan	115



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (*National Trust Fund*) dalam bidang penanganan perubahan iklim. Sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, ICCTF mengelola dana APBN dan dana hibah dari mitra pembangunan dengan tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca serta implementasi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan yang dilaksanakan ICCTF meliputi pengelolaan proyek, penggalangan dana, komunikasi dan *outreach* serta operasional Satker. Dalam hal pengelolaan proyek, ICCTF membagi proyek-proyek yang dikelola berdasarkan *thematic windows* ke dalam empat fokus area, yaitu i) *Land-based Mitigation*; ii) *Adaptation and Resilience*; iii) *Energy*, dan; iv) *Marine-based*. Sejalan dengan peningkatan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan laut dan sumber dayanya, saat ini ICCTF menitikberatkan fokus pada tema program berbasis kelautan (*Marine-based*) sejak tahun 2020.

Saat ini ICCTF sedang mengimplementasikan proyek hibah

COREMAP – CTI World bank (WB) yang dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Sebelah Barat, KKPD Raja Ampat, dan SAP Raja Ampat di 2 provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Kegiatan utama yang dicapai pada periode ini meliputi pembangunan infrastuktur menara pengawas, pusat informasi ekowisata, pusat monitoring Cetacea dan karamba jaring apung. Progress pembangunan infrastuktur tersebut sebagian masih dalam proses pembangunan dan sebagian sudah selesai. Pada awal periode ini terdapat hambatan berupa bencana badai siklon tropis seroja yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan mengakibatkan kerusakan pada satu infrastuktur yang telah dibangun. Pengadaan peralatan penunjang survei dan peralatan penunjang pengawasan sebagian sudah diadakan, menunggu pendistribusian. Kegiatan lainnya berupa *workshop* pengelolaan pesisir, dan peningkatan SDM baik pengelola maupun anggota kelompok termasuk masyarakat adat.

Selain itu ICCTF juga sudah mulai mengimplementasikan seluruh kegiatan COREMAP – CTI Asian Development Bank (ADB) yang dilaksanakan oleh

Konsultan Perusahaan dan LSM. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berada di 3 lokasi di KKPD Nusa Penida, Provinsi Bali; TPK Gili Balu, dan TWP Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan *Entry Meeting* COREMAP – CTI ADB diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 4 Juni dan dilanjutkan dengan Kunjungan Lapangan ke Gili Balu dan Gili Matra pada tanggal 5 Juni 2021. Pelaksanaan beasiswa *master degree* sudah mendapatkan 4 mahasiswa dari 4 yang direncanakan.

Pada periode ini kegiatan *Blended Finance* melanjutkan komunikasi dengan KKP (LPMUKP) untuk revisi terhadap konsep Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang dilakukan secara parallel antara ICCTF dan BLU LPMUKP. Selain itu, pada periode ini telah disusun Surat Keputusan (SK) pembentukan *Advisory Panel Blue Financing*.

Kegiatan *Blue Carbon* pada periode ini berupa diskusi dengan DISER Australia dalam rangka persiapan kegiatan *Policy Dialog* dan *Policy Training* yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta persiapan COP 26. Selain itu koordinasi dilakukan dengan AFD

menyangkut *Eco Fishing Port* dan perbaikan *Concept Note*.

Penggalangan dana lainnya juga mulai dilakukan yaitu penjajakan dengan ADB dalam program *Sustainable Fisheries* pada komoditas udang yang dibudidayakan. Selain itu pembahasan tentang potensi dukungan pendanaan dari WB masih terus dilanjutkan.

Hasil kegiatan diwartakan dalam website ICCTF dan melalui media sosial ICCTF. Selain itu kerjasama penyebaran informasi kegiatan lapangan juga menggunakan media sosial yang dilakukan bersama-sama dengan Mitra Pelaksana. Pada periode ini tim komunikasi ICCTF, tim komunikasi mitra, bidang komunikasi WB dan pakar komunikasi lainnya telah memproduksi video yang menggambarkan program COREMAP-CTI untuk memperingati *World Ocean Day* yang diperingati setiap tanggal 8 Juni. Perbaikan website ICCTF mulai dilakukan pada masa ini. Selanjutnya tim komunikasi ICCTF melakukan analisis media sosial setiap akhir bulan guna melihat perkembangan sosialisasi program kepada masyarakat umum.

**1**

# RENCANA KERJA ICCTF TAHUN 2021



# Q1

JAN – MAR

## **Pengelolaan Proyek**

- Monev dan *spotcheck* Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan beasiswa *master degree* COREMAP–CTI ADB
- Pelaksanaan *Kick-Off* COREMAP–CTI ADB
- Persiapan studi bioekonomi rumput laut di Lesser Sunda
- Pelaksanaan *workshop* hasil kajian studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura

## **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

## **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan sponsorship
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik
- Distribusi kalender ICCTF 2021

## **Dukungan Operasional**

- Entry meeting
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal I ICCTF 2021

# Q2

APR – JUN

## **Pengelolaan Proyek**

- Monitoring lapangan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Pengadaan konsultan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Persiapan studi bioekonomi Tuna, Kakap Merah dan rumput laut di Lesser Sunda

## **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

## **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

## **Dukungan Operasional ICCTF**

- Audit BPK
- Pengadaan staf ICCTF
- Workshop Koordinasi Kuartal II ICCTF 2021



# Q3

JUL - SEP

## **Pengelolaan Proyek**

- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

## **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Penggalangan Pendanaan Sustainable Aquaculture

## **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan elektronik

## **Dukungan Operasional ICCTF**

- Workshop Koordinasi Kuartal III ICCTF 2021

# Q4

OCT - DEC

## **Pengelolaan Proyek**

- *Programmatic and Finance Monitoring*
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI WB
- Implementasi Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB
- Implementasi dan pelaporan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda
- Workshop Evaluasi Proyek Hibah

## **Penggalangan Dana**

- Persiapan proyek LAUTRA dengan WB
- Persiapan proyek Eco Fishing Port dengan AFD
- Partisipasi dalam UNFCCC – COP 26 2021

## **Komunikasi**

- Keikutsertaan dalam forum, pameran dan *sponsorship*
- Produksi materi komunikasi ICCTF melalui media cetak dan media elektronik
- Produksi Kalender ICCTF 2021

## **Dukungan Operasional ICCTF**

- Workshop Koordinasi Kuartal IV ICCTF 2021

Rencana kerja ICCTF di tahun 2021, meliputi implementasi proyek hibah COREMAP–CTI World Bank dan COREMAP–CTI Asian Development Bank, Penelitian Bioekonomi udang, tuna, kakap merah dan rumput laut, Penggalangan dana dan Komunikasi, serta operasional Satker.

Pada kuartal ketiga dan keempat, secara garis besar ICCTF merencanakan sudah memulai implementasi proyek yaitu Paket Kegiatan COREMAP–CTI ADB dan studi bioekonomi tuna, kakap merah dan rumput laut di Lesser Sunda. Rencana kerja utama COREMAP - CTI World Bank pada periode triwulan ketiga 2021 (periode Juli–September 2021) adalah melanjutkan implementasi program enam paket kegiatan yang akan dilakukan oleh Mitra Pelaksana di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu. Terdapat beberapa penyesuaian kegiatan sebagai respons dari progress dan capaian pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai program percepatan dalam memenuhi beberapa indikator capaian yang belum terpenuhi, karena implementasi program berjalan lebih lambat pada periode sebelumnya, salah satunya akibat adanya Pandemic COVID-19.

Rencana Kerja COREMAP – CTI Asian Development Bank pada periode triwulan ketiga 2021, yaitu bulan Juli–September 2021 yang pertama adalah penyelesaian dokumen-dokumen wajib yang harus diserahkan ke ADB seperti dokumen safeguard yang harus

diserahkan pada bulan Agustus 2021. Selain itu dokumen laporan Q2 meliputi *Project Performance Management System* (PPMS) harus diserahkan sebelum akhir September 2021. Rencana yang kedua adalah pengadaan konsultan untuk *Grant Package 7* dan individual consultant yaitu *Creative Officer* dan *monitoring and evaluation specialist*. Rencana ketiga yaitu Pelatihan terkait *Supply Chain Tuna Longline* yang akan dilakukan pada tanggal 24–27 Agustus 2021, dengan tujuan memperkenalkan dan melatih peserta pelatihan terkait penanganan ikan tuna sebagai upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan. Beberapa hal pokok yang akan menjadi materi pelatihan terkait tentang *observer, e-logbook, by catch, FIP goes to MSC Certificate*, termasuk *Biomodelling*. Rencana keempat yaitu *spot check* dan *monitoring* perkembangan proyek.

Pada periode ini juga akan dilakukan kegiatan kunjungan untuk pemantauan implementasi di lapangan baik dari sisi program maupun keuangan, serta *Workshop* Evaluasi Proyek Hibah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi kegiatan proyek berjalan secara efektif dan sesuai SOP, demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan proyek. Selain itu, pada kuartal keempat, ICCTF akan berpartisipasi pada forum internasional UNFCCC – COP 26 di Glasgow, Skotlandia.



**2**

## PROGRES DAN **CAPAIAN**

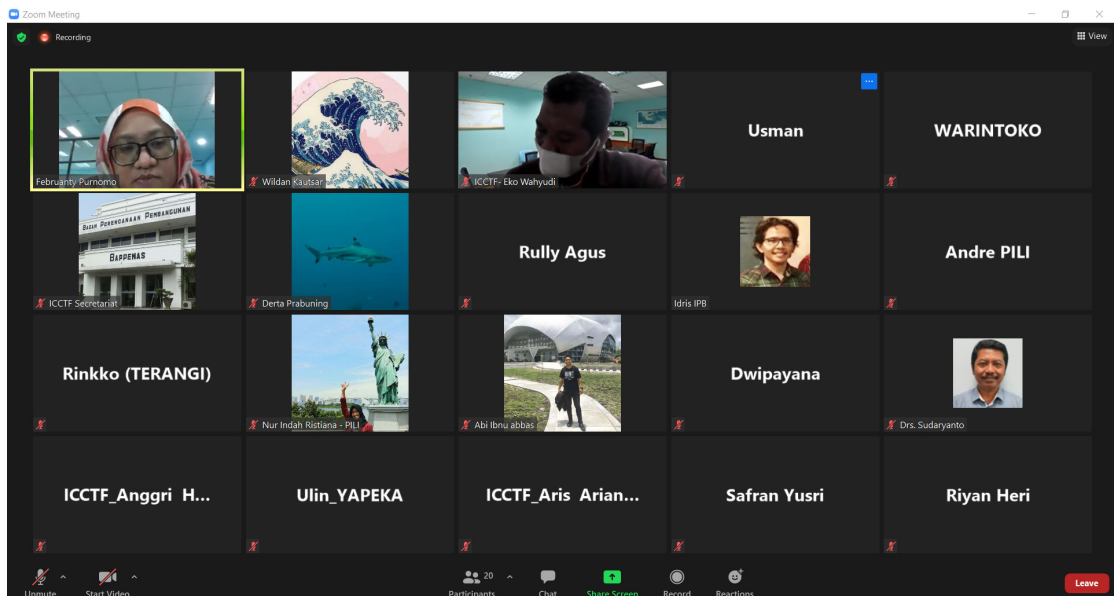
# 1. PROGRES PROYEK

## A. COREMAP–CTI World Bank

### Kegiatan PIU COREMAP - CTI World Bank

#### a. Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Lapangan ke Nusa Tenggara Timur

Pada tanggal 1 dan 5 April 2021, dilaksanakan rapat antara ICCTF dan mitra pelaksana terkait rencana kunjungan lapangan ke Kabupaten Rote dan Sabu Raijua, Provinsi NTT yang diagendakan akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan April 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara online dan diikuti oleh semua mitra pelaksana COREMAP – CTI World Bank yang mempunyai lokasi intervensi program di NTT. Teknis pelaksanaan kegiatan di Pulau Rote akan dikoordinir oleh YAPEKA dan dibantu oleh PILI. Sementara untuk teknis pelaksanaan kegiatan di Pulau Sabu akan dikoordinir oleh TERANGI. Namun kegiatan kunjungan lapangan ini kemudian ditunda karena adanya musibah bencana badai Siklon Seroja yang melanda Provinsi NTT tidak terkecuali wilayah yang menjadi lokasi intervensi program COREMAP-CTI WB. Sebagai tindak lanjut, fasilitator mitra pelaksana yang berada di lapangan diupayakan dapat memonitor perkembangan yang terjadi di lokasi proyek termasuk dampak badai terhadap kondisi infrastruktur yang sudah dibangun. Ada pun untuk pelaksanaan kunjungan lapangan sementara waktu diundur sampai dengan kondisi di NTT normal kembali pasca bencana.



Gambar 1.A.1. Diskusi rencana kunjungan lapangan ke Provinsi NTT melalui aplikasi Zoom

## **b. Kunjungan Lapangan dan Monitoring Infrastruktur Program COREMAP - CTI World Bank di Kabupaten Raja Ampat**

Pada tanggal 22–25 April 2021 ICCTF melakukan kunjungan lapangan ke Raja Ampat dalam rangka *monitoring* pembangunan infrastruktur Paket 1 dan Paket 5 COREMAP – CTI World Bank yang diimplementasikan oleh Yayasan Terangi. *Monitoring visit* ini secara khusus bertujuan untuk mengecek kesesuaian infrastruktur dengan DED, dan pemenuhan persyaratan *safeguard*; serta melakukan diskusi dengan masyarakat di sekitar lokasi infrastruktur, kontraktor, dan anggota POKMASWAS selaku penerima manfaat dari salah satu infrastruktur yang dibangun. Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring infrastruktur ini antara lain Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, ICCTF, PPK MWA ICCTF, Yayasan Terangi sebagai Mitra Pelaksana serta konsultan pengawas pembangunan infrastruktur. Adapun infrastruktur yang dikunjungi dan dilakukan pengecekan antara lain:

1. Menara Pengawas di Kampung Sauwandarek (Paket 5);
2. Menara Pengawas di Kampung Meos Manggara (Paket 5);
3. Pusat Informasi Ekowisata di Pulau Miosara Kecil (Paket 1) dan
4. Stasiun Pemantauan Pari Manta di Pulau Yefnabi Kecil (Paket 1).

Dari hasil monitoring ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan baik oleh mitra pelaksana maupun konsultan perencana pembangunan serta konsultan pengawas. Sampai kuartal kedua progress pembangunan untuk masing-masing infrastruktur telah mencapai 100 %, langkah selanjutnya adalah menyusun SOP pemeliharaan dan pemanfaatan untuk masing-masing infrastruktur.



Gambar 1.A.2. Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil



Gambar 1.A.3. Diskusi dengan Bamuskam di Meosmanggara

### **c. Meeting dengan KKP Untuk Pembahasan EVIKA dan EKKP-3-K**

Pada tanggal 28 April 2021 ICCTF mengadakan diskusi terkait dengan alat monitoring untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA dan EKKP3) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai narasumber utama. Selain dari KKP, kegiatan diskusi ini juga diikuti oleh Bappenas, ICCTF, dan mitra pelaksana program COREMAP – CTI World Bank dan COREMAP – CTI Asian Development Bank. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui media zoom. EVIKA merupakan pengganti dari EKKP-3-K yang merupakan alat monitoring untuk mengukur efektivitas pengelolaan suatu Kawasan Konservasi. Hal tersebut menjadi isu yang penting untuk dibahas dikarenakan target yang ditetapkan COREMAP-CTI pada saat penyusunan logframe masih menggunakan nilai dari EKKP-3-K untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan, sehingga memerlukan target baru yang sesuai dengan sistem dan perangkat monitoring yang digunakan saat ini yaitu EVIKA. Direktur Eksekutif ICCTF menyampaikan bahwa pemahaman terkait dengan EVIKA ini harus sampai pada semua level yang terlibat dalam Program COREMAP, mulai dari PIU (*Project Implementing Unit*), mitra pelaksana sampai kepada stakeholders lokal yang merupakan lokasi program. Pak Amehr Hakim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP menyampaikan bahwa Penilaian EVIKA hanya dilakukan setelah Kawasan Konservasi tersebut telah ditetapkan

berbeda dengan EKKP-3-K yang dapat melakukan penilaian ketika kawasan tersebut baru dalam tahap pencadangan. Sedangkan untuk konversi nilai dari EKKP-3-K ke EVIKA dijelaskan bahwa pengkonversian nilai lebih dapat dilakukan dengan pendekatan pada level biru EKKP-3-K, karena level biru merupakan level yang paling banyak memiliki kesamaan kriteria dengan sistem penilaian pada EVIKA.

### **d. Rapat Koordinasi Pelatihan COREMAP – CTI World Bank**

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021 ini merupakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pelatihan Program COREMAP - CTI WB. Executive Director ICCTF, Tonny Wagey, menyampaikan bahwa Pusbin Bappenas nantinya akan mengoordinir kegiatan yang berkaitan dengan training. Selain itu, pada tanggal 4 April 2021 direncanakan akan diadakan agenda mission WB yang salah satunya membahas persiapan kegiatan training bersama Pusbin. Ali Muharam dari Pusbin Bappenas kemudian menambahkan bahwa KAK yang disampaikan KKP dan ICCTF sudah cukup komprehensif namun masih terdapat beberapa catatan seperti perlunya pencantuman nama trainer, durasi waktu/jam pelajaran setiap materi, dan breakdown training material ke dalam jadwal harian. Beliau kemudian juga mengingatkan terkait karantina untuk peserta yang akan kembali dari luar

negeri karena akan mempengaruhi anggaran biaya. Tindak lanjut dari pertemuan ini, KAK pelatihan yang diajukan oleh Ditjen PRL – KKP masih perlu dilakukan perbaikan sebelum di ajukan kembali.



Gambar 1.A.4. Diskusi ICCTF bersama PRL - KKP terkait pelatihan COREMAP-CTI WB



#### e. Workshop Monev Implementasi Program COREMAP - CTI WB Kuartal 1 tahun 2021

Bencana badai Siklon Tropis Seroja yang terjadi di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur pada awal April 2021 mengakibatkan dampak serius bagi masyarakat NTT tidak terkecuali lokasi-lokasi intervensi COREMAP – CTI World Bank, hal ini menyebabkan tertundanya beberapa program serta perlu penyesuaian kembali waktu pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana progres dan capaian dalam menjawab indikator yang sudah ditetapkan. Bertempat di Hotel Pullman, Jakarta, pada tanggal 28 April 2021 ICCTF melakukan kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Implementasi COREMAP – CTI World Bank Kuartal 1 2021. Kegiatan Monev ini bertujuan untuk mendapatkan informasi update terkait progres dan capaian program COREMAP – CTI World Bank dari masing-masing mitra pelaksana.

Selain itu dalam pertemuan mendapatkan informasi update terkait dampak bencana siklon tropis Seroja pada lokasi program COREMAP – CTI World Bank, melakukan diskusi terkait mekanisme dan SOP pemberian bantuan operasional dan peralatan POKMASWAS, serta konfirmasi dan temuan BPK pada laporan keuangan tahun 2020. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah seluruh mitra pelaksana diminta untuk segera memenuhi laporan program, keuangan dan pengadaan pada periode kuartal 1 2021 serta menyusun jadwal kegiatan untuk kuartal 2 2021 sebagai penyesuaian terhadap bencana badai siklon Seroja yang berdampak terhadap penundaan beberapa kegiatan pada kuartal sebelumnya.



Gambar 1.A.5. Workshop Monev Implementasi COREMAP – CTI World Bank

#### **f. World Bank Mission**

Pada bulan Mei 2021, dilakukan WB Mission bersama dengan LIPI, Pusbindiklatren Bappenas, serta ICCTF yang bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap capaian hingga Mei 2021. Pada kegiatan tersebut, dibahas pula konversi penilaian kawasan konservasi yang semula EKKP-3-K menjadi EVIKA. Pembahasan ini akan dilanjutkan secara lebih intensif di luar WB Mission, dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. ICCTF menyampaikan update dan capaian terkait masing-masing indikator pada program, penerapan perlindungan lingkungan dan sosial pada program, penyerapan anggaran oleh masing-masing mitra dan oleh ICCTF, serta pengadaan yang telah dan akan dilakukan. Pada akhir sesi, terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilakukan oleh ICCTF dan mitra pelaksana, antara lain mengenai penyampaian *Project Development Objective (PDO) Monitoring Plan*, pemasangan *safety sign* pada lokasi infrastruktur, update pada *system monitoring* pengadaan WB, dan lainnya.

#### **g. Kunjungan Lapangan dan Monitoring Infrastruktur Program COREMAP - CTI World Bank di Kabupaten Sabu Raijua**

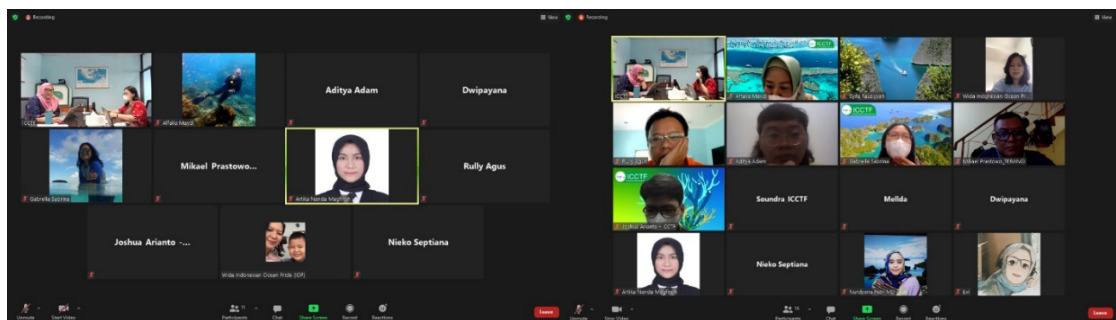
Pada tanggal 26 – 29 Mei 2021 ICCTF melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan lapangan ini dalam rangka melakukan monitoring terhadap pembangunan infrastruktur pada pelaksanaan program COREMAP – CTI World Bank di Kabupaten Sabu

Raijua yang diimplementasikan oleh Perkumpulan Yapeka dan Yayasan Terangi. Monitoring perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan kualitas, dan kuantitas yang direncanakan serta tepat waktu dengan mengikuti Perjanjian Kerja Konstruksi yang sudah disepakati. Pada kegiatan tersebut 2 unit infrastruktur yang dikunjungi adalah Menara Pengawas di Desa Laborai, Kecamatan Sabu Timur (paket kegiatan 5), serta Pusat Informasi Ekowisata (PIE) di Desa Mebba, Kecamatan Sabu Barat (Paket kegiatan 2). Dari hasil pemeriksaan, progress pembangunan fisik baik untuk Menara Pengawas maupun PIE sudah mencapai 100% dan saat ini dalam masa pemeliharaan. Namun begitu ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan baik oleh mitra pelaksana maupun konsultan pelaksana terkait dengan pemantauan tata kelola pekerjaan, pemantauan kesesuaian pekerjaan yang dilakukan dengan DED, serta pemeriksaan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

#### **h. Rapat Koordinasi Persiapan Memperingati World Ocean Day**

Dalam rangka menyambut *World Ocean Day* yang diperingati setiap tanggal 8 Juni, ICCTF mengadakan rapat koordinasi dengan semua mitra pelaksana COREMAP – CTI World Bank pada tanggal 3 Juni 2021. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk membahas produk komunikasi yang akan dikeluarkan oleh COREMAP – CTI World Bank pada peringatan *World Ocean Day 2021*.

Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey dalam sambutan dan arahnya menyampaikan pentingnya mengangkat profil COREMAP-CTI dengan membuat produk komunikasi berupa video yang merupakan hasil dari kegiatan COREMAP – CTI World Bank dengan tema *life and livelihood* sesuai dengan tema pada peringatan *World Ocean Day* tahun 2021. Dari hasil diskusi, semua mitra pelaksana akan berkontribusi dalam pembuatan video profiling COREMAP-CTI WB tersebut dengan mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan video dari semua kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan tema, sebagai bahan/ materi untuk pembuatan video. Selanjutnya tim komunikasi dari semua mitra diwajibkan secara serentak memposting video tersebut pada tanggal peringatan *World Ocean Day* pada platform sosial media masing-masing mitra pelaksana.



Gambar 1.A.6. Diskusi pembahasan *World Ocean Day* melalui aplikasi zoom call

#### **i. Diskusi Hasil Monitoring Pembangunan Infrastruktur paket 2 di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur**

Pada tanggal 7 Juni 2021, PIU WB mengundang YAPEKA selaku Mitra Pelaksana Paket 2 untuk berdiskusi mengenai hasil monitoring visit pembangunan infrastruktur ke Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur serta WB Mission yang telah dilakukan pada bulan Mei 2021. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Monev & ESS Specialist serta Procurement Specialist dari Yapeka, serta tim PIU WB dari ICCTF. Hal-hal yang dibahas terkait WB Mission antara lain, penyusunan Rencana Tanggap Darurat, khususnya pada lokasi pembangunan infrastruktur, pemasangan *safety sign*, serta pelibatan pemangku kepentingan terkait program secara keseluruhan, terutama terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur yang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat. Sementara terkait dengan hasil monitoring visit, hal-hal yang perlu diklasifikasi antara lain informasi kepemilikan lahan, proses konsultasi dan sosialisasi yang telah berlangsung selama ini, serta dokumen pengadaan termasuk kontrak untuk infrastruktur yang masih dalam tahap persiapan pembangunan.

#### **j. Rapat Koordinasi PIU WB**

Pada tanggal 20 Juni 2021, *Project Implementing Unit* (PIU) World Bank melakukan rapat koordinasi internal bertempat di Kantor ICCTF, Jakarta. Tujuan dari rapat koordinasi internal ini antara lain untuk mendapatkan update terkait pelaksanaan program dan kegiatan COREMAP – CTI World Bank meliputi update proses pengadaan, pelaporan kegiatan, keuangan, isu *environment and social safeguards*, progress pembangunan infrastruktur dan update beberapa kegiatan mitra pelaksana yang diikuti oleh tim PIU WB. Tindak lanjut dari rapat koordinasi ini adalah tim PIU WB akan menyusun jadwal monev untuk melakukan monitoring lapangan untuk pembangunan infrastruktur serta monitoring program secara keseluruhan dengan masing-masing mitra pelaksana.

#### **k. Pembahasan Monitoring Plan Bersama World Bank**

Salah satu tindak lanjut dari hasil WB Mission pada Mei 2021 adalah menyampaikan PDO Monitoring Plan kepada WB. Masukan pertama telah disampaikan oleh WB pada tanggal 11 Juni 2021. Selanjutnya dilakukan diskusi internal PIU WB untuk membahas mengenai masukan tersebut. Mengingat cukup banyaknya masukan WB mengenai PDO Monitoring Plan yang disampaikan, PIU WB melakukan pertemuan lebih lanjut bersama WB pada 22 Juni 2021, dengan agenda membahas dan klarifikasi mengenai masukan yang disampaikan. Beberapa hal yang menjadi catatan antara lain *assessment* dari EKKP-3-K menjadi EVIKA, penyusunan *engineers completion report* dan *safeguards assessment report* untuk setiap infrastruktur yang telah selesai dibangun, penyampaian buku log untuk pelaksanaan pengawasan oleh POKMASWAS, dan lainnya. Setelah dilakukan diskusi tersebut, revisi PDO Monitoring Plan telah disampaikan ke WB pada 30 Juni 2021, sebagai bagian dari Agreed Action pada WB Mission bulan Mei 2021.

## 1

## Sub Komponen 3.1 Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Jenis Terancam

### 1.1 Indikator 3.1 Infrastruktur Kecil Ekowisata

#### 1.1.1 Paket Kegiatan 1 – Yayasan Terangi

##### a. Pembangunan Infrastruktur

Sampai Juni 2021 Yayasan Terangi sudah menyelesaikan 5 infrastruktur antara lain Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil, Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi, Stasiun Pemantauan Pari Manta di Dayan, serta 2 unit KJA di KKPD Selat Dampier. Sementara untuk proses pembangunan infrastruktur lain dalam tahap persiapan pembangunan.

Terkait dengan rencana pembangunan hiking track di Misool, berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Raja Ampat, dokumen lingkungan yang dibutuhkan adalah UKL/ UPL. Hingga akhir Juni 2021, Terangi baru melakukan survey untuk penyusunan DED, sementara penyusunan UKL/UPL masih menunggu hasil atau draft DED. Sebelum menyampaikan UKL UPL untuk disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, Terangi akan menyampaikannya ke ICCTF untuk mendapat review terlebih dulu dari WB, yang direncanakan di bulan Agustus 2021.

Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yayasan Terangi dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.A.1.1 Progress pembangunan infrastruktur Paket 1**

Infrastruktur	Status	Progres
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Stasiun Pemantauan Pari Manta di Dayan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Miosara Kecil (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Pusat Informasi Ekowisata di Kampung Yelu (KKPD Misol)	Persiapan Pembangunan (Lahan, SPPL)	0%
Jetty Apung (SAP Raja Ampat)	Persiapan Pembangunan (DED, Lahan, SPPL)	0%
Jalur Pendakian di Danau Ubur-ubur (KKPD Misol)	Persiapan Pembangunan (DED, Lahan, SPPL)	0%
KJA di Yenbeser atau Waiweser (SAP Raja Ampat)	Identifikasi lokasi baru	0%
KJA di Arefi Selatan (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
KJA di Yensawai Timur (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%

#### a. Workshop Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di SAP Raja Ampat

Upaya pelestarian ekosistem di Raja Ampat terus dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya adalah rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) melalui program COREMAP – CTI World Bank pada Paket Kegiatan 1 yang dilaksanakan oleh Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Untuk mendukung program kegiatan tersebut pada tanggal 14 – 17 April 2021 dilaksanakan kegiatan Workshop Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Kampung Manyafun – Meosmanggara, SAP Raja Ampat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pemangku kepentingan tentang ekosistem pesisir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang rehabilitasi ekosistem pesisir, mengumpulkan pembelajaran terkait kegiatan rehabilitasi di Kabupaten Raja Ampat, serta memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terhadap teknik rehabilitasi ekosistem pesisir. Kegiatan diikuti oleh 21 orang peserta yang berasal dari Kampung Manyafun, Kampung Meosmanggara Kampung Mutus serta perwakilan dari BKKPN Kupang Satker Raja Ampat. Workshop dibagi dalam dua sesi yaitu sesi materi dan simulasi serta sesi praktek lapangan, penyampaian materi dan simulasi dilakukan di Kampung Manyafun, sedangkan kegiatan praktek dilakukan di Kampung Meosmanggara. Kegiatan workshop ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat serta mempersiapkan SDM masyarakat sebelum dilakukannya kegiatan rehabilitasi ekosistem di Raja Ampat.



Gambar 1.A.1.1 Penyampaian materi rehabilitasi lamun di SAP Raja Ampat



Gambar 1.A.1.2 Praktek penyemaian bibit mangrove di SAP Raja Ampat

## 1.1.2 Paket Kegiatan 2 – Yapeka

### a. Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil Penunjang Ekowisata

Pada kuartal 2 tahun 2021, fokus utama Yapeka untuk pembangunan infrastruktur skala kecil sebagai penunjang ekowisata di TNP Laut sawu adalah pembangunan Pusat Informasi Ekowisata (PIE) di Oesina serta pembangunan Menara Pantau Cetacea di Semau. Proses pembangunan mengalami keterlambatan dari jadwal semula yang akan dilakukan di Bulan April dikarenakan adanya badai siklon tropis seroja pada awal April 2021 yang melanda sebagian wilayah NTT tidak terkecuali lokasi pembangunan infrastruktur. SPPL PIE Oesina telah mendapat persetujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang pada 14 Januari 2021, sementara Menara Pantau Cetacea di Semau pada 14 April 2021. Proses pembangunan Menara Pantau Cetasea mulai dilakukan pada tanggal 17 Mei 2021 setelah melakukan penandatanganan SPK dengan kontraktor, sedangkan konstruksi untuk PIE di Oesina baru dimulai pada 24 Mei 2021. Selain pembangunan 2 infrastruktur tersebut, pada periode ini Yapka juga melakukan perbaikan terhadap 2 infrastruktur yang sudah terbangun (PIE di Sabu dan PLTS di Nusa Manuk) yang rusak akibat terdampak badai siklon seroja pada awal April 2021. Perbaikan dilakukan pada beberapa bagian yang mengalami kerusakan antara lain perbaikan atap PIE di Sabu Raijua, pemasangan dan pengecatan ulang pagar modul sel surya pada PLTS Nusa Manuk, Rote Ndao, serta monitoring sistem generator PLTS.

Sebagai pembelajaran terkait adanya badai siklon Seroja yang menimpa sebagian infrastruktur, YAPEKA bersama kontraktor telah menyusun Rencana Tanggap Darurat yang dijadikan sebagai panduan dalam menghadapi kondisi darurat, salah satunya mengenai badai. Selain itu, lokasi infrastruktur juga dilengkapi dengan *safety sign* sebagai penanda untuk pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi infrastruktur, serta para pengunjung jika infrastruktur tersebut telah dioperasikan. Progres pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Yapeka di TNP Laut sawu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.A.1.2. Progress pembangunan infrastruktur Paket 2

No.	Infrastruktur	Progres pembangunan
1	PLTS di Nusa Manuk	100%
2	Pusat Informasi Ekowisata di Sabu	100%
3	Pusat Informasi Ekowisata di Oesina	41,3%
4	Menara Pantau Cetacea di Semau	55,3%

## **b. Pengawasan Revitalisasi Infrastruktur Terdampak Badai Siklon Tropis Seroja**

Pada awal April terjadi badai Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur, dengan Rote menjadi daerah pusat/mata badai. Siklon Tropis Seroja tersebut telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur di wilayah NTT hingga menimbulkan korban jiwa, antara lain di wilayah Kupang, Pulau Rote, Pulau Sabu dan Sumba. Instalasi PLTS di Nusa Manuk merupakan salah satu lokasi yang terkena dampak badai ini. Sebagai tindak lanjut, pada 12-13 April 2021, YAPEKA bersama dengan kontraktor melakukan pengecekan kondisi infrastruktur yang telah dibangun serta lokasi rencana pembangunan infrastruktur pasca bencana Siklon Tropis Seroja. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, terdapat satu unit PLTS yang perlu perbaikan, sementara unit lainnya dalam kondisi yang baik dan dapat beroperasi. Untuk itu, kontraktor pembangunan instalasi PLTS di Nusa Manuk akan melakukan perbaikan unit PLTS yang terkena dampak bencana, agar keseluruhan unit PLTS di Nusa Manuk dapat beroperasi dengan optimal. Untuk infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata di Sabu Raijua, terdapat kerusakan ringan yaitu bangunan yang tertimpa pohon.



Gambar 1.A.1.3. Kerusakan PLTS akibat Badai Seroja di Nusa Manuk, Kab. Rote Ndao



Gambar 1.A.1.4 Sebagian area Pusat Informasi Ekowisata di Sabu tertimpa pohon dan mengalami kerusakan ringan akibat badai Seroja



### c. Penandatanganan Berita Acara Penitipan Aset dan Sosialisasi Panduan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pusat Informasi Ekowisata di Sabu Raijua

Salah satu program kerja yang telah dilaksanakan Yapeka dalam mendukung pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan oleh masyarakat di perairan Laut Sawu adalah membangun Pusat Informasi Ekowisata (PIE) TNP Laut Sawu di Kawasan Wisata Mangrove Tulaika, Kabupaten Sabu Raijua. Pusat informasi ekowisata ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata dan pengetahuan pengunjung mengenai kegiatan ekowisata serta aspek lingkungan terkait kawasan TNP Laut Sawu. Pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di PIE Sabu, Yapeka mengadakan kegiatan sosialisasi Panduan SOP Pemeliharaan dan Pemanfaatan PIE Sabu kepada Pokdarwis Mata Padomara selaku pihak penerima manfaat. Selain Pokdarwis kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak antara lain BKKPN Kupang, Kelurahan Mebba, Dinas Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua. pada kesempatan ini juga dilakukan kegiatan penandatanganan berita acara penitipan asset PIE Sabu yang dilakukan oleh pejabat sementara Ketua Pokdarwis Mata Padomara, Bapak Javit. Tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain Yapeka bersama dengan BKKPN Kupang akan memulai melakukan pengisian material dan bahan-bahan promosi dan edukasi agar PIE Sabu dapat segera dapat beroperasi.



Gambar 1.A.1.5 Diskusi SOP Pemeliharaan dan Pemanfaatan PIE Sabu

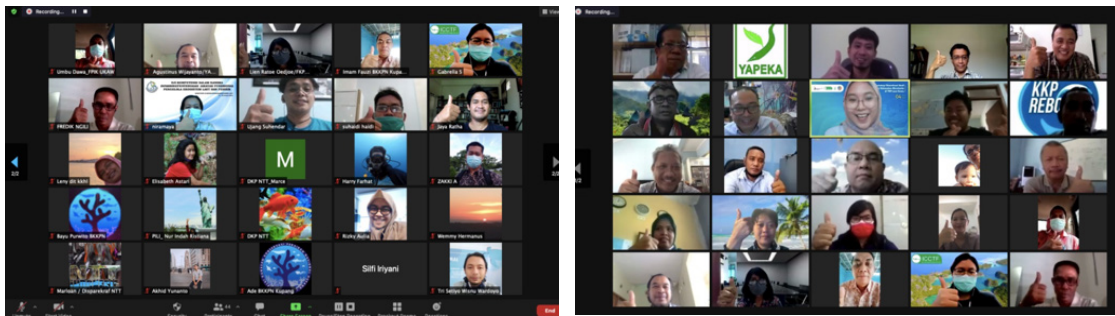
#### d. Workshop Diseminasi Hasil Kajian Kelayakan Investasi Ekowisata di TNP Laut Sawu

Salah satu Kegiatan proyek COREMAP – CTI World Bank dalam paket 2 yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 adalah kegiatan penyusunan Kajian Kelayakan Investasi untuk Ekowisata di TNP Laut Sawu. Hasil kajian diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan EKKP-3-K Peringkat Biru khususnya Kriteria 9: Standard Operational Procedure Pengelolaan Pariwisata Alam (Nomor B45); Kriteria 14: Pengelolaan Sumberdaya Kawasan (Nomor B59); dan Kriteria 15: Pengelolaan Sosial Ekonomi dan Budaya (Nomor B66). Sebagai tindaklanjut dari kegiatan tersebut, pada tanggal 4 Mei 2021 Yapeka mengadakan kegiatan Workshop Diseminasi Kajian Kelayakan Investasi Ekowisata di TNP Laut Sawu. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian kelayakan investasi ekowisata dan model pengembangan bisnis ekowisata yang telah dilaksanakan oleh Yapeka serta mendapatkan masukan untuk penyusunan rekomendasi/*policy brief* pengembangan ekowisata di Laut Sawu. Kegiatan dilakukan secara daring dengan menghadirkan narasumber dari BKKPN Kupang dan Tim Penyusun Kajian Kelayakan Investasi Ekowisata, peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 58 orang dengan rincian 36 peserta laki-laki dan 22 peserta perempuan.

Dari hasil yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa: 1). TNP Sawu memiliki keunikan keragaman daya tarik perairan didukung dengan daya tarik daratan sehingga sangat layak untuk pengembangan pariwisata; 2). Perbaikan tata kelola pariwisata dilakukan agar dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan daya saing, serta memberi manfaat bagi pelestarian laut dan peningkatan ekonomi lokal; dan 3). Pengembangan model bisnis ekowisata bagi pengelola TNP sawu disarankan untuk memberi penekanan pada nilai –nilai yang dijalankan berdasarkan keunikan daya tarik wisata, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Yapeka akan melakukan koordinasi dengan BKKPN Kupang dan Pemerintah Propinsi NTT untuk menyusun rekomendasi kebijakan (*policy brief*) dan panduan operasional pengembangan pariwisata di TNP Laut Sawu serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pengelolaan TNP Laut Sawu.



Gambar 1.A.1.6.  
Presentasi  
Konsultan Kajian  
Ekowisata pada saat  
workshop Diseminasi  
Hasil Kajian



Gambar 1.A.1.7. Screenshoot peserta workshop online Diseminasi Hasil Kajian Ekowisata

#### e. Pelatihan Pencegahan Hasil Tangkapan Sampingan Perikanan Laut/ *Bycatch*

Salah satu kegiatan proyek COREMAP - CTI World Bank dalam paket 2 yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Yapeka adalah pelatihan pencegahan hasil tangkapan sampingan atau *bycatch* bagi nelayan tangkap di kawasan TNP Laut Sawu. Sasaran kelompok nelayan yang dilibatkan untuk kegiatan ini adalah nelayan di Desa Tablong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilaporkan potensi risiko kejadian *bycatch* di daerah ini cukup tinggi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Juni 2021 dan diikuti oleh 28 peserta yang merupakan anggota kelompok nelayan Desa Tablong. Selain masyarakat nelayan kegiatan ini juga diikuti oleh staf teknis BKKPN Kupang, staf teknis DKP Provinsi NTT, mahasiswa Universitas Nusa Cendana dan mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1). peserta mengetahui pengertian *bycatch* dan spesies pengganggu, serta mengerti kerugian yang dapat terjadi akibat *bycatch* dan hadirnya spesies pengganggu; 2). peserta memahami cara pencegahan *bycatch* dan spesies pengganggu dengan menggunakan peralatan instrumen *pisces*; 3). peserta memahami cara validasi/monitoring hasil data pencegahan *bycatch* hasil dari penggunaan alat instrumen *pisces*. Pelatihan dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi pemaparan materi dan simulasi lapangan penggunaan alat instrumen *pisces* di area *fishing ground*. Dari hasil ujicoba selama 2 hari tidak ditemukan adanya tangkapan sampingan/*baycatch* yang didapatkan oleh nelayan, meskipun begitu pengambilan data dalam jumlah yang lebih banyak perlu dilakukan untuk melihat konsistensi hasil dari alat ini, serta perlu dilakukan penyempurnaan teknik pencegahan *bycatch* menggunakan *pisces*.



Gambar 1.A.1.8. Pembukaan Pelatihan Pencegahan Bycatch di Desa Tablolong



Gambar 1.A.1.9. Praktek pencegahan bycatch di fishing ground

#### f. Pelatihan Pemandu Ekowisata

Guna mendukung pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu untuk kegiatan pariwisata yang berkelanjutan oleh masyarakat, pada tanggal 15-16 Juni 2021 bertempat di Hotel Swissbell-Inn, Kupang Yapeka melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemandu Ekowisata. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada peserta pelatihan perihal dasar-dasar kependuan ekowisata dan mempersiapkan peserta pelatihan untuk menjadi pemandu ekowisata tingkat pemula yang bersertifikat sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Peserta kegiatan pelatihan ini sebanyak 24 orang yang merupakan pemandu ekowisata yang berasal dari masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pemandu wisata lokal yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata (HPI) di Wilayah Provinsi NTT, terutama di Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote dan Kabupaten Sumba Timur. Jumlah peserta laki-laki 17 orang dan peserta perempuan berjumlah 7 orang. Pelatihan dibagi dalam dua sesi yaitu sesi kelas dan praktik lapangan, adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini antara lain pemahaman ekowisata, dasar-dasar pemanduan, teknik pemanduan, teknik interpretasi, kode etik pemandu, prosedur keselamatan, pertolongan pertama pada kecelakaan serta dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya. Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah para peserta akan melaksanakan pemanduan di tempat masing-masing dibawah pengawasan dari Tim Yapeka untuk memantau performa para peserta. Selanjutnya akan dilakukan uji kompetensi yang disiapkan untuk 20 orang peserta yang layak dan direncanakan akan dilaksanakan di Kupang pada bulan September-Oktober 2021.



Gambar 1.A.1.10. Suasana Pelatihan Pemandu Ekowisata di Kelas pada Tanggal 16 Juni 2021



Gambar 1.A.1.11. Foto bersama peserta pelatihan pemandu ekowisata di Hotel Swissbel-inn Kupang

## 1.2 Indikator 3.4 Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu, Cetacea dan Pari Manta0

### 1.2.1 Paket Kegiatan 3 – Yayasan Reefcheck Indonesia

#### a. Sosialisasi Rencana Pendataan Hasil Tangkapan Elasmobranchii

Pada hari Sabtu 24 April 2021, Reef Check Indonesia melakukan sosialisasi rencana pendataan hasil tangkapan Elasmobranchii melalui enumerasi di lokasi pendaratan perikanan di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilakukan bersama mitra dan stakeholder setempat, antara lain Bappenas, ICCTF, LPSPL Sorong, DKP Provinsi Papua Barat, DKP Kota Sorong, Kepala Pelabuhan, Kelompok Pengusaha Kapal dan Koperasi Perikanan, serta Terangi. Kegiatan diawali dengan pemaparan kebijakan dan regulasi hiu dan pari di Indonesia, lalu metoda pencatatan pendaratan perikanan dan pentingnya peran tersebut untuk keberlanjutan spesies, dan teknis pencatatan di lokasi pendaratan perikanan. Tindak lanjut kegiatan sosialisasi tersebut berupa rencana pendataan oleh YRCI di PPI Klademak dan PPP Sorong serta akan melakukan koordinasi dengan para pengusaha sirip hiu juga LPSPL Sorong. Salah satu output final dalam rangkaian kegiatan ini adalah tersedianya laporan ilmiah terkait dinamika populasi Elasmobranchii pada perikanan di Papua, termasuk implikasinya terhadap pengelolaan perikanan.



Gambar 1.A.1.12. Sesi diskusi pada sosialisasi rencana pendataan perikanan di Sorong

## b. Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Penggunaan Lampu LED sebagai Alat Mitigasi *Bycatch* Elasmobranchii

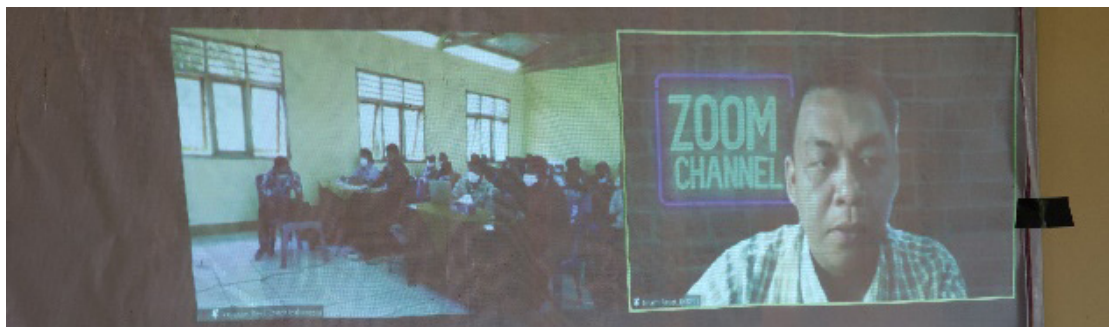
Pada bulan April 2020, YRCI melakukan pembuatan draft panduan uji coba alat mitigasi *bycatch* elasmobranchii. Selanjutnya, pada 17 April 2021, dilakukan Sosialisasi Pelaksanaan Kajian Ilmiah Penilaian Efektivitas Penggunaan Lampu LED sebagai Alat Mitigasi *Bycatch* Elasmobranchii dan Penanganan *Bycatch* di TNP Laut Sawu, yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan riset yang akan dilakukan oleh staf YRCI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 52 orang, dengan daftar undangan dan peserta antara lain perwakilan dari Bappenas, ICCTF, Dr. Mochammad Riyanto, BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKPP Manggarai Barat, dan kelompok nelayan di Desa Nangalili, Manggarai Barat, NTT. Pada kegiatan sosialisasi, dilakukan pemaparan terkait Penggunaan Lampu LED pada Perikanan Skala Kecil di Desa Nangalili dan Rencana Kajian Lampu LED di Nangalili yang diikuti dengan kegiatan diskusi bersama nelayan Desa Nangalili yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan riset. Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini yaitu Tim YRCI akan melakukan pendataan di Desa Nangaili terkait mitigasi *bycatch* dengan ikut pada kapal nelayan dan survey pendahuluan akan dilakukan untuk menerapkan metoda yang sudah dibuat sebelumnya.



Gambar 1.A.2.13. Pemaparan rencana riset mitigasi lampu LED oleh Dr. Riyanto di Desa Nangalili

### **c. Sosialisasi Regulasi dan Konservasi Hiu, Pari Manta serta Cetacea di TNP Laut Sawu**

Pada 17 April 2021, YRCI melakukan Sosialisasi Regulasi dan Konservasi Hiu, Pari Manta, serta Cetacea yang dilakukan di Desa Nangalili, Manggarai Barat, NTT. Kegiatan sosialisasi ini mengundang Bappenas, ICCTF, Dr. Mochammad Riyanto, BKKPN Kupang, DKP Provinsi, DKPP Manggarai Barat, dan nelayan Desa Nangalili. Pemaparan materi disampaikan oleh pihak dari BKKPN Kupang dan DKPP Manggarai Barat dimana penguatan regulasi hiu dan pari di tingkat daerah dari Pembelajaran dari Perbub Manggarai No. 18 Tahun 2019 tentang perlindungan hiu dan pari yang alternatifnya dapat digunakan sebagai daya tarik wisata. Selain itu regulasi hewan laut dilindungi juga tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) KepMenKP No. 79 tahun 2018 dan KepMen KP no. 18 tahun 2021 yang dapat menjadi acuan dalam jenis hewan tangkapan apa saja yang dikategorikan sebagai *bycatch* dan apa yang harus dilakukan bila terjadi *bycatch* oleh nelayan setempat seperti melakukan pelaporan.



Gambar 1.A.1.14. Sosialisasi Regulasi Hiu, Pari, dan Cetacea di Desa Nangalili

### **d. Survey Terpadu Pemasangan Tag dan Photo IDs serta Sensus Populasi Pari Manta Dalam Mendukung Kajian Pola Pergerakan dan Sensus Populasi Pari Manta di Raja Ampat**

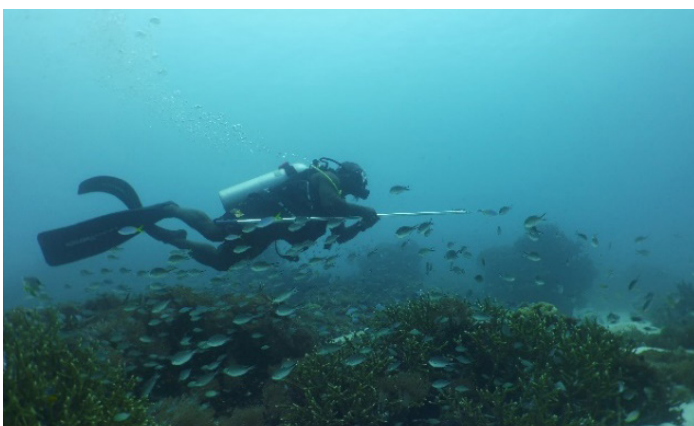
Rangkaian survey terpadu untuk mendukung kajian pola pergerakan dan sensus populasi pari manta di raja ampat dilakukan dalam 3 trip pada bulan April - Mei 2021. Trip pertama dilakukan pada 27 April – 1 Mei 2021, trip ke – 2 dilakukan pada tanggal 6 – 9 Mei 2021, dan trip ke 3 dilaksanakan pada 22 – 26 Mei 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan kajian populasi dan pergerakan pari manta di raja ampat melalui pemasangan *satelit tagging*, *acoustic tagging*, *receiver acoustic*, dan juga pengamatan manta dan pengambilan photo IDs. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Reefcheck Indonesia bekerja sama dengan berbagai instansi antara lain BKKPN Kupang, BLUD Raja Ampat, Universitas Papua dan Conservation



International Indonesia. Sebelum melakukan survey tersebut, Reef Check Indonesia telah menyusun Pedoman Panduan Tagging, termasuk rencana tanggap darurat, untuk meminimalkan risiko hewan terluka akibat pelaksanaan tagging, serta untuk keselamatan hewan dan personil yang akan melakukan tagging. Dari hasil survey yang dilakukan telah terpasang 3 *receiver* di lokasi target, masing – masing di Hol Gam feeding area (KKPD Selat Dampier), Yefnabi Besar (SAP Raja Ampat) dan Lagoon Wayag (SAP Waigeo Sebelah Barat). 6 *tag* akustik telah terpasang masing-masing 1 *tag* di Wayag (SAP Waigeo Sebelah Barat), Hol Gam (KKPD Selat Dampier), Manta Sandy (KKPD Selat Dampier) dan 2 *tag* di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat). Sedangkan untuk tag satelit, 3 *tag* berhasil dipasang pada pari manta di Yefnabi Kecil (SAP Raja Ampat) dan 2 tag di Dayan (KKPD Selat Dampier). Untuk sensus pari manta dengan menggunakan Photo IDs saat ini telah teridentifikasi 13 individu pari manta di lokasi kajian. Dari kajian dan analisis lebih lanjut diharapkan tersedianya laporan bulanan *summary database photo ID* dan sensus populasi pari manta di Papua Barat, laporan kajian terkait informasi, jumlah individu, pola pergerakan dan tingkat kunjungan pari manta di Papua Barat (pada kawasan target baik itu SAP Waigeo Sebelah Barat, atau SAP Raja Ampat, atau Selat Dampier) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 1.A.1.15. *Briefing* teknis dan pembagian tugas untuk pemasangan *tag* akustik



Gambar 1.A.1.16. Penyelam yang bertugas sebagai *tagger* di Manta Sandy (KKPD Selat Dampier)

#### e. Pelatihan Produksi Sabun dan Pengemasan Produk

Yayasan reefcheck Indonesia telah melakukan kajian potensi pengembangan wisata spesies berbasis masyarakat (WBSM) yang berkelanjutan. Hasil dari kajian tersebut antara lain terpilihnya lokasi implementasi program serta teridentifikasi industri penunjangnya salah satunya yaitu pembuatan sabun dari bahan kelapa serta *re-packing* produk lainnya. Untuk dapat mengimplementasikan pengembangan wisata dan industri penunjangnya, pada tanggal 14–18 Juni 2021 Yayasan Reef Check Indonesia mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan sabun dan pengemasan produk kepada masyarakat Desa Oeseli di TNP Laut Sawu. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dan diikuti oleh 22 orang peserta. Tujuan dan target dari pelatihan ini adalah masyarakat dapat membuat sabun alami dengan bahan dasar minyak kelapa. Sehingga masyarakat dapat menyediakan oleh-oleh sebagai penunjang industri wisata dari Desa Oeseli. Hasil dari pelatihan tersebut antara lain:

1. Peserta pelatihan memahami dengan baik materi yang disampaikan;
2. Peserta pelatihan menghasilkan sabun dengan bahan tambahan rumput laut, lidah buaya, madu kelor dan mangrove yang ada di Desa Oeseli. Sabun yang dihasilkan berbentuk biota laut seperti bintang laut, keong dan dolphin juga bentuk kotak dengan aroma cendana, Aloevera, lavender, vanilla dan strawberry dengan jumlah sekitar 72 sabun;
3. Peserta pelatihan dapat mengemas sabun dengan menggunakan kemasan anyaman daun lontar yang diproduksi oleh masyarakat setempat;
4. Peserta pelatihan mengerti cara menghitung modal dan harga jual sabun.

Berdasarkan komunikasi yang dibangun dengan berbagai pihak, sudah ada mitra untuk pemasaran sabun seperti Narrow Resto, Boutique, Spa & Villa yang tertarik untuk menjadikan produk sabun dari desa Oiseli sebagai souvenir untuk tamu, Anugrah Surf & Dive Resort bersedia mempromosikan di Resto dan digunakan bagi tamu yang menginap jangka pendek.



Gambar 1.A.1.17. Praktek pembuatan sabun: menuang bahan (adonan) sabun ke dalam cetakan



Gambar 1.A.1.18. Sabun yang sudah dikemas

#### f. Expert Meeting dan Penyusunan Modul Pelatihan Penanganan Kejadian Mamalia Laut Terdampar

Pertemuan panel ahli dan penyusunan modul penanganan kejadian terdampar mamalia laut adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam Paket 3 COREMAP – CTI World Bank pada bulan Juni 2021. Kegiatan dilakukan secara *hybrid* pada tanggal 17–18 Juni 2021 di The Anvaya Beach Resort, Bali dan diikuti oleh 24 peserta yang terdiri dari 15 peserta laki-laki serta 9 peserta perempuan. Tujuan dari ekspert meeting ini adalah: 1). mendapatkan masukan dalam rencana penyusunan modul penanganan kejadian mamalia laut terdampar, 2). menyusun draft awal modul penanganan kejadian mamalia laut terdampar, dan 3). menjalin koordinasi antara pemerintah pusat, stakeholder setempat, NGO, dan pihak-pihak lainnya sebagai langkah lebih lanjut dalam penanganan mamalia laut terdampar. Penyusunan modul dilakukan berdasarkan buku panduan yang telah ada saat ini dengan memperhatikan masukan – masukan dari para ahli mamalia laut serta berbagai pembelajaran dari kejadian terdampar di seluruh Indonesia berdasarkan keterlibatan stakeholder, NGO, dan pihak-pihak lainnya. Berdasarkan dari hasil diskusi dan pemaparan para narasumber dalam kegiatan ini telah tersusun kerangka modul untuk penanganan mamalia laut terdampar dalam jumlah besar (massal) dan mamalia laut berukuran besar. Kerangka modul ini akan ditindaklanjuti sebagai bahan pembahasan lanjutan oleh para ahli pada pertemuan selanjutnya.



Gambar 1.A.1.19. Pemaparan materi jejaring penanganan mamalia laut oleh Ibu Pingkan Roeroe dari KKHL – KKP



Gambar 1.A.1.20. Suasana diskusi expert meeting yang dipimpin oleh Drh I Made Jaya Ratha selaku moderator

## 2

### Sub Komponen 3.2 Pengelolaan Pesisir Terpadu (RZWP-3-K) Papua Barat

#### 2.1 Paket Kegiatan 4 – PKSPL IPB

##### a. Workshop Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Workshop Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dengan tema “Kebijakan Pengembangan *Fisheries* dan *Aquaculture Estate*: Peluang atau Ancaman” diselenggarakan oleh PKSPL – IPB pada tanggal 20 April 2021 secara *hybrid*. Workshop ini bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas peserta dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan mencapai pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumberdaya perikanan serta membahas isu-isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Workshop ini dihadiri oleh 420 orang peserta yang terdiri dari 25 orang peserta yang mengikuti kegiatan secara offline dan 395 peserta online. Prosentase jumlah peserta yang hadir didominasi oleh peserta wanita yaitu sebanyak 201 orang dan 194 peserta laki-laki. Catatan penting dari kegiatan tersebut antara lain: 1). Kebijakan pengembangan fisheries dan aquaculture estate dapat menjadi peluang jika dimanfaatkan secara optimal, tetapi akan menjadi ancaman jika tidak dapat dikelola secara baik; 2). Konservasi dalam pengelolaan perikanan sangat penting dilakukan; 3). Pemerintah, NGO dan stakeholder terkait yang terlibat dalam kegiatan konservasi dapat secara langsung membantu pengelolaan perikanan dengan syarat harus melakukan penguatan kapasitas masyarakat yang terlibat. Perbedaan karakteristik di masing-masing WPP menyebabkan tradisional dan *culture knowledge* penting diterapkan dalam kawasan konservasi.



Gambar 1.A.2.1. Sambutan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dalam kegiatan Workshop Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan



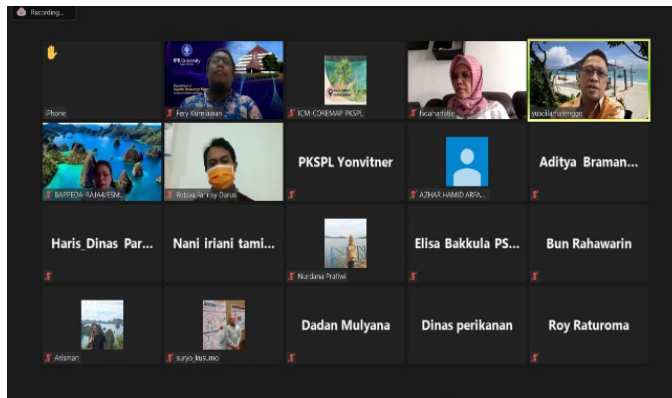
Gambar 1.A.2.2. Pemaparan materi *Developing Fisheries Management Plans* dari Prof. Jon G Sutinen (University of Rhode Island, USA)

#### b. **Diskusi Awal Keberlanjutan Program Rehabilitasi Ekosistem**

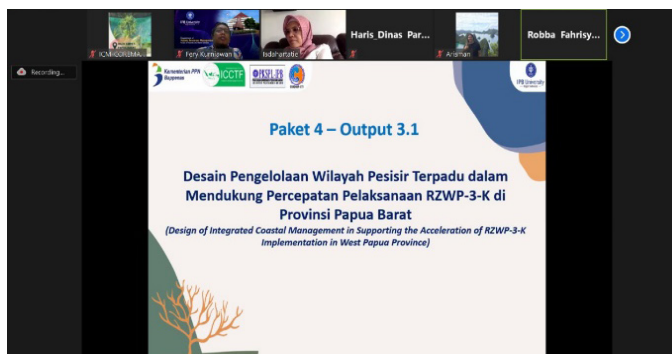
Pada tanggal 27 Mei 2021 PKSPL – IPB selaku mitra pelaksana paket 4 COREMAP – CTI World Bank mengadakan kegiatan diskusi terkait dengan keberlanjutan program rehabilitasi ekosistem di Raja Ampat, Papua Barat. Kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh tim konsultan rehabilitasi, Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, PSDKP Wilker Raja Ampat serta BLUD Pengelolaan KKP Kabupaten Raja Ampat. Diskusi ini bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan program rehabilitasi yang sedang berjalan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka program rehabilitasi ekosistem pesisir.

Dalam kegiatan ini Tim Konsultan rehabilitasi PKSPL – IPB menyampaikan progress kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, serta menjelaskan kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang) di Raja Ampat berdasarkan hasil penilaian studi mendalam, metode rehabilitasi dan teknis pelaksanaan penanaman yang direncanakan akan dilakukan pada kuartal 3 2021 di lokasi yang sudah ditentukan. Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat menyampaikan bahwa program yang dilakukan sangat membantu karena sejalan dengan kebijakan pembangunan di Raja Ampat yang salah satunya adalah peningkatan kawasan

konservasi dan lingkungan rendah karbon. Selain itu ada percepatan pembangunan untuk pembangunan wilayah dalam peningkatan ekonomi berbasis sumberdaya alam. Strategi yang diambil dalam pembangunan Raja Ampat adalah memanfaatkan kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi dan sumberdaya masyarakat.



Gambar 1.A.2.3. Screen shoot peserta diskusi



Gambar 1.A.2.4. Pemaparan tim rehabilitasi PKSPL - IPB

### c. Rehabilitasi Ekosistem Lamun

Tujuan Proyek Paket kegiatan 4 COREMAP – CTI World Bank yang diimplementasikan oleh PKSPL IPB adalah mendukung percepatan implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) tepatnya di Kabupaten Raja Ampat. Salah satu indikator untuk mencapai tujuan tersebut adalah adanya restorasi ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tanggal 15 – 24 Juni 2021 PKSPL – IPB melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem lamun di KKPD Selat Dampier tepatnya di Kampung Yensawai Barat, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pelaksana kegiatan ini adalah seluruh anggota kelompok Andoi, yang merupakan kelompok masyarakat penggiat ekosistem lamun di Kampung Yensawai.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 agenda, yaitu mereview pengetahuan di masyarakat terkait dengan rehabilitasi lamun, pelaksanaan penanaman serta monitoring dan perawatan pasca penanaman. Sebanyak 1521 rumpun bibit dari jenis *Enhalus acoroides*, *Halodule uninervis*, *Cymodocea rotundata*, dan *Thalassia hemprichii* berhasil ditanam dalam kegiatan ini. Teknik transplantasi yang digunakan yaitu teknik *sprig anchored*, *sprig unanchored*, *hessian bag*, dan *timbun sedimen*. Penggunaan teknik ini disesuaikan dengan jenis lamun dan kondisi lokasi penanaman. Presentaseutupan awal di area rehabilitasi berkisar antara 2 – 12% sedangkan tinggi kanopi atau Panjang helai daun berkisar 15 – 29 cm. Bimbingan teknis terkait dengan cara melakukan perawatan dan monitoring juga disampaikan pada akhir kegiatan.



Gambar 1.A.2.5. Pengambilan bibit lamun dari lokasi donor



Gambar 1.A.2.6. Pengukuran panjang helai daun

#### d. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Implementasi kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove dilakukan Kelompok Korbon Kampung Yensawai yang terdiri dari kurang lebih 30 orang anggota yang berasal dari Kampung Yensawai Barat dan Kampung Yensawai Timur. Yensawai dipilih sebagai lokasi rehabilitasi karena lokasinya yang tidak memiliki vegetasi pelindung alami sehingga sangat rentan mengalami abrasi dan erosi. Oleh karena itu upaya rehabilitasi mangrove sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan mencegah dari kerusakan yang lebih parah. Kegiatan rehabilitasi mangrove bersama Kelompok Karbon Kampung Yensawai dilaksanakan pada 14 – 29 Juni dengan menggunakan 3 teknik penanaman yaitu teknik penanaman rumpun berjarak, teknik penanaman rumpun berjarak berpagar serta teknik penanaman karbon pancang. Sebanyak 7530 bibit mangrove jenis *Rizopora mucronata*, *R. apiculata*, dan *R. stylosa* berhasil ditanam di sepanjang pantai kampung Yensawai serta disiapkan 3000 bibit untuk pemeliharaan termasuk untuk penyulaman. Pemilihan ketiga jenis mangrove tersebut didasarkan atas kesesuaian kondisi lingkungan ekosistem pesisir sekitar kampung dengan sifat-sifat ekologi jenis tersebut, serta kemudahan dan ketersediaan buah dan bibit yang ditanam.



Gambar 1.A.2.7. Penanaman dengan Teknik gigi hiu



Gambar 1.A.2.8. Proses penanaman mangrove dengan teknik rumpun berjarak



**e. Diskusi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi RZWP3K Papua Barat**

Pada tanggal 11 Juni 2021 PKSPL IPB mengadakan kegiatan diskusi bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terkait dengan Sistem Monitoring dan Implementasi RZWP3K yang saat ini sedang dibangun melalui Proyek COREMAP- CTI World Bank. Diskusi yang dilakukan secara online ini diikuti oleh 18 orang peserta yang berasal dari PKSPL IPB, tim konsultan pengembang sistem monev serta Pemda Provinsi Papua Barat. Diskusi ini secara spesifik bertujuan untuk mempresentasikan desain Sistem Monev Implementasi RZWP3K Provinsi Papua Barat yang sudah dibangun oleh tim konsultan PKSPL IPB serta kebutuhan data dalam menunjang Sistem tersebut. Kabid Perekonomian Bappeda Provinsi Papua Barat, Bapak Nixon Saiba menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi, Pamda Provinsi Papua Barat kesulitan untuk mengontrol dan mengawasi kawasan konservasi yang ada di daerah, sehingga dengan adanya sistem monev ini diharapkan akan membantu Pemda Papua Barat dalam melakukan implementasi RZWP3K dengan baik. Terkait dengan kebutuhan data dan informasi, saat ini tim konsultan sedang mengumpulkan data terkait dengan OPD yang terlibat dalam implementasi RZWP3K, program dan kegiatan RZWP3K, alokasi anggaran dan serapan, serta data kawasan RZWP3K. Evaluasi terhadap sistem ini diagendakan akan dilakukan pada bulan September – November 2021 untuk melihat apakah sistem sudah berjalan dengan baik sebelum digunakan dan diserahkan kepada Pemda Provinsi Papua Barat.

## 3

### Sub Komponen 3.3 Penatalayanan Sumber Daya Pesisir Oleh Masyarakat

#### 3.1 Paket Kegiatan 5 – Yayasan Terangi

##### a. Pembangunan Menara POKMASWAS

Pada kuartar ini, 3 Menara POKMASWAS telah selesai dibangun, yaitu 2 unit di Raja Ampat, tepatnya di Kampung Meos Manggara dan Kampung Sawandarek, serta 1 unit di Sabu, NTT. Namun demikian, berdasarkan monitoring lapangan yang dilakukan ICCTF pada April 2021, masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya perapihan lantai, cat, tangga, sisa material konstruksi, dan lainnya.

Pada bulan Juni 2021 telah dilakukan penandatanganan kontrak antara kontraktor dengan Terangi terkait pembangunan Menara POKMASWAS di 3 lokasi yaitu di Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sumba Barat Daya, NTT. SPPL untuk ketiga infrastruktur tersebut telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat, yaitu pada 26 Januari 2021 untuk Manggarai, 9 April 2021 untuk Rote, dan 24 Mei 2021 untuk Sumba Barat Daya. Kontraktor pelaksana pembangunan menara POKMASWAS tersebut juga telah menyampaikan Rencana K3L termasuk rencana tanggap darurat. Hingga akhir Juni 2021, ketiga infrastruktur tersebut masih dalam persiapan pembangunan atau tahap pre-konstruksi. Progres pembangunan Menara POKMASWAS yang dilakukan oleh Yayasan Terangi sampai dengan kuartal 2 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.3.1 Progress pembangunan Menara Pengawas POKMASWAS

INFRASTRUKTUR	STATUS	PROGRESS
Menara Pengawas di Meosmanggara (SAP Raja Ampat)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Sauwandarek (KKPD Selat Dampier)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Harapan Jaya (KKPD Misol)	Pengurusan Perijinan	0%
Menara Pengawas di Sabu Raijua (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	100%
Menara Pengawas di Rote Ndao (TNP Laut Sawu)	Konstruksi	32,22%
Menara Pengawas di Sumba Barat Daya (TNP Laut Sawu)	Penandatanganan Kontrak	0%
Menara Pengawas di Manggarai (TNP Laut Sawu)	Penandatanganan Kontrak	0%

**b. Diskusi dan FGD skema penyaluran operasional mingguan POKMASWAS di Kabupaten Sabu Raijua, TNP Laut Sawu**

Salah satu output dari paket kegiatan 5 pada program COREMAP – CTI World Bank yang diimplementasikan oleh Yayasan Terangi adalah memberikan dukungan operasional POKMASWAS di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu. Sehubungan dengan hal tersebut skema penyaluran dana operasional ini menjadi salah satu hal krusial agar penyaluran tepat sasaran, transparan serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada tanggal 28 Mei 2021, Yayasan Terangi mengadakan kegiatan diskusi dan FGD skema penyaluran operasional mingguan POKMASWAS di Kabupaten Sabu Raijua, TNP Laut Sawu. Sasaran dari kegiatan ini adalah POKMASWAS yang ada di Sabu antara lain POKMASWAS Laborai, POKMASWAS Eilogo dan POKMASWAS Laderaga. Selain unsur POKMASWAS kegiatan ini juga dihadiri oleh DKP Provinsi NTT dan Dinas Kelautan Kabupaten Sabu Raijua, total jumlah peserta pada kegiatan ini adalah 41 orang yang terdiri dari 37 laki-laki dan 4 orang perempuan.

Hal-hal penting yang menjadi isu pembahasan dalam kegiatan ini antara lain, bentuk bantuan operasional, mekanisme penyaluran, pengeluaran yang diperbolehkan, skema pendanaan berkelanjutan kelompok, rencana pengawasan, pengajuan uang muka kegiatan pengawasan, pembuatan laporan kegiatan pengawasan dan pembuatan laporan keuangan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penyerahan bantuan sarana pengawasan kepada 3 POKMASWAS di Kabupaten Sabu Raijua. Output dari kegiatan ini adalah adanya skema dan mekanisme penyaluran operasional mingguan untuk POKMASWAS di Kabupaten Sabu Raijua, mekanisme ini kemudian akan digunakan sebagai panduan baik oleh POKMASWAS maupun instansi terlibat lainnya dalam memperkuat POKMASWAS di Sabu Raijua khususnya dalam hal pemberian bantuan dana operasional.



Gambar 1.A.3.1. Peserta kegiatan diskusi



Gambar 1.A.3.2. POKMASWAS dari Desa Laderaga

**c. Workshop Pengawasan Berbasis Masyarakat Level 2 Tentang Pengawasan Tingkat Lanjut**

Yayasan Terangi melaksanakan kegiatan Workshop Pengawasan Berbasis Masyarakat Level 2 Tentang Pengawasan Tingkat Lanjut, workshop ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan workshop pengawasan level 1 tentang dasar-dasar pengawasan. Kegiatan Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 24–25 Juni di Sorong, Papua Barat dan diikuti oleh POKMASWAS yang berada di Raja Ampat yang sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan dasar-dasar pengawasan. Jumlah peserta yang mengikuti workshop sebanyak 47 orang terdiri dari 42 peserta laki-laki dan 5 orang peserta perempuan. Tujuan dari workshop ini adalah meningkatkan kapasitas POKMASWAS dalam hal pengawasan sumberdaya perairan khususnya terkait dengan pengenalan wilayah konservasi, perikanan berkelanjutan di wilayah konservasi, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi, ekosistem pesisir dan interaksinya dalam kawasan konservasi, penegakan hukum dalam kawasan konservasi, serta prinsip dasar berkelompok dan pengorganisasiannya. Kegiatan ini juga memfasilitasi POKMASWAS dalam penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga masing-masing POKMASWAS memiliki AD/ART yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan di wilayah masing-masing.



Gambar 1.A.3.3. Foto Bersama peserta kegiatan Workshop Pengawasan Level 2



Gambar 1.A.3.4. Peserta secara berkelompok menyusun AD/ART POKMASWAS

## 3.2 Paket Kegiatan 6 – PILI

### a. Kajian Bioekonomi Sederhana di SAP Raja Ampat

Kegiatan Kajian Bioekonomi dilakukan selama tiga hari pada tanggal 20 -22 April 2021 di Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat. Tujuan kajian bioekonomi sederhana ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam perairan secara berkelanjutan. Kajian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara semi terstruktur, deep interview, serta melakukan sampling ikan hasil tangkapan nelayan di Kampung Mutus. Aspek yang dikaji menyangkut aspek biologi sumberdaya ikan, teknologi penangkapan ikan, dan ekonomi perikanan. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa target penangkapan ikan didominasi oleh ikan demersal terutama ikan kerapu dengan menggunakan alat tangkap pancing dan menggunakan armada perahu motor tempel berukuran < 3GT. Hasil tangkapan per unit upaya (CPUE) menunjukkan tren yang menurun selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Selain itu daerah penangkapan ikan cenderung semakin jauh, trip penangkapan lebih lama, tren ukuran ikan target penangkapan semakin kecil. Kajian bioekonomi ini merupakan tahap awal dalam mengembangkan kerangka ataupun modelling bioekonomi sederhana dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan di SAP Kepulauan Raja Ampat serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Kampung Mutus.



Gambar 1.A.3.5. Wawancara dengan Nelayan di Kampung Mutus



Gambar 1.A.3.6 Sampling ikan hasil tangkapan nelayan di Kampung Mutus

#### b. **Workshop Bioekonomi Sederhana Bagi KMHA TNP Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao**

Tujuan kegiatan dilakukannya workshop bioekonomi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan KMHA di Kabupaten Rote Ndao mengenai pengelolaan sumber daya alam perairan secara berkelanjutan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 5 Mei di Desa Oelua, Kecamatan Landu, Kabupaten Rote Ndao dan diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari 23 peserta laki-laki dan 9 orang perempuan. Sementara di Desa Sotimori, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Kegiatan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2021 dan diikuti oleh 31 orang peserta (25 laki-laki dan 6 perempuan). Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan KMHA yang sudah tergabung dalam kelompok perikanan tangkap, kelompok pengolahan maupun kelompok pengawasan. Materi yang disampaikan dalam workshop ini antara lain: Materi yang disampaikan dalam workshop ini antara lain:

1. Materi I: Konsep bio-ekonomi dalam pengelolaan perikanan;
2. Materi II: Pengolahan hasil perikanan yang higienis dan berkelanjutan;
3. Materi III: Penggunaan pengetahuan ekologi nelayan dalam pengelolaan perikanan;.
4. Materi IV: Aspek biologi sumberdaya ikan dan pemantauannya; dan
5. Materi V: Praktek parameter reproduksi ikan: identifikasi jenis kelamin ikan dan tingkat kematangan gonad ikan.

Secara umum, masyarakat Desa Oelua dan Sotimori memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kondisi dan perkembangan perikanan setempat dan hal ini sangat membantu tim dalam memahami status sumberdaya serta dinamikanya. Tindak lanjut dari kegiatan workshop ini adalah akan dilakukan Kajian Bioekonomi sederhana secara partisipatif di Desa Oelua dan Sotimori, Kabupaten Rote Ndao.



Gambar 1.A.3.7 Penyampaian materi konsep bio-ekonomi dalam pengelolaan perikanan

### c. Kajian Bioekonomi Sederhana Bagi KMHA TNP Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan workshop Bioekonomi Sederhana, pada tanggal 6 – 10 Mei 2021 Yayasan PILI melakukan kegiatan Kajian Bioekonomi Sederhana Bagi KMHA TNP Laut Sawu di Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan dilakukan di Desa Oelua dan Desa Sotimori. Bioekonomi perikanan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perikanan, pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya ikan harus mempertimbangkan aspek biologi sumberdaya ikan yang memberikan rekomendasi kebijakan terhadap aktivitas penangkapan ikan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimum bagi nelayan. Kajian bioekonomi perikanan ini menjadi sangat penting dalam mendukung upaya penguatan kapasitas pengelolaan perikanan ditingkat lokal oleh masyarakat setempat melalui pendekatan adat. Penguatan kapasitas pengelola dan penyiapan dokumen pengelolaan perikanan menjadi penting untuk dilakukan agar upaya pengelolaan perikanan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan memberikan hasil yang baik.

Kajian bioekonomi sederhana dilakukan dengan metode observasi, wawancara semi terstruktur dan deep interview, serta sampling ikan. Sedangkan aspek yang dikaji antara lain menyangkut aspek biologi sumberdaya ikan, teknologi penangkapan ikan, dan ekonomi perikanan. Hasil kajian yang dilakukan di Desa Oelua menunjukkan bahwa perairan Desa Oelua dan sekitarnya memiliki potensi sumberdaya ikan yang



Gambar 1.A.3.8. Wawancara nelayan di Desa Sotimori

cukup besar selain itu juga kondisi lingkungan perairan sangat sesuai untuk kegiatan budidaya terutama budidaya rumput laut. Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Desa Oelua mencakup penangkapan teripang yang sampai dulakukan ke wilayah perairan Australia di Pulau Dato dan Pulau Pasir, penangkapan ikan demersal karang di perairan sekitar Desa Oelua hingga ke Pulau Do'o, Nuse, Ndao

dan Dengka dengan menggunakan alat tangkap pancing, panah dan pukot/jaring. Sementara hasil kajian bio-ekonomi perikanan dan budidaya di Desa Sotimori menunjukkan bahwa status sumberdaya ikan masih cukup baik yang ditandai dengan hasil tangkapan, ukuran ikan hasil tangkapan dan lokasi penangkapan ikan tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir.

#### d. Serial Pertemuan Panitia POKJA KMHA di Raja Ampat dan Rote Ndao

Salah satu output dari Paket Kegiatan 6 COREMAP – CTI World Bank adalah terbentuknya Panitia POKJA untuk pengakuan dan perlindungan KMHA di Raja Ampat dan Nusa Tenggara Timur. Pada periode bulan Juni 2021 Yayasan Pili melakukan rangkaian pertemuan dengan berbagai pihak di Raja Ampat dan di NTT dalam rangka mendorong pembentukan dan penguatan KMHA di dua lokasi tersebut. Serial pertemuan di Raja Ampat dilakukan pada tanggal 1, 5, 18 dan 25 Juni 2021 dengan melibatkan 19 orang yang berasal dari Lembaga Masyarakat Adat Betew Kafdarun, Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat dan Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat. Tujuan dari rangkaian pertemuan di Raja Ampat adalah untuk koordinasi terkait dengan surat rekomendasi pembentukan panitia pokja KMHA serta finalisasi draft SK Pokja Pembentukan KMHA di Raja Ampat. Sementara rangkaian pertemuan di Rote Ndao, NTT dilakukan pada tanggal 7, 11 dan 19 Juni 2021. Pertemuan di Rote Ndao bertujuan untuk memperkuat panitia pokja KMHA yang sudah terbentuk. Hal yang dibahas dalam serial pertemuan ini antara lain agenda persiapan pertemuan review SK Pembentukan Pokja dan Sekretariat KMHA Rote Ndao 2019, pembuatan draft SOP, mekanisme kerja serta rencana kerja panitia Pokja KMHA. Kegiatan di Rote Ndao melibatkan 41 orang yang berasal OPD terkait seperti PMD, Bagian Hukum, Pariwisata, Perikanan, KPH, PerkimLH, Bappelitbang dan ORTA Kabupaten Rote Ndao.



Gambar 1.A.3.9 Pertemuan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat



Gambar 1.A.3.10 Foto Bersama Peserta Kegiatan Saat Pertemuan di Hotel Videsy, Rote Ndao



e. **Serial Lokatulis Penyusunan Laporan Kajian Bioekonomi Sederhana Perikanan Karang di 3 KMHA Raja Ampat dan Laut Sawu**



Gambar 1.A.3.11 Loka Tulis Penyusunan Draft Laporan Hasil Kajian Bioekonomi Sederhana

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan draft laporan hasil kajian bioekonomi sederhana di Desa Sotimori dan Desa Oelua di NP Laut Sawu serta Kampung Mutus di SAP Raja Ampat. Serial lokatulis ini dilaksanakan dalam 2 sesi dimana sesi 1 merupakan konsinyasi tim konsultan kajian bioekonomi

sedangkan sesi 2 adalah lokatulis bersama UPT Pengelola TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat. Sesi 1 dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 – 13 Juni 2021 di Hotel Amaris, Kupang. Pada kegiatan lokatulis sesi 1 ini dihasilkan draft laporan kajian bioekonomi sederhana di TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat, draft ini yang nantinya akan mendapatkan masukan teknis dari para pemangku kepentingan di dua Kawasan konservasi tersebut. Serial lokatulis sesi ke - 2 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 di hotel Sotis Kupang, kegiatan dilakukan secara *Hybrid* dengan menggabungkan peserta *offline* dengan peserta *online* melalui media *zoom call*. Pada sesi ke – 2 ini para pemangku kepentingan diminta untuk melakukan pembobotan terhadap draft laporan kajian yang sudah disusun, selain itu dalam pertemuan ini juga disepakati format dan hasil kajian Bioekonomi di Kampung Mutus, Desa Oelua dan Sotimori oleh UPT pengelola SAP Raja Ampat dan TNP Laut Sawu. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah finalisasi laporan kajian oleh tim konsultan sesuai dengan saran dan masukan dari pihak terkait.

**f. FGD Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Hak**

Salah satu komponen yang dijalankan oleh Yayasan Pili yaitu penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dengan Kelola Adat untuk wilayah dampingan, di TNP Laut Sawu. Pada tanggal 17 – 19 Juni 2021 Yayasan Pili melaksanakan kegiatan FGD serta observasi lapangan yang bertujuan untuk merumuskan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM) bersama BKKPN Kupang, OPD Kabupaten Rote Ndao serta perwakilan dari kelompok binaan Desa Oelua dan Sotimori. FGD dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 di Hotel New Ricky, Rote dengan diikuti oleh 42 orang peserta (34 laki-laki dan 8 perempuan). FGD penyusunan rencana kelola berbasis hak ini dilakukan sebagai konsultasi publik bersama masyarakat Oelua dan Sotimori serta para pihak yang bertujuan untuk menghimpun masukan terhadap Rencana Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Kelola Adat. Sedangkan observasi lapangan ke Desa Oelua dan Sotimori dilakukan pada tanggal 18 – 19 Juni 2021 dengan melakukan wawancara kepada masyarakat secara acak untuk mendapatkan fakta lapangan terkait dengan pengelolaan perikanan eksisting. Tindak lanjut dari kegiatan ini antara lain menyesuaikan rencana pengelolaan perikanan dengan pendekatan kelola adat berdasarkan hasil konsultasi publik serta melaksanakan FGD finalisasi rencana pengelolaan RB-FSM bersama BKKPN Kupang (satker Rote dan Raja Ampat).



Gambar 1.A.3.12. Pembukaan FGD Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan

## 4 Peningkatan Kapasitas

Pada periode April – Juni 2021, program COREMAP – CTI World Bank yang diimplementasikan di Raja Ampat dan TNP Laut Sawu telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas baik di masyarakat, Pemerintah Daerah, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana meliputi kegiatan pelatihan dan workshop, pada periode ini mitra pelaksana COREMAP – CTI World Bank total menyelenggarakan 4 pelatihan dan 11 *workshop*. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah telah terjadi peningkatan kapasitas pada 569 orang yang merupakan peserta pelatihan dan workshop yang terdiri dari 401 laki-laki dan 168 perempuan. Peserta pelatihan maupun workshop merupakan masyarakat yang berada di lokasi-lokasi intervensi program, anggota kelompok binaan dari masing-masing mitra pelaksana, masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengawas sumberdaya kelautan serta dari unsur pemerintah yang merupakan pemangku kepentingan baik di Raja Ampat maupun di TNP Laut Sawu. Peningkatan kapasitas peserta pelatihan dapat diukur dari nilai pre test dan post test serta beberapa praktik lapangan paska pelatihan. Detail kegiatan pelatihan dan workshop yang dilakukan pada kuartal 2 2021 ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.A.4.1 Kegiatan pelatihan COREMAP – CTI World Bank periode April – Juni 2021

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Sasaran Peserta Kegiatan	Pelaksana	Jumlah Peserta	
					L	P
1	Pelatihan Pemandu Ekowisata	15 -19 Juni 2021	Masyarakat penggiat pariwisata di TNP Laut Sawu	Yapeka	14	7
2	Pelatihan Pencegahan dan Penanganan <i>Bycatch</i>	7 - 11 Juni 2021	Masyarakat nelayan Tablolong, Kupang	Yapeka	34	0
3	Pelatihan pembuatan sabun alami dan <i>repackaging</i> produk	10 – 24 Juni 2021	Masyarakat Oeseli, Rote Ndao	Reef Check	7	20
4	Pelatihan Jasa Ekosistem	28 Juni – 1 Juli 2021	Masyarakat Yensawai, Raja Ampat	PKSPL - IPB	30	35
<b>Total peserta pelatihan</b>					<b>55</b>	<b>62</b>

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Sasaran Peserta Kegiatan	Pelaksana	Jumlah Peserta	
					L	P
1	Workshop Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di KKPD Selat Dampier	19 - 20 April 2021	Masyarakat Yensawai, KKPD Selat Dampier	Terangi Paket 1	34	21
2	Workshop Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di SAP Raja Ampat	15 - 16 April 2021	Masyarakat ManyaiFun, SAP Raja Ampat	Terangi Paket 1	39	2
3	Workshop Rehabilitasi Ekosistem Pesisir di Waisai	22 - 23 April 2021	Pemangku kepentingan di Raja Ampat	Terangi Paket 1	36	6
4	Workshop Diseminasi Hasil Kajian Kelayakan Investasi Ekowisata di TNP Laut Sawu	4 Mei 2021	Pemangku kepentingan TNP Laut Sawu	Yapeka	36	22
5	Workshop Kajian Bioekonomi Sederhana Secara Partisipatif	5 Mei 2021	Masyarakat KMHA Oelua, Rote Ndao	PILI	23	9
6	Workshop Kajian Bioekonomi Sederhana Secara Partisipatif	8 Mei 2021	Masyarakat KMHA Sotimori, Rote Ndao	PILI	25	6
7	Workshop Integrasi Hasil Kajian Kelayakan Investasi Ekowisata TNP Laut Sawu	8 - 10 Juni 2021	Pemangku kepentingan di TNP Laut Sawu	Yapeka	11	14
8	Workshop menyiapkan panduan/SOP ekowisata/wisata bahari di TNP Laut Sawu	9 Juni 2021	Pemangku kepentingan di TNP Laut Sawu	Yapeka	6	6
9	<i>Expert meeting</i> pendahuluan rencana penyusunan modul penanganan kejadian mamalia laut terdampar	17 - 18 Juni 2021	Pemangku kepentingan terkait dan praktisi mamalia laut	Reefcheck	15	9
10	Workshop Pengawasan Berbasis Masyarakat Level 2 Tentang Pengawasan Tingkat Lanjut	24 - 25 Juni 2021	POKMASWAS di Raja Ampat	Terangi Paket 5	52	5
11	Workshop Pengawasan Berbasis Masyarakat Level 1 Dasar-Dasar Pengawasan	15 Juni 2021	POKMASWAS di Manggarai	Terangi Paket 5	39	6
<b>Total Peserta Workshop</b>					<b>277</b>	<b>106</b>

## 5

### Kendala dan Hambatan Implementasi Program

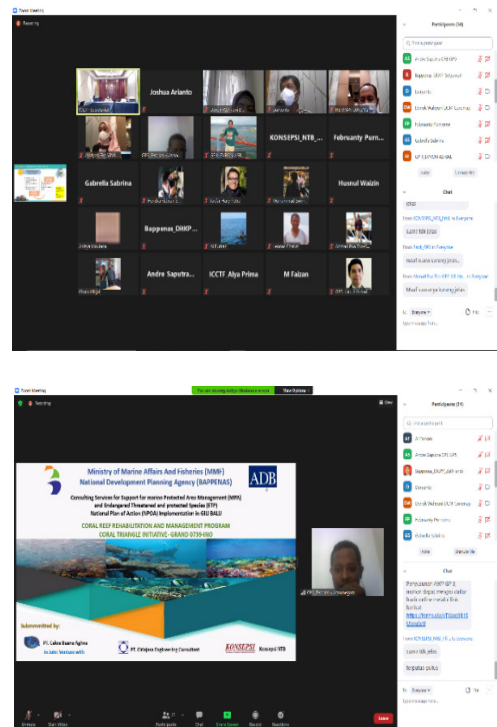
Pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu kendala dalam implementasi program yang dilakukan oleh mitra pelaksana mengingat tidak semua kegiatan dapat dilakukan secara online. Selain itu, terdapat beberapa personil mitra pelaksana yang terinfeksi virus COVID-19 sehingga berdampak pula pada tertundanya pelaksanaan program. Dengan adanya pembatasan perjalanan akibat Pandemi COVID-19, ICCTF juga mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring lapangan untuk mengecek kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan.

## B. COREMAP–CTI Asian Development Bank

### Kegiatan COREMAP-CTI ADB

#### a. Pembahasan AWP Grant Package 3 COREMAP-CTI ADB

Pada ti Yanti JS, memberikan arahan agar dalam penyusunan *Annual Work Plan* kembali melihat tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya adalah komunikasi yang baik dan kesepahaman antara PT CBA dengan konsorsiumnya PT Ciriajasa dan ICCTF. Selain itu terkait rencana publikasi dan rencana anggaran diharapkan adanya inovasi pengelolaan ekosistem terumbu karang dengan adanya proyek ini. Harus dapat dipastikan bahwa semua stakeholder dapat terlibat dan dikomunikasikan, di tingkat nasional sampai ke lingkungan sekitar proyek, agar tidak ada pihak yang merasa tidak dilibatkan. Kemudian, diharapkan PT CBA agar dalam pelaksanaan proyek ini dilakukan secara transparan, menjamin akuntabilitas, dan bertanggung jawab.



Gambar 1.B.1. Pemaparan Logframe oleh Pak Febri Atmanegara (PC)

#### b. Monitoring Progres Kegiatan Master Degree Program

Pada tanggal 15 April 2021, dilakukan koordinasi antara Bappenas ICCTF, dengan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, dan tim Pengelola Master Program ICCTF-IPB. Pada kesempatan meeting tersebut, Pak Tonny Wagey, selaku ICCTF *Executive Director*, menyampaikan latar belakang, tujuan serta rangkaian kegiatan dalam master program. Selain itu, disampaikan pula tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Mahasiswa terkait pembelajaran sistem online antara di Kampus UQ, Brisbane, Australia dengan lokasi belajar mahasiswa di Indonesia. Kemudian juga menyampaikan status mahasiswa yang belum melakukan kontrak dengan IPB selaku universitas sponsor.

Menanggapi paparan yang disampaikan oleh Pak Tonny, Dekan FPIK, Pak Fredinan menginformasikan terkait alur proses kebijakan serta komitmen dalam implementasi program di IPB. Bapak Dekan juga menyampaikan dukungan untuk memastikan proses

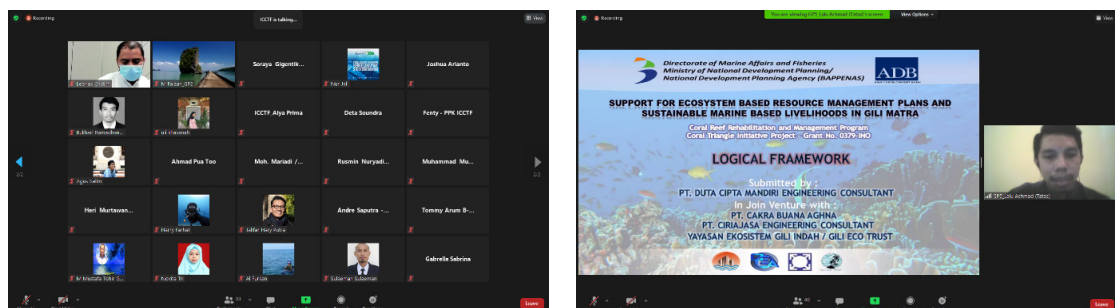
kontrak atau kerjasama antara IPB dengan Mahasiswa penerima beasiswa dari Program COREMAP-CTI ICCTF dapat segera terealisasi. Selanjutnya Pak Dekan menyampaikan langkah-langkah koordinasi internal yang akan dilakukan dalam proses pencairan beasiswa bagi para mahasiswa.

### c. Pembahasan AWP COREMAP-CTI ADB GP 2 dan 5 COREMAP

Pada tanggal 16 April 2021, dilaksanakan pembahasan *Logical Framework* dan *Annual Work Plan* Grant Package 2 dan Grant Package 5 COREMAP-CTI ADB. Paket 2 memiliki kontrak senilai USD 547,992. Paket berupa: SOP Penyu & Hiu, VMS, PES, Dinamika Populasi, Studi kelayakan ekowisata, MoU Jejaring di NTB, pelatihan ekowisata & menyelam, publikasi dan pusat Informasi, serta produk *lesson learn*. Sementara untuk Paket 5 memiliki total kontrak senilai USD 730,320. Paket kegiatan meliputi: Pengelolaan KKP, rehabilitasi terumbu karang, perbaikan perikanan karang, koordinasi stakeholders, penyadaran dan kampanye publik, peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur solar panel & dukungan POKMASWAS, serta pembelajaran *lesson learn* dari pelaksanaan proyek.

Pada acara pembukaan, Koordinator Perikanan Bappenas, Ibu Setyawati, menyampaikan agar menjadi perhatian bagi mitra untuk melakukan persiapan Entry meeting beserta Mission Asian Development Bank nantinya. Mitra pelaksana harus melaksanakan proyek ini dengan transparan, menjaga akuntabilitas dan bertanggung jawab. Bappenas ICCTF akan senantiasa memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan ini.

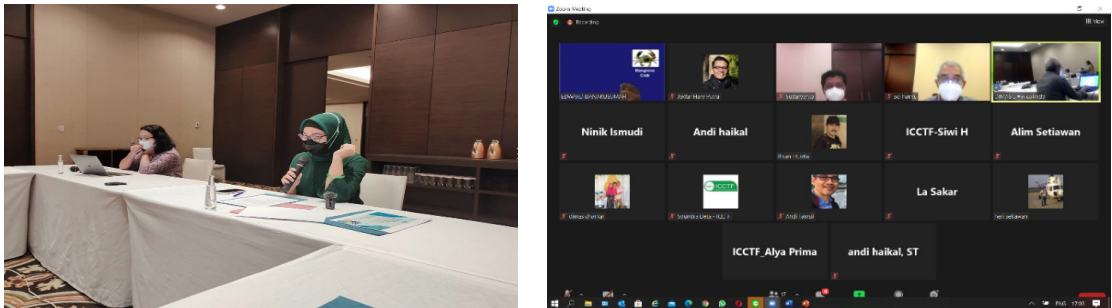
Pada akhir kegiatan dibutuhkan informasi yang lebih matang, beragam, dan lengkap dari PT Duta Cipta Mandiri terkait *outcome* dan output setiap paket yaitu GP 2 dan GP 5 yang lebih mendetail. Sehingga diharapkan pada koordinasi selanjutnya telah dapat memberikan gambaran yang lebih terarah dan jelas sesuai dengan tujuan dalam TOR. Sebagai tindak lanjut akan diadakan koordinasi pada meeting selanjutnya terkait pendetailan *logframe*.



Gambar 1.B.2. Pemaparan Logframe oleh Pak Lalu Achmad (PC GP 5)

**d. Undangan Pembahasan *Inception Report* Paket Pekerjaan COREMAP-CTI ADB GP 6**

Pada tanggal 21 April 2021, ICCTF menghadiri undangan pembahasan *Inception Report* COREMAP-CTI ADB Grant Package 6 dengan judul "*Support for Ecosystem-based resources management plans and sustainable marine-based livelihoods Gili Balu*". Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Sri Yanti, menyampaikan arahan agar GP 6 ini dapat memanfaatkan sumber daya pesisir (usaha perikanan) yang merupakan salah satu sektor yang akan menguatkan dan memulihkan kembali perekonomian masyarakat pasca Pandemi COVID-19, serta dapat menerapkan Prokes dalam implementasinya. Beliau juga mengingatkan agar PT Sucofindo (GP 6) dan PT Cakra Buana Aghna (GP 3) dapat saling berkolaborasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatannya di lapangan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan atau paket pekerjaan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara sinergis untuk mencapai target EKKP-3-K. Rapat *Inception Report* juga membahas *output* dan rencana kerja. Terdapat beberapa kegiatan yang belum ada SOP nya. Contohnya perlunya tindak lanjut dari pengadaan kapal dan pengelolaan menara pengawas yang menuntut adanya SOP pengelolaannya. Dampak project juga perlu diperhatikan bagaimana *exit strategy* dipikirkan. Kemudian pembuktian *logframe* untuk indikator

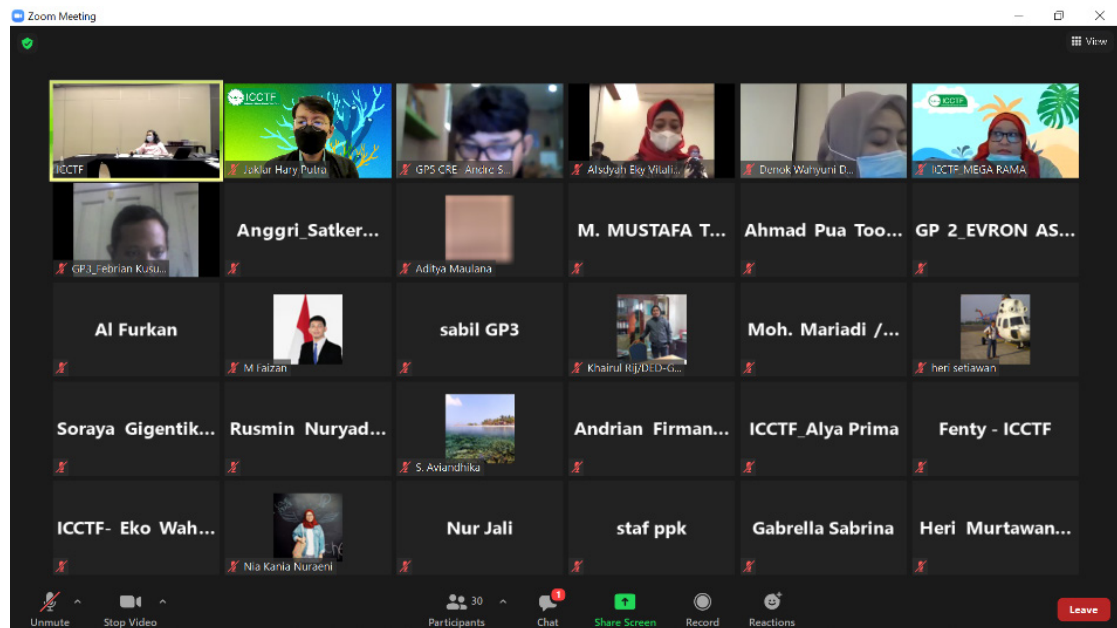


Gambar 1.B.3. Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas memberikan arahan pada pembahasan *Inception Report* COREMAP-CTI ADB GP-6



e. **Persiapan *Entry Meeting* COREMAP-CTI ADB tingkat Provinsi di Nusa Tenggara Barat**

Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021 ini merupakan rapat persiapan *entry meeting* yang rencananya akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari *entry meeting* ini adalah menyampaikan rencana kegiatan proyek COREMAP-CTI ADB dan membangun sinergi program guna mencapai pengelolaan KKP yang efektif sesuai rencana pengelolaan. Agenda kegiatannya adalah pelaksanaan *entry meeting* itu sendiri dan pelaksanaan *workshop*. *Entry meeting* akan meliputi penjelasan program, sambutan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, pembukaan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, dan penandatanganan PKS. Sementara pada *workshop*, masing-masing mitra akan memaparkan programnya di Gili Matra dan Gili Balu secara *offline* untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders*. Pelaksanaan kegiatan diagendakan pada minggu ketiga Bulan Mei, sekitar tanggal 20 atau 21 Mei 2021.



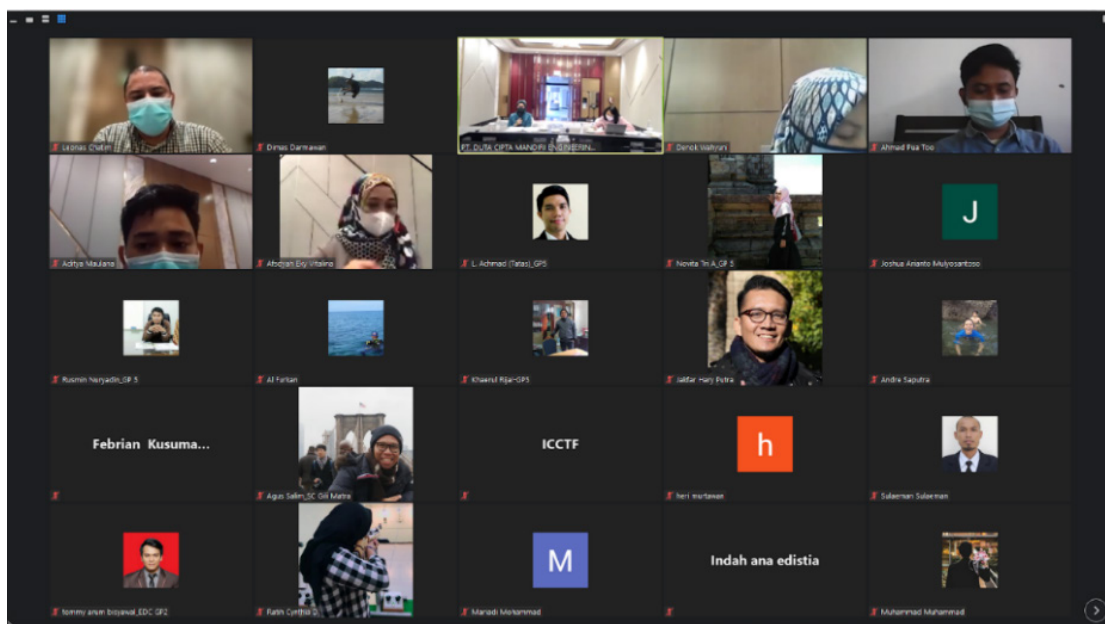
Gambar 1.B.4. Pelaksanaan pembahasan persiapan entry meeting

#### f. Rapat pembahasan kegiatan COREMAP-CTI ADB

Pada tanggal 25 Mei 2021 dilaksanakan rapat pembahasan kegiatan COREMAP-CTI ADB. Tujuan pertemuan membahas disbursement pelaksanaan expenditure mitra pelaksana paket 1-6. Hal ini penting dibahas karena ICCTF adalah satker dibawah kementerian Bappenas dimana penganggarannya melalui DIPA. Hibah untuk COREMAP-CTI ADB ini sifatnya *On Budget On Treasury*. Karena sifatnya hibah terencana, maka masuk DIPA. Sehingga apapun jumlah maupun perencanaan yang dilakukan/dibuat oleh mitra bersama ICCTF akan mempengaruhi DIPA Bappenas. Konsekuensi jika tahun berjalan penyerapannya rendah, maka tahun berikutnya akan mendapatkan *penalty* berupa pemotongan rupiah murni. Revisi AWP ditetapkan *deadline* pada tanggal 15 Juni 2021. *output* perlu dilampirkan dalam laporan *inception* untuk memudahkan pemantauan rencana dan *progress* pelaksanaan.

#### g. Inception Report GP 2

Pada tanggal 20 Mei telah dilaksanakan *Inception Report GP 2* yang dilaksanakan secara hybrid yaitu di Hotel Mandarin Oriental Jakarta dan melalui *platform Zoom Meeting*. Rapat ini dihadiri oleh Dir. KP Bappenas Sri Yanti, Setyawati, Staff ICCTF dan PPK, Staff Dir. KP Bappenas, dan Mitra Pelaksana. Rapat ini membahas perubahan EKKP-3-K yang sudah diubah menjadi EVIKA, estimasi dinamika populasi hiu dan *tagging* 10 ekor penyu, *Payment Ecosystem Services* (PES), dan infrastruktur. Selain itu terdapat kendala dimana project coordinator dari proyek meninggal dunia, sehingga sedang dilakukan proses seleksi untuk mengisi posisi tersebut.

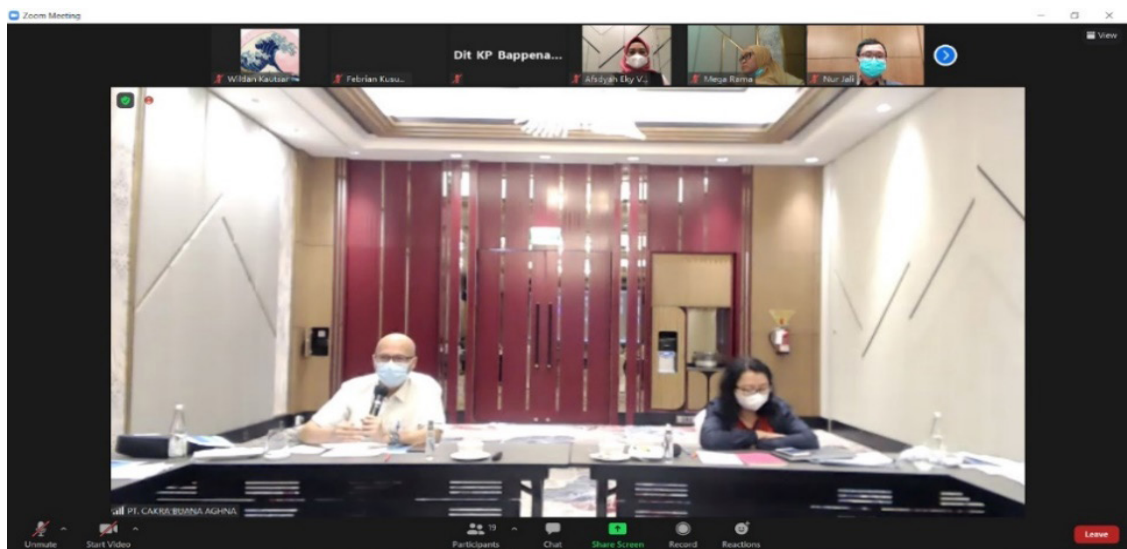


Gambar 1.B.5. *Inception Report GP 2*

#### ***h. Inception Report GP 3***

Pada tanggal 22 Mei telah dilaksanakan *Inception Report GP 3* yang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Hotel Mandarin dan melalui platform Zoom Meeting. Rapat ini dihadiri oleh Dir. KP Bappenas Sri Yanti, Setyawati, Staff ICCTF dan PPK, Staff Dir. KP Bappenas, dan Mitra Pelaksana. Rapat ini membahas 3 SOP Prioritas, yaitu SOP Pengawasan, SOP Penyadartahuan, dan SOP Izin dan Pemanfaatan. Selain itu, rapat ini juga membahas output-output dari hasil kunjungan lapangan oleh mitra pelaksana.

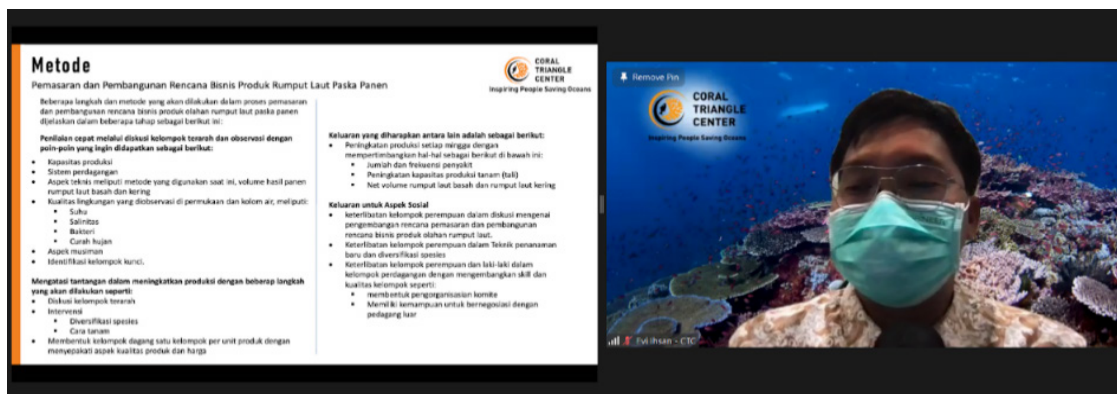
Outpu 2 yaitu mengenai penetapan Kawasan, proses penetapan Menteri berlangsung sekitar 2-3 bulan dimana akan dilakukan review zonasi dan pelaksanaan rencana pengelolaan. Output 4 mengenai *willingness to pay* dan *Payment Ecosystem Services* (PES) pada objek wisata unggulan khususnya di Kenawa dan Paserang, belum ada retribusi daerah pariwisata di Gili Balu dan tidak ada standarisasi harga. Outpu 5 yaitu infrastruktur, telah direkomendasikan oleh Bappeda LITBANG KSB 3 petak lahan seluas 8.995 m<sup>2</sup>, 1575 m<sup>2</sup>, dan 892 m<sup>2</sup>. Output 6 yaitu mooring buoys, diperlukan 8 mooring buoys untuk kapal di bawah 5 GT dan 2 mooring buoys untuk kapal di atas 5 GT. Hal tersebut dikarenakan padatnya aktivitas wisata di akhir pekan (36 kapal/akhir pekan). Output 7 mengenai *capacity building*, diperlukan kegiatan *capacity building* dikarenakan SDM pariwisata dan kelembagaan masih lemah, serta kurangnya sertifikasi kompetensi pariwisata. Output 8 mengenai EVIKA, belum ada EVIKA pada tahun 2021.



Gambar 1.B.6. *Inception Report GP 3* dengan cara *hybrid*

#### i. Inception Report GP 4

Pada tanggal 22 Mei 2021 telah dilaksanakan *Inception Report GP 4* yang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu offline di Hotel Mandarin Oriental Jakarta dan melalui platform Zoom Meeting. Rapat ini dihadiri oleh Dir. KP Bappenas Sri Yanti, Setyawati, Staff ICCTF dan PPK, Staff Dir. KP Bappenas, dan Mitra Pelaksana. Rapat ini membahas kegiatan utama yaitu *tourism management system*, target efektivitas pengelolaan, dan infrastruktur. Rencana pembangunan infrastruktur pos pengawasan memiliki kendala dikarenakan sudah ada rencana pembangunan pos pengawasan di lokasi yang sama oleh DKP Provinsi Bali dengan pendanaan DAK, oleh karena itu dibutuhkan pembahasan mengenai perubahan rencana ini. Infrastruktur *mangrove tracking* masih membutuhkan pembahasan untuk penentuan lokasi pembangunan.



Gambar 1.B.7. *Inception Report GP 4*

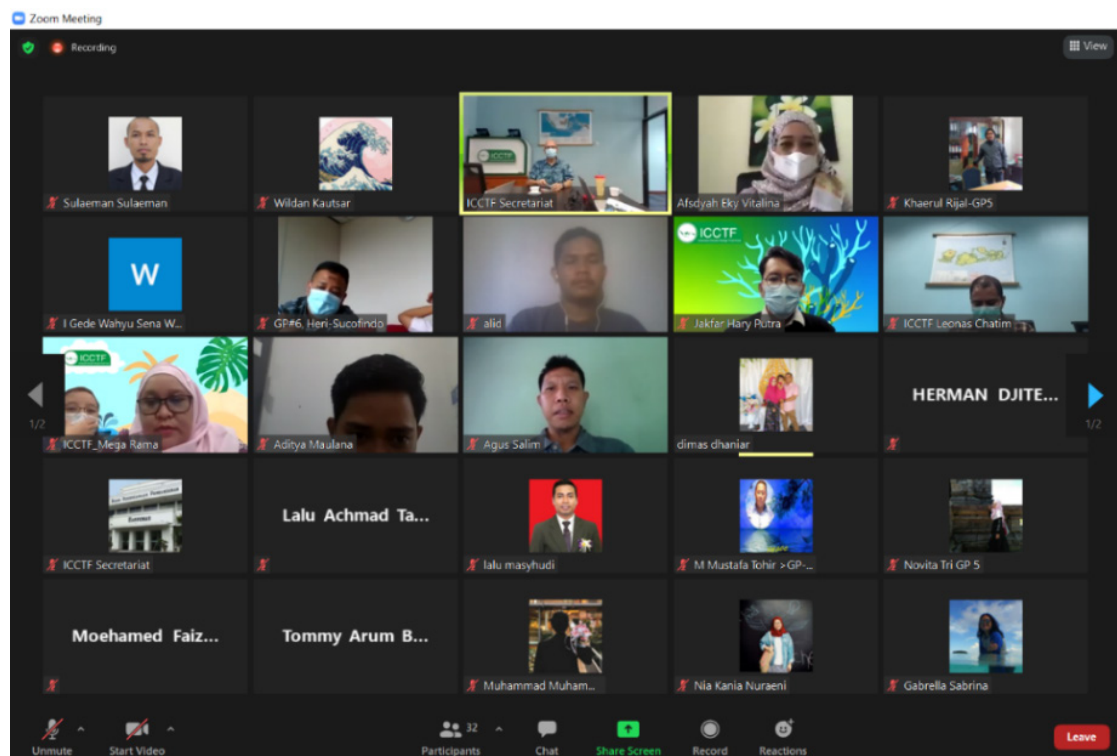
#### j. Inception Report GP 5

Pada tanggal 20 Mei telah dilaksanakan *Inception Report GP 5* yang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Hotel Mandarin dan melalui platform *Zoom Meeting*. Rapat ini dihadiri oleh Dir. KP Bappenas Sri Yanti, Setyawati, Staff ICCTF dan PPK, Staff Dir. KP Bappenas, dan Mitra Pelaksana. Dalam rapat ini dijelaskan bahwa masih adanya kelemahan masyarakat seperti membuang sampah ke laut. Adanya niatan masyarakat Gili Matra untuk mengarahkan diri ke wisata yang lebih eksklusif, maka yang perlu dilakukan yaitu survei lebih lanjut untuk menentukan masyarakat yang terlibat. Selain itu perlu restrukturasi POKMASWAS karena belum ada yang mewakili masyarakat nelayan ataupun pelaku wisata. Adanya pandemi menyebabkan banyak masyarakat beralih menjadi nelayan namun banyak para nelayan yang menggunakan alat penyelaman tidak sesuai standard keamanan, kebanyakan menggunakan alat selam kompresor.

Terkait coral garden program LIPI, apabila ada lokasi yang tumpang tindih dengan lokasi GP 5 ICCTF, maka perlu didiskusikan lebih lanjut dengan LIPI dan BKKPN terkait proses siapa yang akan mengerjakan. Terkait kegiatan livelihood, ada rencana pelatihan pengolahan hasil tangkapan, dimana hasil olahan tersebut akan dikemas dan dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat pendukung untuk pemasaran (sertifikat halal). Terkait menara pengawas hanya akan dibangun 1 (satu) berupa pos jaga, dengan desain yang menyesuaikan dengan lahan yang ada. Hal tersebut sebagai hasil usulan saat pertemuan dengan POKMASWAS. Bangunan akan menjadi pusat kegiatan pengawasan perairan oleh POKMASWAS, tempat koordinasi dan menyimpan peralatan patroli.

**m. Rapat Koordinasi Persiapan *Entry Meeting* Provinsi NTB**

Rapat persiapan *Entry Meeting* dilakukan tiga kali yaitu pada tanggal 27, 28, dan 31 Mei secara daring menggunakan platform *Zoom Meeting*. Rapat tanggal 27 Mei dihadiri peserta dari ICCTF dan Mitra Pelaksana yang membahas teknis pelaksanaan *Entry Meeting* di Lombok sebelum rapat teknis di lapangan. Rapat tanggal 28 dan 31 Mei dihadiri oleh staff ICCTF untuk membahas substansi yaitu PPT, *talking point*, dan kisi-kisi, lalu dilanjutkan dengan membahas *to-do-list*.



Gambar 1.B.8. Pembahasan persiapan *Entry Meeting*

Pada tanggal 2 Juni 2021 dilaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan akhir kegiatan *Entry Meeting* COREMAP-CTI ADB sebelum keberangkatan tim ICCTF ke Lombok, Provinsi NTB. Pada pertemuan ini tim ICCTF memastikan kembali kesiapan terkait substansi, logistik dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim ICCTF akan berangkat menuju Lombok pada tanggal 3 Juni 2021 dan kembali ke Jakarta pada tanggal 6 Juni 2021.

No	Logistik	Keterangan	PIC	Keterangan	Progress
1	Swab Antigen Keberangkatan Jakarta: 2 Juni 2021: 20 orang	Lippo/Bappenas	Jali		Done
2	Swab Antigen VIP - 4 Juni 2021: 15 orang	Pimpinan Bappenas dan Keluarga: dikamar masing-masing Sekda dan Kadis: Ruangan dekat Ruang Meeting (Kamar terdekat)	Uli, Kariz	E0, siapin ruangan terpisah	
3	Swab Antigen - 4 Juni 2021: 70 org (termasuk wartawan)	Katamaran	Jali, Mitra (2 orang)	E0, siapin ruangan Swab dan Ruang Tunggu	
4	Swab Antigen - 5 Juni 2021: 19 org	Sumbawa	Jali		
5	Swab Antigen - 5 Juni 2021: 4 org	Katamaran	Jali		
6	Check in online, verifikasi swab, ehac: 1. Pak Sesmen 2. Bu Sesmen 3. Pak Tonny 4. Iru	3 Juni 2021: Kloter 1 Tanya Mba Iru, preference Pak Sesmen dan Bu Sesmen untuk seat number. Pak Tonny, row paling depan, jendela	Uli		
7	Check in online, verifikasi swab, ehac: 1. Pak Deputy 2. Bu Deputy 3. Bu Yanti 4. Bu Wagey 5. Bu Wati 6. Galih 7. Erin	3 Juni 2021: Kloter 2 Tanya Pak Kardi, preference duduk Pak Deputy dan Bu Deputy. Bu Yanti Row Depan Jendela. Bu Wati sebelah Bu Yanti.	Alya		
8	Mobil 3 Juni Fullday	2 innova, 1 avanza	Jakfar, E0	Lombok	

Gambar 1.B.9. Pembahasan logistik dan PIC kegiatan

n. **Entry Meeting COREMAP-CTI ADB di Provinsi NTB dan Kunjungan Lapang ke Gili Balu dan Gili Matra**

Pada tanggal 4 Juni 2021, ICCTF melaksanakan kegiatan *Entry Meeting* COREMAP-CTI ADB di Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan rencana kegiatan COREMAP-CTI dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank yang akan dilakukan oleh ICCTF serta mitra pelaksana yang akan mengerjakan 4 (empat) proyek di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu-NTB kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.

Sekretaris Utama Bappenas dalam pidato sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan COREMAP-CTI ini diharapkan menjadi pemantik (*trigger*) dan stimulus untuk menggerakkan kegiatan ekonomi lainnya di lokasi kegiatan. Serta dapat mengantisipasi tekanan terhadap lingkungan yang semakin besar akibat meningkatnya kegiatan wisata melalui pengelolaan pesisir yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Gambar 1.B.10. Pidato pembukaan oleh Sekretaris Utama Bappenas

Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan COREMAP-CTI ADB di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian dari *pilot project* pengelolaan ekosistem pesisir yang meliputi aspek rehabilitasi ekosistem, perlindungan jenis ikan endemik, terancam, dan dilindungi, antara lain penyu, pengawasan ekosistem laut, pengembangan usaha ekonomi termasuk pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur ekowisata. Tentunya intervensi ini diharapkan akan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berkelanjutan atau yang dikenal dengan Ekonomi Biru di NTB.



Gambar 1.B.11. Pidato Arahan Pelaksanaan COREMAP-CTI ADB oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas

Selanjutnya Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dalam pidatonya menambahkan bahwa Bappenas berperan sebagai *enabler* untuk membangun wadah partisipatif lintas sektor serta menciptakan model inovasi pembangunan yang menselaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Salah satunya upaya yang dilakukan Bappenas melalui program COREMAP-CTI. Program ini mendukung pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan sebesar 10% dari luas perairan Indonesia atau seluas 32,5 juta Hektar pada tahun 2030. Implementasi atau Pelaksanaan Pekerjaan untuk COREMAP-CTI ADB akan dilakukan melalui paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Mitra Pelaksana terpilih di setiap lokasi proyek.

Dukungan COREMAP-CTI Asian Development Bank sebesar US\$ 5,2 juta telah dimulai pada 4 Maret 2020 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022 ini bertujuan untuk mencapai 80% Kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Penida, mencapai 80% Kategori Biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100% Kategori Hijau di Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu.

Sesi Diskusi Panel dimoderatori oleh Setyawati, Koordinator Perikanan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas dengan narasumber pertama yaitu Iskandar Zulkarnain (Kabid Perekonomian dan Sumber Daya, Bappeda NTB), narasumber kedua yaitu Amehr Hakim (Koordinator Kelompok Penataan Kawasan Konservasi, Direktorat



Gambar 1.B.12. Diskusi Panel yang dimoderatori oleh Koordinator Perikanan Bappenas (dari kiri: Bappeda NTB, KKP, GP 6, dan GP 5)

KHKL, KKP), narasumber ketiga yaitu Ahmad Tantular (Perwakilan PT. Duta Cipta Mandiri), dan narasumber keempat yaitu Edward Danakusumah (Perwakilan PT. SUCOFINDO). Narasumber pertama menjelaskan kegiatan peningkatan pengelolaan ada di dalam visi ke-5 Gubernur NTB yaitu Sejahtera dan mandiri melalui penurunan angka kemiskinan dan penigktana ekonomi inklusif melalui industrialisasi pertanian dan pariwisata. Pada visi tersebut, ada dua program mayor yang harus segera dituntaskan yaitu tentang industrialisasi dan tentang kemiskinan.

Narasumber kedua menjelaskan penilaian status EVIKA, mulai dari tata cara penilaian, hasil, dan rekomendasi. Narasumber ketiga dan keempat memaparkan detail proyek masing-masing. Pada sesi tanya jawab dapat disimpulkan bahwa harapan masyarakat dan pemerintah setempat agar program COREMAP-CTI dapat memberi dampak jangka panjang, serta program ini dapat meningkatkan pengawasan Kawasan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan.



Setelah kegiatan *Entry Meeting*, pada tanggal 5 Juni 2021, rombongan yang terbagi menjadi dua tim kemudian melanjutkan rangkaian kegiatan dengan Kunjungan Lapang ke Gili Matra, lokasi proyek GP 2 dan GP 5, serta Kunjungan Lapang ke Gili Balu, lokasi proyek GP 3 dan GP 6. Mitra terkait pada lokasi proyek ini adalah PT Duta Cipta Mandiri (ketua konsorsium GP 2 dan 5), PT. Cakra Buana Aghna (ketua konsorsium GP 3), dan PT SUCOFINDO (pelaksana GP 6).



Gambar 1.B.13. Diskusi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat di Gili Matra



Gambar 1.B.14. Diskusi dengan masyarakat di CDK Kelautan dan Perikanan Sumbawa-Sumbawa Barat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitoring progress dari implementasi kegiatan COREMAP-CTI ADB, diantaranya rencana pembangunan infrastruktur Pusat Informasi dan Menara Pantau. Kunjungan Lapang juga dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan proyek COREMAP-CTI ADB sekaligus memohon dukungan serta mendengarkan saran dan masukan demi kelancaran dan keberhasilan proyek ini.

o. **Pembahasan kegiatan COREMAP-CTI Nusa Penida**

Pada tanggal 8 Juni 2021, ICCTF melaksanakan pertemuan untuk membahas program Work From Bali (WFB) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini adalah salah satu upaya untuk membangkitkan pariwisata dan perekonomian Bali yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Sebagai tahap permulaan, pelaksana program ini meliputi K/L dan BUMN, salah satunya adalah Bappenas. Namun kedepannya diharapkan cara yang sama dapat diikuti oleh kalangan dunia usaha. ICCTF sebagai satuan kerja di bawah Bappenas direncanakan akan turut serta dalam rombongan Bappenas. Program ini dapat sekaligus dimanfaatkan untuk membahas lokasi proyek COREMAP-CTI ADB yang berlokasi di Nusa Penida, Bali.

p. **Undangan Pembahasan *Review Mission* COREMAP-CTI ADB dan Amandemen**

Pada tanggal 11 Juni 2021, dilakukan pertemuan dalam rangka pembahasan perubahan konsultan Project Coordinator pada GP 2. Pak Zul menyampaikan bahwa diharapkan perusahaan menyampaikan permohonan surat penggantian terhadap konsultan untuk Project Coordinator telah diterima dan perlu dilakukan pembahasan terhadap perubahan konsultan tersebut. Hasil klarifikasi akan dituangkan di dalam Berita Acara Klarifikasi.

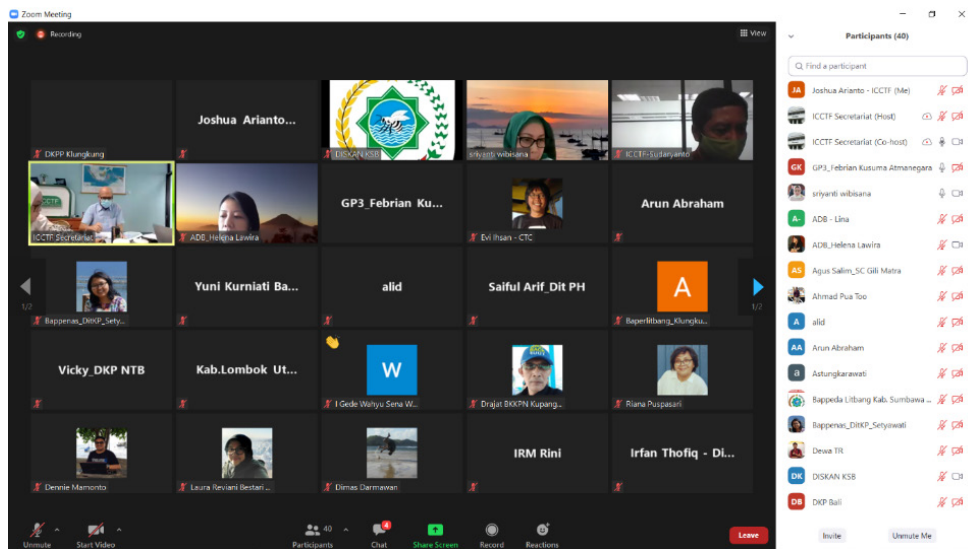
Ibu Eky dari PT DCM kemudian memberikan penjelasan bahwa pada tanggal 5 Mei sudah bersurat ke PPK memberitahukan bahwa konsultan untuk Project Coordinator meninggal dunia, sehingga meminta waktu untuk mencari penggantian konsultan tersebut. Ibu Denok dari PT DCM kemudian juga memberikan tambahan bahwa konsultan pengganti sudah siap untuk bekerja dan diharapkan karena lokasi calon konsultan juga berada di Lombok maka untuk keefektifan akan lebih cepat untuk proses penggantian. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon konsultan pengganti, calon konsultan pengganti telah memenuhi persyaratan baik general dan pengalaman kerja yang terdapat di dalam ToR. Ada pun untuk beberapa isu yang belum terjawab akan diberikan informasi secepatnya.

q. ***Mission* ADB**

Mission ADB dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 14-16 Juni 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meninjau kemajuan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

## Hari Pertama

Pada sesi pertama beberapa isu yang dibahas terkait dengan penyerapan anggaran oleh Mitra Pelaksana dan pergantian metode penilaian efektivitas pengelolaan KKP dari EKKP-3-K ke EVIKA. Ms. Mega (OM) ICCTF menyampaikan rencana *top-up* di tahun 2021 *subject to be review* karena diperkirakan mundur. Perubahan nilai *top up* dikarenakan ada penurunan penyerapan di awal tahun ini. Terkait EVIKA, Pak Imam dari BKKPN Kupang menjelaskan bahwa penilaian EKKP-3-K dilakukan secara mandiri sedangkan EVIKA ada tim tersendiri yang akan melakukan penilaian. Penyusunan EKKP-3-K dapat digunakan untuk *back up*, akan tetapi yang diakui pemerintah tetap EVIKA. Pada sesi ini Ibu Helena dari ADB juga mengingatkan untuk mengikuti peraturan ADB yaitu kegiatan tidak boleh jalan jika belum ada dokumen *safeguard*.

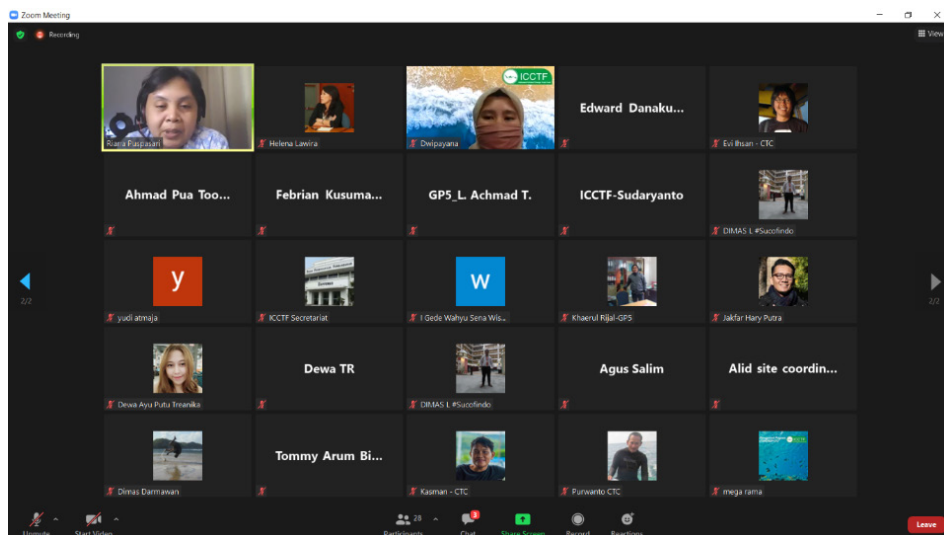


Gambar 1.B.15. Diskusi kegiatan Mission ADB pada hari pertama

Pada sesi kedua dilakukan pembahasan COREMAP-CTI ADB dengan Pemda Provinsi Bali dan NTB. Dari Provinsi Bali hadir Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda (Bpk Wayan Sudarsa), Kabid Kelautan DKP Bali (Ketut Astarti) dan DKPP Klungkung. Dari Pemda NTB dihadiri Kabid Perekonomian dan SDA (Bpk Iskandar Zulkarnain), Bappeda KLU dan Bappeda KSB, CDK Sumbawa dan Sumbawa Barat, BKKPN Kupang dan BKKPN Wilker Gili Matra, dan DKP KSB. Salah satu isu rencana pembangunan infrastruktur di Nusa Penida Bali adalah Menara Pantau yang ternyata sudah dianggarkan dari DAK. Adapun untuk isu infrastruktur di Gili Matra, NTB adalah status lahan lokasi Pusat Informasi di bangsal dan Menara Pantau di Gili Trawangan.

## Hari Kedua

Pada sesi pertama, isu utama yang didiskusikan adalah terkait safeguard untuk pembangunan infrastruktur. Ibu Helena menyampaikan terdapat cukup banyak permasalahan di proyek sebelumnya yaitu saat melakukan *handover* terjadinya penolakan menerima hibah infrastruktur. Oleh karena itu harus diperjelas yang menerima serta dokumen-dokumennya. Beliau juga menambahkan untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) perlu dipastikan, kapan konstruksi bisa dimulai. Walaupun bisa tahun ini, pembayarannya tahun depan. UKL-UPL pembayarannya bisa tahun ini atau tahun depan. Harapannya konstruksi bisa dimulai tahun ini, pembayarannya *reimburse* apakah memungkinkan tahun depan, atau ditagihkan tahun ini jangan menumpuk di Desember karena dikhawatirkan akan kewalahan.



Gambar 1.B.16. Diskusi kegiatan Mission ADB pada hari kedua

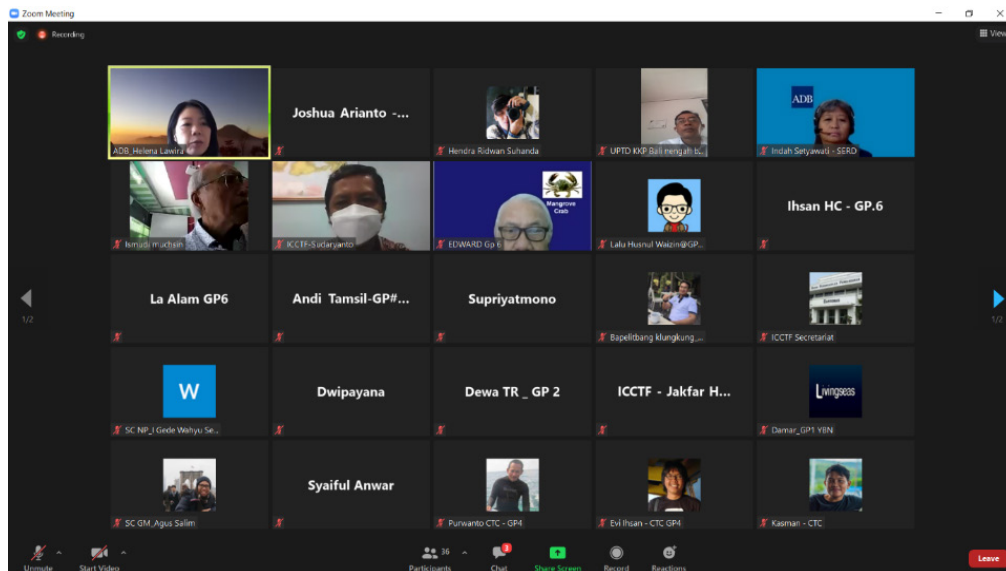
Pada sesi kedua dibahas isu terkait isu Gender. Ibu Riana dari ADB menjelaskan di ADB ada *Effective Gender Mainstreaming (EGM)*. *Gander Action Plan* terdiri dari kegiatan dan target berupa kuota jumlah perempuan yang dinilai berhasil bila activity mencapai target 80%. Capaian Target pada laporan 11 April masih (36%), hal tersebut yg harus diperhatikan ke depan. Kemudian catatan terkait PAM agar kegiatan *achieved* dan *completed* dimasukkan. Semua GAP dimasukkan ke tabee yang sekarang ada di PAM agar memudahkan menghitungnya.

Pada sesi ketiga, ibu Fitriana dari ADB menjelaskan requirement dari ADB acceptable accounting framework, di mana Indonesia SAP sudah *Accrual Basis*. Ibu Helena kemudian menambahkan pentingnya opini *audit acceptable* dari ADB. Perlu di-*adjust*

termin dari tiap mitra pelaksana, mana saja yang bisa diserap di tahun ini. Paket mana yang bisa sampai termin 3 dan bisa termin 2. PPMS merupakan system yang lazim digunakan di ADB untuk *quality control*. PPMS mendorong indikator-indikator project, semua yang harus dimonitor secara regular ada sistemnya.

## Hari Ketiga

Pada sesi pertama, Ibu Indah dari ADB membahas tentang IP (*Indigenous People*). Ada sedikit kerancuan mengenai definisi IP. Ada masyarakat etnis lain seperti Suku Bajo, Bugis, Jawa, Madura, dan Selayar yang tinggal di pesisir, mereka termasuk IP dalam IP *Policy* yang harus diperhatikan juga. Jika memang tidak ada masyarakat “asli” Sumbawa yang terkena dampak kegiatan proyek, bisa dilaporkan dengan jelas kepada ADB.



Gambar 1.B.17. Diskusi kegiatan Mission ADB pada hari ketiga

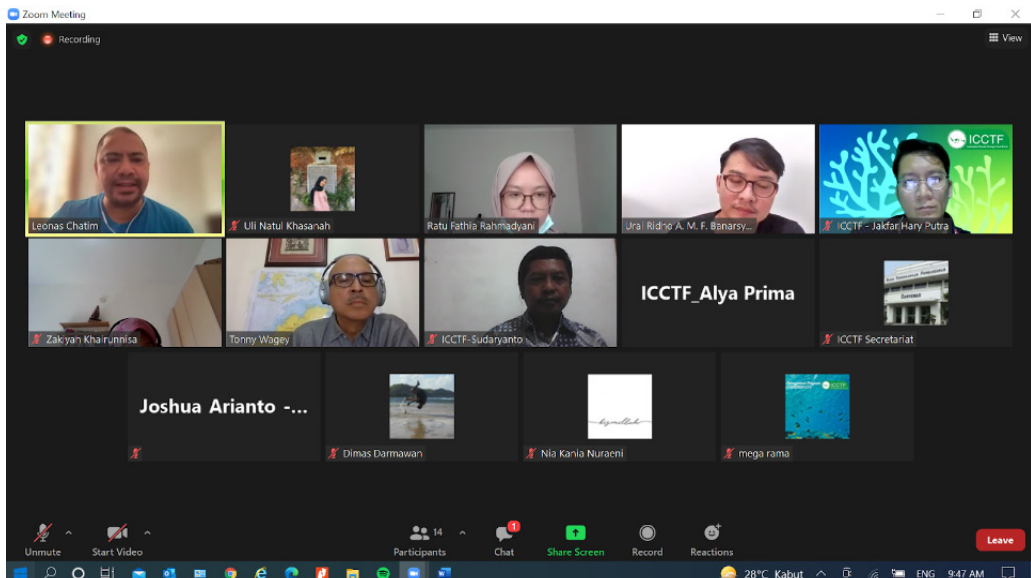
Pada sesi kedua, Ibu Dennie dari ADB menerangkan agar pertemuan lebih menyepakati target persyaratan, kapan bisa dipenuhi, dan kendala yang ada untuk dicari jalan keluarnya. Terkait institusional pelaksana IEE belum muncul termasuk struktur GRM, siapa yang bertanggung jawab penanganan *complain* (keluhan). Dokumen IEE adalah *living document* yang bisa di-update dan revisi sesuai perubahan proyek. IEE bisa dibuat per lokasi. Masing-masing IEE dijelaskan sub-sub kegiatannya terkait infrastruktur, baseline dan pengelolaan mitigasinya. Terkait regulasi Indonesia harus ada rekomendasi dokumen persyaratan pembangunan infrastruktur yang ditentukan oleh DLHK setempat (tingkat provinsi/kabupaten).

Pada sesi ketiga ini merupakan sesi procurement, Ibu Helena mengingatkan kembali progres *Money Officer* dan *Creative Officer*. Beliau juga mengingatkan untuk melihat tipe pekerjaan, mana yang bisa dikerjakan community mana yang tidak. Ibu Olga dari ADB menambahkan Community participation kontraknya diberikan ke komunitas, jika tidak memungkinkan bisa dalam bentuk *community involvement*. Sejelasa mungkin kontrak ada provisinya. Ketika ada perubahan *scoop assignment*, perlu amandemen kontrak.

r. **Pembahasan Master Degree Program**

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021. Poin utama yang dibahas adalah mendiskusikan progres semester 1 kemudian rencana studi untuk semester kedua dan rencana penelitian untuk semester berikutnya. Kesimpulan dari hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut:

1. Semester 2 dimulai 26 Juli 2021, sedangkan pengumuman ujian akhir Juni dimohon mahasiswa menginfokan hasil nilainya lalu diskusi mengenai study plan pada semester berikutnya ke UQ.
2. Perlu adanya tindak lanjut mengenai *travel exemption letter*.
3. Untuk tindak lanjut pertemuan ini dijadwalkan pertemuan dengan IPB untuk pembahasan dan gambaran penelitian Fathia, Urai dan Zakiyah bisa disampaikan ke IPB. Jika dari IPB ada *expert* yang sesuai dengan minat riset mahasiswa, mungkin bisa membantu untuk membimbing riset mahasiswa diluar *University of Queensland*.



Gambar 1.B.18. Diskusi *master degree program* COREMAP-CTI ADB

s. ***Pre-proposal Conference - GP7 Assessment on Biophysic of MPA, Supply Chain and Market Analysis of Tuna, Snapper, and Seaweed***

*Pre-proposal Conference* dilakukan secara virtual pada hari Rabu, 23 Juni 2021. Pada konferensi ini diinformasikan bahwa Permintaan Proposal (RFP) dikirim ke 3 (tiga) perusahaan konsultan terpilih pada 11 Juni 2021 melalui email ICCTF. Kemudian ada revisi alamat email dari *Resident Mission* ADB tempat proposal harus diajukan. Alamat email sebelumnya yaitu [irmtelservices.contractor@ADB.org](mailto:irmtelservices.contractor@ADB.org) berubah menjadi [irm\\_telservices.contractor@ADB.org](mailto:irm_telservices.contractor@ADB.org). Kemudian batas waktu penyerahan proposal juga diubah dari pukul 23:59 WIB menjadi pukul 16:00 WIB untuk mengakomodasi jam kantor. Risalah *Pre-proposal Conference* ini akan dikirim ke ADB untuk permintaan *No-Objection-Letter*.

t. **Undangan *Disbursement Workshop* Proyek-Proyek ADB**

Pada tanggal 23 dan 24 Juni 2021 dilakukan *disbursement workshop* secara online melalui zoom oleh ADB. Selain pelatihan, kepada para peserta kegiatan, disampaikan beberapa link yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam kebutuhan *disbursement*, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan *loan disbursement handbook 2017*

<https://www.ADB.org/sites/default/files/ADB-loan-disbursement-handbook-2017.pdf>

- b. Kebutuhan *turnover ratio* di website LFIS/GIS

<https://lfis.ADB.org/lfis/reports/reports.asp>

u. **Rapat Pembahasan MOU ADB**

Pada tanggal 25 Juni 2021 dilakukan pembahasan MOU grant 0379-INO dengan ADB terkait COREMAP-CTI ADB. Pada pertemuan ini dilakukan perbaikan dan masukan terhadap MoU terutama pada Bab III yaitu pada bagian *Pogress, Findings* dan *Recommendation*. Hasil dari pembahasan ini kemudian disampaikan kembali kepada pihak ADB.

v. ***Wrap Up Meeting* COREMAP-CTI ADB**

Pada tanggal 28 Juni 2021 dilaksanakan *wrap up review mission* COREMAP-CTI ADB. Ibu Helena menyampaikan perlunya memperhatikan *cash flow reksus*. Perlu dihitung untuk Q3 butuh dana berapa. Harus diprediksi apakah perlu ditambah. Hal ini dikarenakan dana yang tersisa di dalam rekening Reksus ada batasannya, jika sisa dana 20% maka tidak bisa diambil lagi. Kemudian diperkirakan kapan saja mau dilakukan penarikan agar reksusnya tidak di bawah 20%. Pak Saiful dari DPH menyampaikan bahwa proses perpanjangan sedang diusulkan ke ADB untuk memastikan. Target terakhir direncanakan pada tanggal 31 Juli 2021.

Ibu Indah, kemudian menyampaikan terkait Indigenous people dimasukkan ke *social safeguard* dan selanjutnya dimohon segera disampaikan draft IR dan IP *impact*. Ibu Dennie juga menyampaikan terkait UKL-UPL dan SPPL, jika sudah ada update informasi agar bisa dikomunikasikan. SEbagai dasar penyusunan IEE, sudah beliau kirimkan contohnya dan beliau siap untuk diajak diskusi. Dokumen yang sudah coba diisi oleh PIU ADB adalah untuk satu lokasi TPK Gili Balu untuk social safeguard dan KKPD Nusa Penida untuk *Environmental Safeguard*.



Gambar 1.B.19. Pembukaan *wrap up review mission* oleh Direktur KP, Bappenas

#### a. Introduction Social Safeguard COREMAP-CTI ADB

Pada tanggal 28 Juni 2021 dilakukan *Induction IP and IR (Soial Safeguard)* COREMAP-CTI ADB oleh Ardhian Alhadath. Leonas dari ICCTF menyampaikan bahwa TOR telah dibuat sebelumnya sebagai bahan FGD di lapangan, dan ingin meminta Pak Ian untuk dapat menjelaskan beberapa poin.

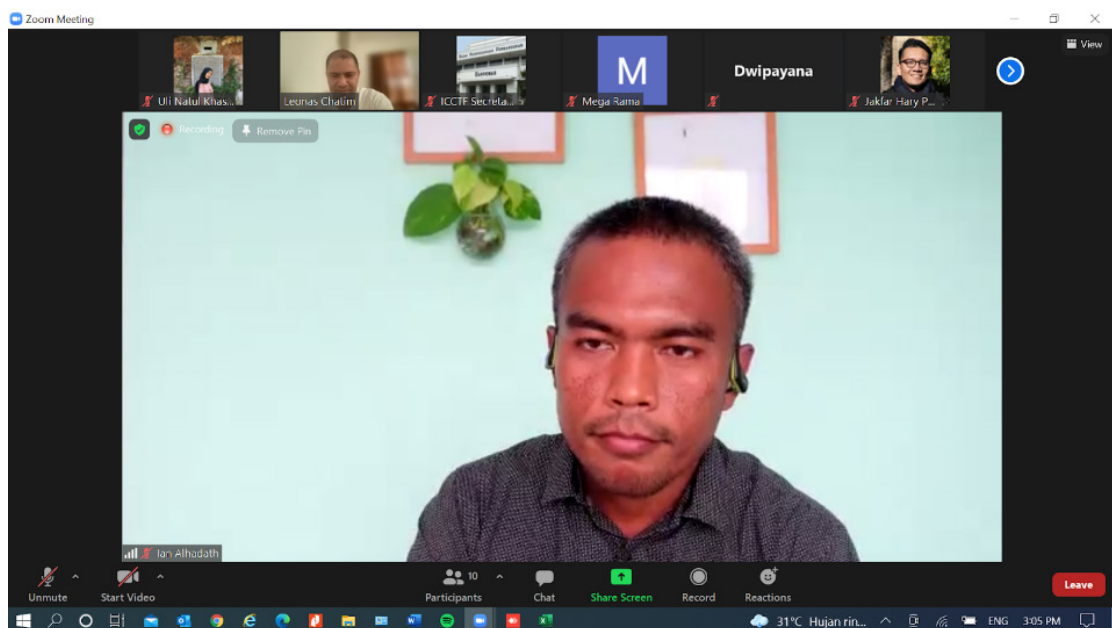
Pak Ian menerangkan bahwa tipikal proses yang dilakukan untuk kajian *social safeguard* adalah sebagai berikut:

0. *Desk study* = 5 hari dan koordinasi dengan yang di lapangan serta pengisian gap data yang mungkin muncul. Jadi jika ada gap data, maka diperlukan verifikasi langsung untuk keakuratan data;



- a. Kunjungan lapangan = jika ke lapangan dibutuhkan mungkin 1 hari 1 lokasi, atau jika yang lain di lapangan yang mengumpulkan data, maka akan ada pedoman yang disiapkan untuk yang membantu mengambil data lapangan;
- b. Menyusun social safeguard, dihitung kira-kira 15 hari kerja untuk 3 laporan berbahasa Inggris yang memenuhi standar ADB.

Jakfar dari ICCTF menyampaikan saran ada baiknya mitra diundang memaparkan sedikit mengenai project masing-masing untuk dapat memberikan gambaran kegiatan. Kemudian Feby dari ICCTF juga menambahkan saran agar *Progress Report* dari masing-masing project juga dapat diberikan ke Pak Ian untuk bahan *desk study*.



Gambar 1.B.20. Pemaparan oleh Bapak Ardhian Alhadath

### 1 PAKET KEGIATAN

**PT Trans Intra Asia (PT TIA)** berkonsorsium dengan **Yayasan Bahtera Nusantara**

Kegiatan pada triwulan kedua (April -Juni 2021) difokuskan pada sosialisasi *project GRANT-0379* INO: *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative Project - GP-1 SUPPORT FOR MPA MANAGEMENT AND ETP NPOA IMPLEMENTATION IN NUSA PENIDA* (46421-001) kepada stakeholder utama. Berdasarkan kajian pemetaan stakeholder, pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan stakeholder utama dalam pelaksanaan proyek ini. Selain itu Pemerintah Kabupaten Klungkung dan organisasi *dive operator* juga merupakan *stakeholder* penting. Sehubungan dengan perlunya sosialisasi kegiatan proyek kepada *stakeholder* serta meminta masukan stakeholder terhadap pelaksanaan proyek agar dapat terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah provinsi dan kabupaten maka dalam periode triwulan kedua dilakukan pertemuan sosialisasi program tingkat Provinsi Bali.

### 2 PAKET KEGIATAN

**PT Duta Cipta Mandiri** berkonsorsium dengan **PT Cakra Buana Aghna** dan **Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili Eco Trust**

#### a. Lapang

Pada tanggal 5 Juni 2021, tim bersama management dan ICCTF melakukan kunjungan ke balai desa Gili Indah, serta melakukan kordinasi dengan kepala desa Gili Indah terkait project yang akan di lakukan. Setelah itu, tim bersama management dan ICCTF melakukan kunjungan ke Gili Meno, serta melakukan kordinasi dengan kelompok masyarakat Gili Meno. Terakhir, tim bersama management dan ICCTF melakukan kunjungan ke Gili Trawangan, serta melakukan koordinasi dengan perwakilan POKMASWAS, Pokdarwis serta Eco Gili Indah.

## **b. Koordinasi dan Sinkronisasi**

Pada tanggal 11 Juni 2021 telah dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program GP2-GP5 dengan BKKPN Kupang Wilker Gili Matra. Pada tanggal 14 Juni 2021, bersama PC, FAO dan Site Coordinator ICCTF untuk Gili Matra melakukan koordinasi dengan UPP Kelas II Pemenang di Bangsal terkait lahan yang dijanjikan UPP Kleas II Pemenang untuk pembangunan Pusat Informasi Publik. Setelah itu dilaksanakan diskusi Sinkronisasi VMS, Pondok Informasi dan Kegiatan berkelanjutan dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU. Pada tanggal 15 Juni 2021 telah dilaksanakan pertemuan Sinkronisasi dan Pemantapan Program dengan Kepala BKKPN Kupang. Pada tanggal 17 Juni 2021 telah dilaksanakan Konsultasi Dokumen Persetujuan Lingkungan dengan Kabid Pengendalian Lingkungan DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 29 Juni 2021 telah dilaksanakan diskusi guna meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program bulan Juli dengan Wilker Gili Matra, BKKPN Kupang.

### 3 PAKET KEGIATAN

PT Cakra  
Buana Aghna

Implementasi pada periode Triwulan II tahun 2021 berada pada tahap Perencanaan Proyek. Beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan II yaitu:

#### a. Pengenalan Lapangan (Survei dan Koordinasi Awal)

Survey Pendahuluan dan Koordinasi dilakukan dalam rangka eksplorasi fakta dan kebutuhan lapangan yang harus disesuaikan dengan segala aktivitas dan tujuan proyek GP3. Survey dan koordinasi pendahuluan dilakukan pada tanggal 3-6 April 2021 di Poto Tano dan Taliwang, Sumbawa Barat. Koordinasi dilakukan dalam rangka diskusi, konsultasi dan memohon dukungan terhadap berbagai rencana dan kegiatan yang akan dilakukan oleh COREMAP-CTI GP3.



Gambar 1.B.3.1. Kegiatan Pengenalan Lapangan dan Koordinasi

### **b. Koordinasi Perizinan Ruang laut dan dokumen Lingkungan pada Instalasi *Mooring Buoy***

Koordinasi Perizinan Ruang laut dan dokumen Lingkungan pada Instalasi *Mooring Buoy* Gili Balu dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 bersama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (DKP NTB) dan Pertemuan tersebut menghasilkan arahan untuk melakukan koordinasi lanjutan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Prov. NTB terkait dokumen lingkungan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan Instalasi *Mooring Buoy* di Gili Balu. Selain itu, Melalui Kepala Bidang Perizinan, DKP NTB mengarahkan Tim konsultan untuk membuat rekomendasi Kesesuaian Ruang Laut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai syarat awal untuk membuat dokumen lingkungan Instalasi *Mooring Buoy*.



Gambar 1.B.3.2. Koordinasi perizinan Ruang Laut Instalasi *Mooring* Bersama Kabid Perizinan Laut, DKP NTB

### **c. Pembahasan *Inception Report***

Pembahasan *Inception Report* dilakukan pada tanggal 22 April 2021 dan dilaksanakan untuk menelaah kesiapan dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim konsultan pelaksana kegiatan COREMAP-CTI *Grant Package* 3. Kegiatan Pembahasan *Inception Report* dilakukan pada tanggal 22 April 2021 secara Online dan Offline di Jakarta. Pembahasan *Inception Report* menghasilkan rekomendasi dan masukan dalam mengimplementasikan berbagai output dan kegiatan GP3 yang akan dilaksanakan oleh tim Konsultan



Gambar 1.B.3.4. Pembahasan *Inception Report*

#### d. Kunjungan Lapangan *Entry Meeting* di Gili Balu

Kunjungan lapangan *Entry Meeting* merupakan salah satu rangkaian kegiatan *Entry meeting* yang dilaksanakan dari tanggal 4-5 Juni 2021. Kegiatan kunjungan lapang dilakukan untuk mengenali kondisi lokasi dimana proyek akan dilakukan baik kondisi fisik maupun sosialnya (**Gambar 4**). Selain Kunjungan Lapangan, dilakukan pula diskusi bersama Tim ICCTF, Tim Konsultasn GP-3 dan GP-5, dan perwakilan stakeholder seperti Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Poto Tano, Pengawas Laut Dinas Kelautan dan Perikanan KSB, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga KSB, CDK Sumbawa-Sumbawa Barat, guna mengenalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh COREMAP-CTI di Poto Tano. Kegiatan diskusi juga menjadi wadah bagi stakeholder untuk memberikan saran dan pendapat untuk keberhasilan kegiatan COREMAP-CTI di Gili Balu. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam implementasi kegiatan proyek GP3 dikarenakan pernyataanpartisipasi dan kesiapan dukungan oleh stakeholder pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh COREMAP-CTI.



Gambar 1.B.3.5. Kunjungan Lapang *Entry Meeting*

e. **Koordinasi Kesiapan Penyiapan Lahan infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata Gili Balu**

Koordinasi Kesiapan Penyiapan Lahan Infrastruktur Pusat Informasi Pariwisata (*Ecotourism Information Center/EIC*) Gili Balu dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Sumbawa Barat (BAPPEDA LITBANG KSB) dan pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan kesiapan Kepala BAPPEDA LITBANG KSB untuk mendukung kegiatan infrastruktur melalui surat pernyataan kesiapan dukungan dalam penyiapan lahan infrastruktur yang mana dukungan tersebut dapat memudahkan tim konsultan dalam membuat permohonan pinjam pakai lahan kepada Bupati. Selain itu, Hasil kordinasi juga mengarahkan tim konsultan agar membuat surat permohonan pinjam pakai lahan infrastruktur yang dibutuhkan kepada Bupati Sumbawa Barat. Tanpa surat persetujuan Bupati Sumbawa Barat untuk pinjam pakai lahan maka pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan. Keberadaan persetujuan Pinjam pakai tersebut menjadi kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh konsultan di dalam memulai seluruh tahapan pembangunan yang diantaranya pengurusan perizinan lingkungan (SPPL/UKL-UPL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembangunan infrastruktur.

f. **Koordinasi Kesiapan Menerima infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata**

Koordinasi Kesiapan Kesiapan Menerima Infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata (*Ecotourism Information Center/EIC*) Gili Balu dilakukan bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Sumbawa Barat (DISPARPORA KSB). Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan dukungan terhadap kegiatan COREMAP GP-3 khususnya dalam upaya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat pernyataan kesiapan menerima infrastruktur Pusat Informasi Ekowisata (*Ecotourism Information Center/EIC*).

g. **Koordinasi Perizinan dan Kesiapan Menerima Bangunan Rehab Pusat Informasi Kawasan Konservasi Gili Balu**

Koordinasi Perizinan dan Kesiapan Menerima Bangunan Rehab Pusat Informasi Kawasan Konservasi Gili Balu dilakukan bersama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Cabang Dinas Kelautan (CDK) Regional Sumbawa-Sumbawa Barat. Pertemuan tersebut menghasilkan dukungan melalui surat pernyataan/perizinan kepada untuk melakukan rehab kantor CDK Regional Sumbawa-Sumbawa Barat sehingga dapat digunakan sebagai pusat informasi Kawasan Konservasi Gili Balu serta surat pernyataan dukungan kesiapan menerima dan mengelola infrastruktur tersebut.

**h. Koordinasi Kesiadaan Menerima 8 *Mooring Buoy* Gili balu**

Koordinasi kesiapan kesediaan menerima 8 *Mooring Buoy* Gili balu dilakukan bersama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta Cabang Dinas Kelautan (CDK) Regional Sumbawa-Sumbawa Barat dan pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan dukungan terhadap kegiatan COREMAP GP3 khususnya dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan melalui surat pernyataan kesiapan menerima 8 *Mooring Buoy* yang berada di Kawasan Konservasi Perairan TPK Gili Balu.

**i. Koordinasi Arahan Dokumen Lingkungan Instalasi *Mouring Buoy* di Gili Balu**

Koordinasi dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan arahan resmi dokumen lingkungan yang harus disiapkan oleh Tim Konsultan dalam membangun 8 *Mooring Buoy*s di Gili Balu. Berdasarkan surat No. 660/2396/PPLH-DISLHK/2021 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memutuskan bahwa pembangunan 8 *Mouring Bouy* di Gili Balu harus membuat dokumen UKL-UPL sebelum melaksanakan pembangunan. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan ruang Laut No 849/DKPRL.2/V/2021 sebelum membuat UKL-UPL, tim konsultan diwajibkan untuk membuat surat konfirmasi ruang laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.



## 4 PAKET KEGIATAN

Coral Triangle Center

Pada periode triwulan kedua tahun 2021, CTC selaku pelaksana proyek COREMAP-CTI Nusa Penida Paket 4 telah melakukan beberapa pertemuan bersama para pemangku kepentingan, baik di tingkat Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, hingga tingkat paling bawah yaitu pertemuan dengan perwakilan desa, majelis adat, kelompok-kelompok masyarakat dan para mitra terkait. Pertemuan bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan (sinkronisasi) program pemerintah di berbagai tingkat dengan rencana kegiatan proyek yang akan dilaksanakan di Nusa Penida. CTC telah menghimpun banyak saran dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait.



Gambar 1.B.4.1. Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan, 3 Mei 2021



Gambar 1.B.4.2. Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan, 30 Juni 2021

## 5 PAKET KEGIATAN

**PT Duta Cipta Mandiri** berkonsorsium dengan **PT Cakra Buana Aghna, PT Ciriajasa Engineering,** dan **Yayasan Ekosistem Gili Indah/Gili Eco Trust**

Pada bulan April tim ditargetkan termobilisasi secara keseluruhan pada lokasi proyek. Target tersebut terlaksana dengan baik. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April juga diperkaya dengan kegiatan diskusi dan pendalaman materi untuk persiapan awal dalam pelaksanaan proyek. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim dalam membaca maksud dan tujuan dari kegiatan COREMAP-CTI ADB ICCTF. Hasil akhir dari berbagai kegiatan diskusi tersebut adalah peningkatan pengetahuan tim dalam membaca *outcome* maupun *output* yang menjadi target dalam proyek ini.

Pada bulan Mei target kegiatan yang direncanakan adalah terlaksananya stakeholder meeting dan beberapa survei dan FGD dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang. Target kegiatan tersebut dapat terpenuhi walaupun dengan metode yang sedikit berbeda. Stakeholder meeting dapat terlaksana dengan metode pendekatan personal walaupun tidak semua stakeholder terkait dapat dijangkau secara langsung. Selain itu FGD dan survei baseline data untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang juga telah dilaksanakan walaupun dalam porsi yang sangat minim, namun dapat menjadi gambaran awal bagi tim untuk dapat menyusul Laporan Pendahuluan (*Inception Report*).

Target awal untuk Bulan Juni adalah terlaksananya berbagai kegiatan FGD dan survei awal untuk baseline data beberapa output kegiatan seperti, (1) laporan teknis hasil survei lokasi rehabilitasi, (2) pertemuan dan diskusi bulanan untuk peningkatan komunikasi antar stakeholder, serta (3) tersusunnya materi kampanye untuk peningkatan kesadaran masyarakat. Dari ketiga rencana aksi tersebut kegiatan yang dapat terealisasi adalah kegiatan koordinasi bulanan yang tetap dilakukan antara tim dengan pihak pengelola Kawasan (BKKPN Kupang) dan stakeholder terkait dalam upaya menyelaraskan kegiatan pemerintah daerah dengan program COREMAP-CTI ADB ICCTF. Beberapa target belum terlaksana sesuai rencana karena adanya

Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) di Indonesia.

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa komponen masyarakat terutama masyarakat terdampak dan pengelola Kawasan yang menyambut dengan sangat antusias kegiatan ini. Namun di sisi lain terdapat pula pihak yang tidak begitu antusias dalam menyambut kegiatan ini. Pihak tersebut adalah pemerintah daerah setempat. Hal tersebut dapat terlihat dari ketidakhadiran beberapa stakeholder kunci bagi Kawasan TWP Gili Matra dalam kegiatan *entry meeting*. Sehingga informasi tentang kegiatan tidak tersampaikan dengan baik kepada pemerintah daerah setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan COREMAP-CTI ADB ICCTF belum dikenal sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat. Dan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan Pemerintah daerah setempat maka perlu diadakan kegiatan *Stakeholder meeting* khusus untuk kegiatan COREMAP-CTI GP 2 dan GP 5. Stakeholder meeting tersebut hendaknya diharapkan dapat diselenggarakan oleh *stakeholder kunci* untuk pengelolaan Kawasan TWP Gili Matra. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah Bappeda Provinsi atau Bappeda Kabupaten Lombok Utara atau Bupati Kabupaten Lombok Utara.

## 6 PAKET KEGIATAN

### SUCOFINDO

#### a. *Entry Meeting* dan Kunjungan Lapang

Pada tanggal 5 Juni dilakukan kunjungan lapang dilaksanakan bersama dengan ICCTF Bappenas untuk mengidentifikasi lokasi secara langsung.



Gambar 1.B.6.1. Kunjungan Lapang Bersama

## b. Rehabilitasi dan Restorasi Mangrove

Pada tanggal 9-12 Juni 2021 telah dilakukan Pembahasan rencana pelatihan rehabilitasi mangrove dengan kelompok POKMASWAS, Pembuatan TOR Pelatihan Rehabilitasi Mangrove, dan Penyusunan jadwal dan materi kegiatan pelatihan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Gili Balu, Kab. Sumbawa Barat Prov. Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini merupakan Kerjasama LSM-LOH dan GP-6 dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/restorasi mangrove dengan melibatkan masyarakat.

Dalam perkembangan kegiatan, tenaga ahli Marine Biology Specialist (MBS) dan Mangrove Restoration Expert (MRE) bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya untuk mengembangkan teknik yang sesuai untuk melakukan rehabilitasi/restorasi mangrove, memimpin proses *focus group discussion (FGD)* dan koordinasi pertemuan mengenai identifikasi area untuk dipulihkan serta metode yang tepat untuk merehabilitasi mangrove, bertanggung jawab untuk mengelola operasi restorasi, memantau upaya, dan pemeliharaan fasilitas, melakukan survei mangrove pada awal proyek (**baseline**) dan proyek penyelesaian, kembangkan laporan teknis, praktik terbaik, dan pembelajaran untuk skala lebih lanjut dan ekspansi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil survey dan pengamatan yang dilakukan, luas areal lahan yang memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi di Namo adalah

2,85 ha dan pulau Kalong 1,83 ha atau dengan total lahan yang mendesak untuk di rehabilitasi adalah 4,68 ha. Jika mengacu pada arahan TOR maka lahan yang akan direhabilitasi adalah  $\pm 20\%$  dari luas lahan yang mengalami degradasi yakni 1 ha. Setelah dilakukan pertemuan dengan manajemen PT. Sucofindo (Persero) dengan tenaga ahli maka ditetapkan luas lahan yang direhabilitasi adalah 2 ha.

Hasil identifikasi yang dilakukan ditemukan 3-5 jenis mangrove masing-masing pulau, tetap yang paling dominan diantara jenis mangrove tersebut di Pulau Namo dan Pulau Kalong adalah *Rhizophora* sp dengan substrat pertumbuhan mangrove adalah berpasir dan sebagian pasir campur bebatuan. Teknik penanaman mangrove yang baik dilakukan adalah dengan menggunakan ajir. Guna dari ajir adalah untuk menjaga bibit mangrove agar tidak tumbang ketika terkena hempasan ombak. Jarak tanam ideal adalah 1m x 1m. Penanaman mangrove diatur sedemikian rupa agar jenis mangrove yang akan di tanam tidak bercampur dengan jenis lain hal ini untuk menghindari dari berubahnya sifat alami dari mangrove agar membentuk tegakan murni.

Sebelum melakukan tahapan penanaman mangrove, maka lokasi penanaman mangrove telah ditetapkan oleh tenaga ahli dari PT. Sucofindo (Persero) yang bertugas memberikan asistensi kepada pelaksana kegiatan yang selanjutnya ditindaklanjuti untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada kelompok masyarakat mitra pekerjaan rehabilitasi mangrove. Lembaga pelaksana kegiatan

yakni LSM-Lembaga Olah Hidup (LOH), yang sudah memiliki pengalaman yang panjang dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dan sudah mendapat rekomendasi dari ICCTF.

Untuk monitoring, pemeliharaan dan pengawasan rehabilitasi mangrove melibatkan kelompok masyarakat mitra yang mewakili seluruh desa dan seluruh anggotanya juga merupakan anggota Pokmaswas yang akan memberikan pengawasan setelah kegiatan ini selesai.

Proses monitoring, pemeliharaan dan pengawasan rehabilitasi mangrove akan dilakukan secara priodik oleh masing-masing kelompok yang pembagian kerjanya sudah ditetapkan. Setiap minggu pasca penanaman mangrove dilakukan akan dimonitor kelompok untuk melihat kemungkinan ada bibit yang tercabut atau mati karena makan oleh hama dan jenis binatang pengganggu yang lainnya.

Jumlah bibit mangrove yang disiapkan adalah sekitar 3000 pohon untuk menyulam bibit yang mengalami kematian. Untuk efisiensi dan efektifitas dalam monitoring, pemeliharaan dan pengawasan rehabilitasi mangrove maka dilakukan pembagian lokasi rehabilitasi mangrove dengan kelompok yang memonitor.

### c. Analisa Biaya Manfaat

Pada tanggal 18 Juni 2021 telah dilaksanakan Pengumpulan tambahan data terhadap perhitungan kondisi mangrove dan habitat yang berada di Gili Balu untuk analisis mendalam.

Proses Analisa terhadap manfaat biaya terhadap manfaat biaya rehabilitasi ekosistem mangrove dan menilai jasa ekosistem mangrove Kepulauan Gili Balu di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki ekosistem mangrove di enam pulau. Kondisi hutan mangrove sangat baik. Total luas hutan mangrove adalah 568,2 ha. Kepadatan mangrove 79% rapat, 13% sedang dan 7% jarang. Nilai ekonomi ekosistem mangrove adalah:

1) Nilai Pengguna langsung (*Direct Use Value-DUV*) dari perikanan Rp 33.709.914.000. -

2) DUV dari kayu mangrove Rp 282.628.800, -

3) Nilai guna tidak langsung: Rp 6.171.175.000, -

4) Nilai Opsi:(*Option Value-OV*) Keanekaragaman Hayati: Rp 119.324.000, -

5) Nilai keberadaan (*Existance Value-XV*): Rp 70.260.300 – Rp 255.418.350, -tambahan nilai ekosistem mangrove sebesar Total nilai ekonomi ekosistem mangrove sebesar Rp 40 353 301 800 ---- Rp 40 538 459 900 per tahun.

### d. Infrastruktur

Pada tanggal 15 Juni 2021 telah dilaksanakan Pembahasan Dimensi Kapal Pengawas bersama kelompok POKMASWAS dan Pembahasan

penerima kapal pengawas dengan POKMASWAS. Pembahasan kegiatan ini dihadiri 4 dari 5 POKMASWAS yang ada di Gili Balu, dari pengadaan ini harapan peserta bisa diperoleh 3-unit kapal patroli dari anggaran yang diusulkan dengan kesepakatan perubahan spesifikasi dan tidak mengurangi fungsinya



Gambar 1.B.6.2. Pertemuan dengan POKMASWAS terkait penetapan dimensi dan model kapal

Pada tanggal 18 Juni 2021 telah dilakukan proses Pengujian Tanah, untuk menentukan lokasi pembangunan dan pembuatan gambar desain Menara Pengawas yang telah disampaikan kepada ICCTF dan masih adanya perbaikan pada gambar desain. Rekomendasi Dokumen Lingkungan telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan arahan melakukan UKL-UPL.

## C. BLENDED FINANCE

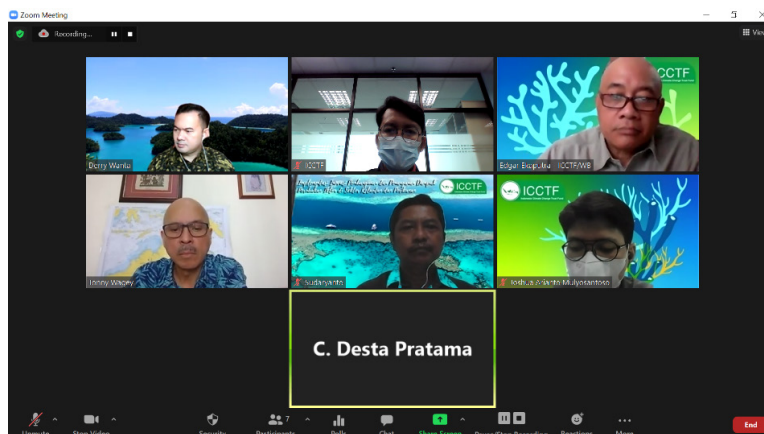
### a. Rapat Mingguan Blue Financing

Berdasarkan rapat mingguan Blue Finance pada tanggal 15 April 2021, pendanaan Lautra untuk Blue Finance mengalami perubahan dari 5 juta menjadi 4 juta di RC terakhir dan terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu: 1) Penguatan kelembagaan IPBB; dan 2) Pelaksanaan Pilot Project. Sudah ada pertemuan dengan BLU LPMUKP dan sedikit memahami rencana Kerjasama yang ditawarkan. Pendanaan awal hanya hibah untuk menyiapkan kelembagaan dan tata kelolanya saja. Untuk loan akan disiapkan skema tata kelola penyalurannya serta akan ada pertemuan lanjutan dengan LPMUKP dan Roren KKP untuk menentukan lokasi project.

Pada awal Mei 2021, dilaksanakan diskusi rutin secara virtual (*online*) terkait perkembangan penyusunan *Policy Note Blue Financing* yang dilaksanakan oleh ICCTF yang didukung Tim Blue Financing dari World Bank. Pada diskusi ini dipaparkan konsep *Policy Note Blue Financing* yang telah disusun oleh Tim untuk mendapatkan masukan.

Beberapa isu terkini terkait dinamika *Blue Financing* di Indonesia, kebijakan, instrumen pendanaan, dan juga opesi proyek percontohnya telah masuk dalam *Policy Note Blue Financing* tersebut.

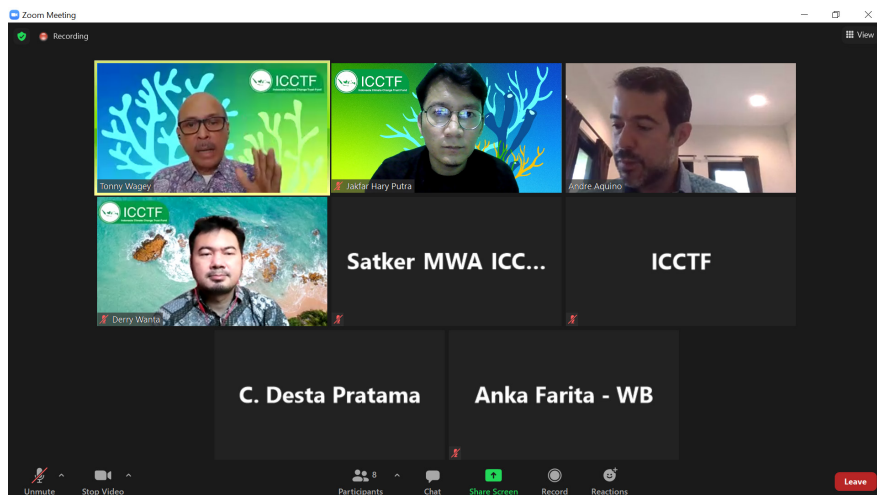
Hasil dari diskusi ini disepakati untuk mematangkan framework regulasi dan implementasi serta usulan proyek yang akan dikembangkan. Perlu disusun paparan singkat terkait hasil *Policy Note Blue Financing* ini untuk dilaporkan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. Dari diskusi ini juga diketahui bahwa potensi pendanaan untuk *Blue Financing* dari program INSAN TERANG LAUTRA untuk tahun ini belum dapat terlaksana sehingga perlu dicari alternatif pendanaan lainnya. Tindak lanjut dari diskusi ini adalah review *Policy Note Blue Financing* oleh World Bank, melakukan diskusi bersama BPD LH, Kementerian Keuangan untuk menjajaki potensi Kerjasama dan partisipasi ICCTF dalam kegiatan Donor Meeting yang akan diselenggarakan oleh World Bank untuk mencari dukungan pendanaan lainnya.



Gambar 1.C.1.  
Diskusi Mingguan  
*Blue Financing*

## b. Breakfast Meeting dengan Pak Andre Aquino – World Bank

Pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakan rapat pembahasan *blue financing* bersama Pak Andre WB. Kondisi saat ini kondisi pendanaan untuk LAUTRA masih bergulir. Tugas ICCTF untuk meyakinkan Bappenas, bahwa ada peluang lainnya dari hasil kajian Problue yang perlu ditindaklanjuti untuk tetap menjalankan blue financing. Langkah terakhir adalah high level meeting. Untuk donor high level, ada permintaan kolega WB untuk menentukan 1-2 topik *blue finance*. Ada komponen, actor, serta short, mid dan long term action dalam roadmap. Namun ekspektasinya tidak akan langsung dapat pendanaan saat itu juga. Sebagai tindak lanjut meeting dengan BPD LH, OJK, dll akan dikawal dan disiapkan, SPK dengan BLU LPMUKP tetap jalan, dan laporan Problue akan jadi bahan. Tetap ada harapan untuk menjalankan *blue financing* dengan sumber daya yang ada.



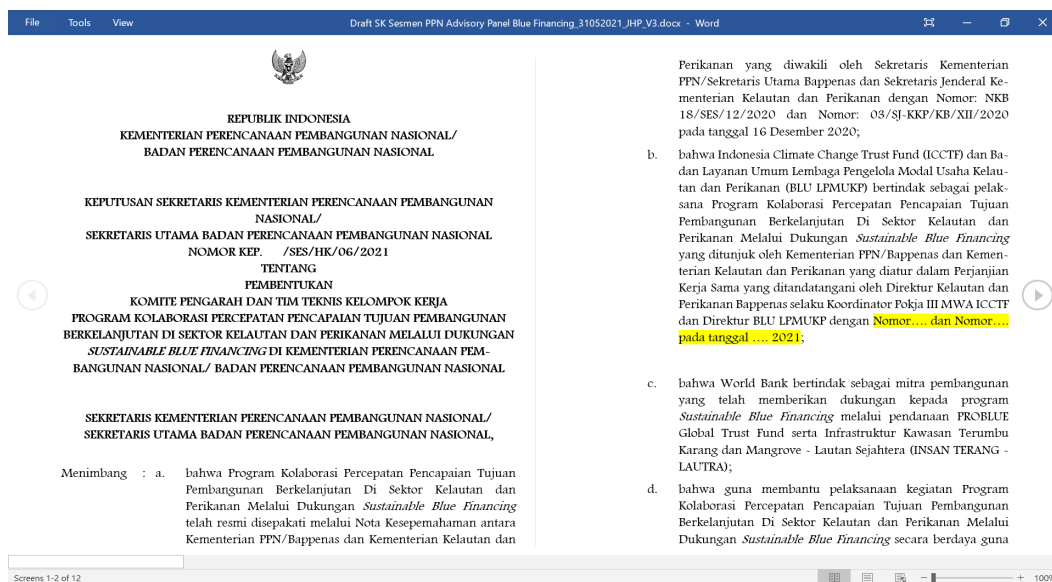
Gambar 1.C.2. Pembahasan *blue financing* bersama Pak Andre Aquino – WB



### c. **Penyiapan SK Advisory Panel Blue Financing**

Salah satu output *Blue Financing Program* melalui dukungan *Pro Blue* World Bank adalah menyusun konsep Surat Keputusan (SK) pembentukan *Advisory Panel Blue Financing*. Pada akhir Mei 2021 telah disusun konsep SK dari Sekretaris Menteri PPN/ Sekretaris Utama Bappenas (Sesmen PPN/Sestama Bappenas) tentang pembentukan Komite Pengarah dan Tim Teknis Kelompok Kerja Program Kolaborasi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Dukungan *Sustainable Blue Financing* di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

*Advisory Panel Blue Financing* terdiri atas Komite Pengarah dan Tim Teknis dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, perwakilan mitra pembangunan, perwakilan pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi dan kelompok masyarakat. Komite Pengarah akan terdiri atas para pejabat Eselon I di K/L terkait dan perwakilan mitra pembangunan selaku donor. Komite Pengarah ini rencananya akan diketuai oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan Sekretaris Jenderal KKP. Sedangkan Tim Teknis terdiri atas para pejabat Eselon II dan perwakilan dari berbagai pihak yang terkait secara teknis dan substansial. Tim Teknis akan diketuai oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas. Penentuan anggota Komite Pengarah dan Tim Teknis ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait untuk kemudian dilakukan legal review oleh Biro Hukum Bappenas yang rencananya dilakukan pada bulan Juni mendatang.



Gambar 1.C.3. Konsep SK pembentukan Advisory Panel Blue Financing

**d. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ICCTF dan BLU LPMUKP**

Pada tanggal 30 April 2021, dilaksanakan pembahasan draft SPK ICCTF dan BLU LPMUKP. Hasil dari pertemuan tersebut, antara lain:

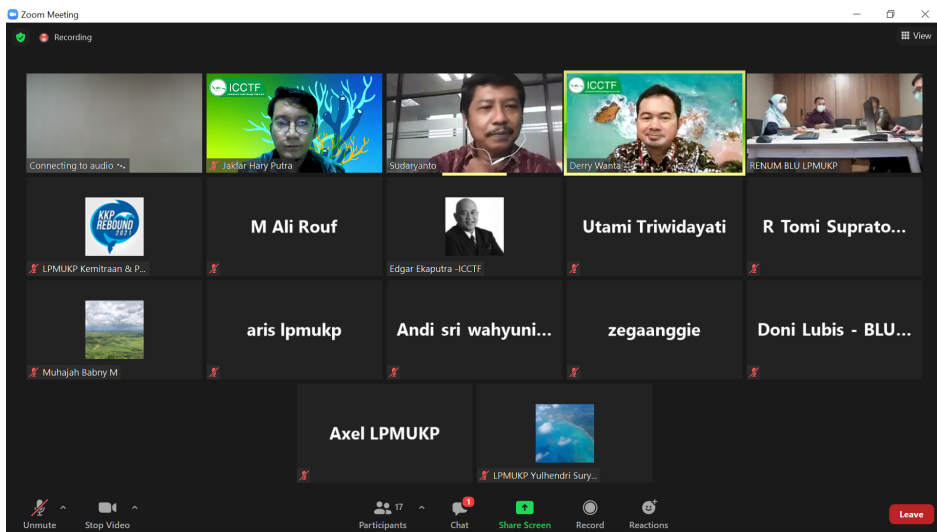
1. Adanya perubahan daerah provinsi yang dituju dari Papua Barat, NTT dan Maluku Utara menjadi Papua Barat dan NTT sejalan dengan kegiatan kegiatan COREMAP-CTI WB
2. Beberapa istilah yang sering di gunakan oleh ICCTF di masukan dalam draft PKS
3. Pasal terkait transaksi pendanaan dalam hal ini hutang piutang dihapuskan dari PKS karena antara ICCTF dan LPMUKP lebih pada kerjasama kelembagaan.
4. Beberapa istilah terkait kegiatan ICCTF akan ditambahkan atau di revisi lebih lanjut oleh Derry & Jakfar sebelum diserahkan kepada LPMUKP

Sebagai tindak lanjut rangkaian diskusi penyiapan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara ICCTF dan BLU LPMUKP yang telah dilaksanakan pada bulan April 2021, BLU LPMUKP menyelenggarakan pertemuan lanjutan secara virtual (online) pada tanggal 5 Mei 2021. Pada pertemuan kali ini juga turut mengundang perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (Dit. PRL) dan Biro Perencanaan, KKP

untuk mendapatkan masukan terkait rencana strategis pengelolaan kawasan konservasi dan lokasi prioritasnya sebagai acuan dalam penyusunan ruang lingkup SPK antara ICCTF dan BLU LPMUKP.

Program KKP yang sejalan dengan rencana *Blue Financing* ini adalah program INSAN TERANG LAUTRA, dimana salah satu usulan komponen kegiatannya merupakan implementasi pelaksanaan program pendanaan inovasi berkelanjutan di bidang Kelautan dan Perikanan (*Blue Financing*) melalui pengembangan Inisiatif Pendanaan Biru Berkelanjutan (IPBB). Lokasi prioritas dalam program INSAN TERANG LAUTRA adalah WPP 714, 715, dan 718.

Untuk program di ICCTF yang saat ini sedang berjalan adalah program peningkatan efektivitas pengelolaan terumbu karang (COREMAP-CTI) dimana kegiatannya berfokus pada peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, perbaikan ekosistem pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga ekosistem pesisir lestari dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Lokasi prioritas dari COREMAP-CTI melalui pendanaan World Bank adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Barat. Dari hasil diskusi ini disepakati bahwa lokasi program *Blue Financing* akan difokuskan pada WPP 714, 715, 718, NTT dan Papua Barat. Semua masukan terkait program prioritas dan lokasi akan ditambahkan dalam ruang lingkup SPK antara ICCTF dan BLU LPMUKP.



Gambar 1.C.4. Diskusi Penyiapan SPK ICCTF dan BLU LPMUKP

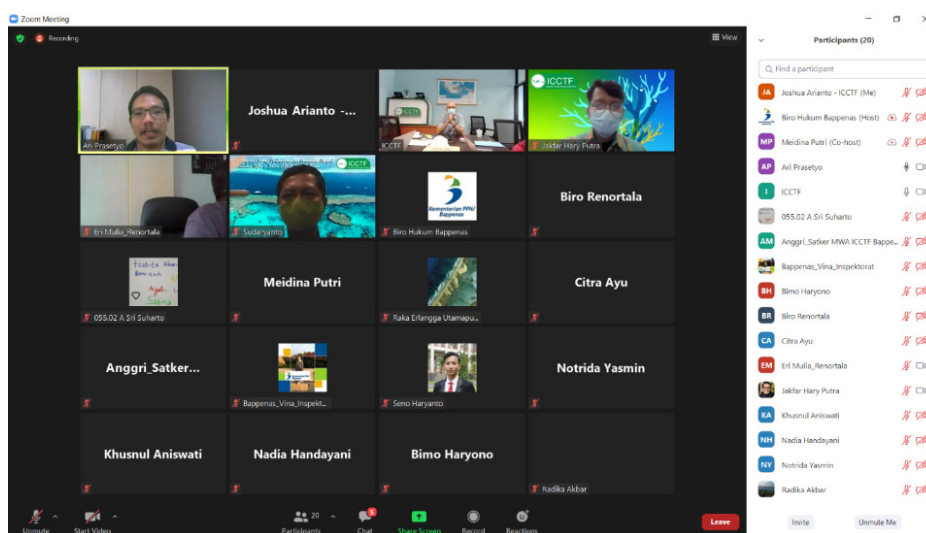


Gambar 1.C.5. Kepala Bidang Kemitraan dan Pendampingan Usaha dari BLU LPMUKP memimpin diskusi Penyiapan SPK ICCTF dan BLU LPMUKP

Revisi terhadap konsep SPK dilakukan secara parallel antara ICCTF dan BLU LPMUKP yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2021. Konsep final SPK tersebut kemudian dimintakan legal review kepada Biro Hukum di Bappenas dan KKP. ICCTF melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan konsep SPK kepada Biro Hukum Bappenas pada tanggal 17 Mei 2021. Hasil dari legal review ini didiskusikan kembali antara ICCTF dan BLU LPMUKP untuk difinalisasi pada bulan Juni 2021.

Pada rapat yang diselenggarakan tanggal 9 Juni 2021, disampaikan bahwa telah ditandatangani NKB antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 5 tahun ke depan sejak 16 Desember 2020. Bappenas dan KKP nantinya masing-masing menunjuk Pimpinan Tinggi Madya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini memuat dan mengatur rincian teknis pekerjaan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang disepakati. Ada pun Isu yang perlu dijelaskan dalam Substansi PKS, antara lain:

1. Tiap kerja sama harus mendukung program-program di Bappenas;
2. Mekanisme pengelolaan Sustainable Financing dan Sustainable Blue Financing;
3. Mekanisme pengelolaan dana hibah dan dana pinjaman pada ICCTF dan LPMUKP;
4. Tata kelola, kedudukan, dan organisasi Unit Manajemen Bersama (UMB), unit dalam satker atau unit sendiri harus ada penjelasan;
5. Penetapan kelompok dan lokasi sasaran serta mekanisme penyaluran dana



Gambar 1.C.6. Diskusi Perjanjian Kerja Sama antara ICCTF dan BLU LPMUKP

## D. PENELITIAN BIOEKONOMI

Setelah dilaksanakannya kegiatan Seminar Bioekonomi, pada periode Q2 tahun 2021 ini kegiatan penelitian bioekonomi udang di Laut Arafura telah mencapai tahap akhir yaitu publikasi laporan akhir.

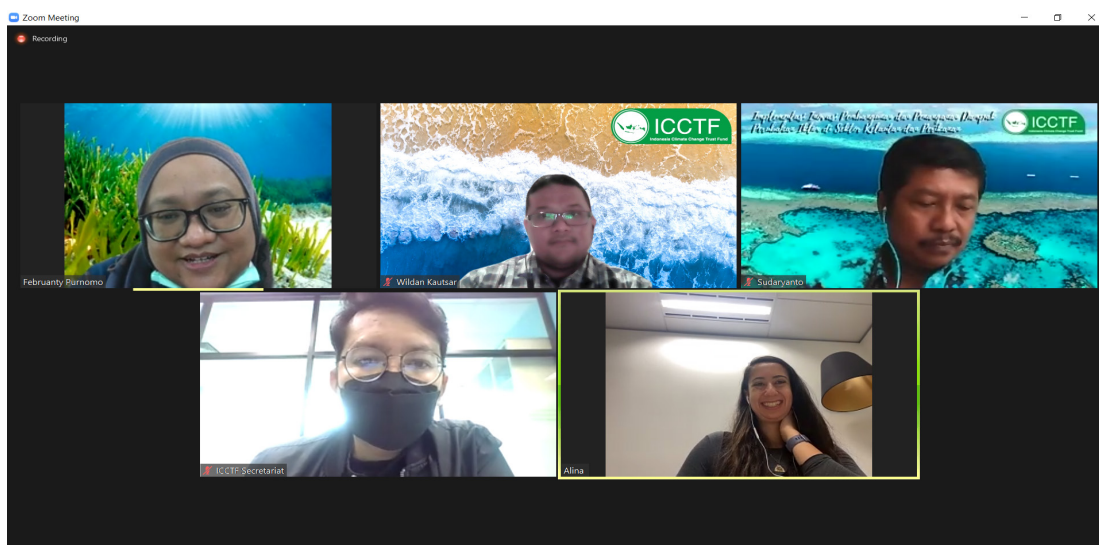
## E. BLUE CARBON

### a. Blue Carbon Program Update with DISER

Pada tanggal 19 April 2021, ICCTF kembali mengadakan pertemuan untuk membahas inisiasi blue carbon bersama dengan DISER (Department of Industry, Science, Energy and Resources), Australia. Agenda pada pertemuan ini membahas update rencana kerja program di TA 2021 dan rencana keikutsertaan dalam UNFCCC COP 26 di Glasgow, pada bulan November 2021 mendatang. DISER menyampaikan bahwa mereka sangat tertarik untuk ikut serta pada COP 26 dan ingin mengadakan *side event* terkait blue carbon. Namun terkait topik dan siapa perwakilan yang akan hadir saat ini masih dalam proses diskusi. ICCTF menyarankan agar pembahasan blue carbon dapat dilakukan di Paviliun Indonesia dan Paviliun Australia sehingga dapat menjadi 2 rangkaian sesi. Untuk Indonesia, ketua tim delegasi COP berada dibawah koordinasi KLHK. Oleh karena itu nantinya ICTTF akan banyak berkoordinasi dengan KLHK, termasuk

untuk penyampaian brief concept. Batas waktunya diperkirakan di bulan Agustus. Jangka waktu tersebut dirasa masih cukup untuk mengelaborasi topik apa yang ICCTF dan DISER akan angkat.

Mengenai update program, saat ini DISER telah menyelesaikan *Inventory Guidelines* untuk *wetland*, yang termasuk di dalamnya membahas ekosistem mangrove dan padang lamun. Dokumen *Inventory Guidelines* disusun oleh CSIRO dan tim ahli yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Kementerian-kementerian terkait untuk mendapatkan *feedback review*. Program DISER berikutnya adalah *Policy Training*. Kegiatan ini masih tertunda akibat pandemi COVID-19. Atas dasar pertimbangan kesehatan, format training diubah menjadi pelatihan secara online. Ada pun untuk modulnya saat ini masih dalam proses penyusunan oleh CTC. Jika tidak ada hambatan, pelaksanaan Policy Training direncanakan akan dilaksanakan pada Q4 tahun 2021.



Gambar 1.F.1. Pembahasan program blue carbon bersama dengan DISER, Australia

#### b. Pembahasan Concept Note Blue Carbon AFD

Pada tanggal 6 Mei 2021, Tim ICCTF bersama-sama membahas Concept Note yang telah dikirimkan oleh AFD untuk diberikan tanggapan sekaligus melengkapi beberapa bagian-bagian perlu diisi oleh ICCTF. Batas waktu pengiriman dokumen ini kepada AFD di tanggal 15 Mei 2021. Namun sebagai antisipasi kemungkinan adanya kebutuhan revisi serta jadwal libur Hari Raya Idul Fitri yang berdekatan, maka pengiriman dokumen dilakukan oleh ICCTF pada tanggal 7 Mei 2021. Dokumen concept note saat ini masih dalam proses internal AFD.

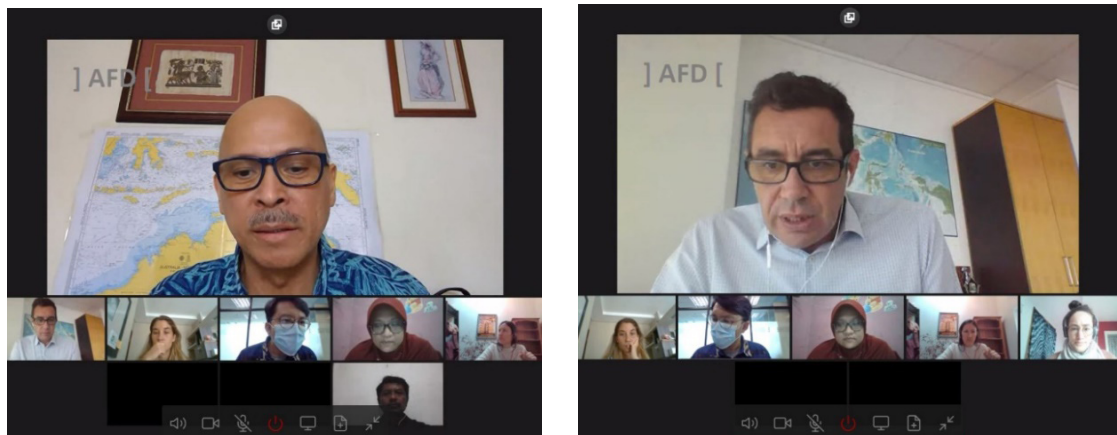
### 1. Program Strategis dan Penggalangan Dana (*fundraising*)

#### 2.1 Pembahasan Concept Note dengan Agence Française de Développement (AFD)

Kegiatan *fundraising* yang dilakukan ICCTF di bulan April adalah peninjauan kerjasama dengan Agence Française de Développement (AFD), Perancis. Pembahasan bersama dengan AFD ini sebelumnya sempat tertunda dikarenakan AFD masih melakukan diskusi internal. Ada pun pertemuan di bulan April diawali dengan rapat koordinasi antara ICCTF dengan konsultan AFD pada tanggal 16 April 2021. Pertemuan ini membahas *concept note* yang telah disusun oleh ICCTF dengan judul “*Management and Utilization of Mangrove Ecosystems to Support National Achievement of Sustainable Marine*

*Development*". Durasi proyek yang diusulkan oleh ICTTF selama dua tahun (2022-2023) dengan total anggaran dalam bentuk hibah sebesar 1.8 juta Euro. Lokasi proyek diusulkan di Lampung Timur, Bitung (Sulawesi Utara) dan Teluk Bintuni (Papua Barat). Pada pertemuan ini, AFD meminta kepada ICCTF untuk mengidentifikasi lebih jauh status dari metodologi blue carbon, roadmap, NDC dan MRV. AFD juga menyampaikan kepada ICCTF untuk menambahkan kebutuhan dari *outcome* yang diajukan seperti *technical assistance* dan sebagainya.

Pembahasan kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 26 April 2021. Pada pertemuan kali ini, perwakilan AFD turut dihadiri oleh Emmanuel Baudran selaku Country Director AFD di Jakarta serta kolega AFD yang berada di Indonesia dan Perancis. ICCTF berkesempatan untuk menjelaskan lebih detail mengenai bisnis proses ICCTF, IBCSF dan inisiasi blue carbon. AFD pada dasarnya menyampaikan ketertarikannya dengan proposal yang diusulkan oleh ICCTF dan saat ini sedang mencari *financial resource* untuk mensupport hibah. Sebagai tindak lanjut AFD akan mengirimkan kembali kepada ICCTF proposal dengan format template AFD untuk kemudian dilengkapi oleh ICCTF.



Gambar 2.1. Pembahasan program *blue carbon* bersama dengan DISER, Australia

## 2.2 Pembahasan *Concept Note* Proyek “*Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development*”

Pada tanggal 4 Mei 2021 dilaksanakan Bappenas dan KKP sedang menyiapkan MoU dengan ADB untuk mengakses pendanaan pinjaman bagi proyek “Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture”. Proyek ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024, sebagai Mayor Project untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur dengan area produksi masyarakat termasuk budidaya perikanan. Pemerintah bersama ADB berencana mengajukan dukungan co-financing melalui Global Environment Facility (GEF) untuk program the International Waters (IW) Focal Area. Proyek berdurasi selama 3 (tiga) tahun yang direncanakan dimulai pada tahun 2022 hingga 2024 dengan lokasi di Indonesia dan Timor Leste dikarenakan proyek ini merupakan proyek ADB Regional yang

harus melibatkan lebih dari satu negara dalam pelaksanaannya. Loan Agreement rencananya akan ditandatangani pada bulan September 2021. Total pendanaan untuk proyek ini sebesar 8 Juta US Dollar dimana untuk Indonesia ditargetkan minimal pendanaannya direncanakan sebesar 5 Juta US Dollar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bertindak sebagai Executing Agency. Selanjutnya, sebagai Implementing Agency adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP dan ICCTF, Kementerian PPN/Bappenas. Untuk proyek hibah ini, KKP telah mengajukan indikasi pagu pendanaannya sebesar 5 Juta US Dollar melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Nomor B.229/SJ/RC.2020/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang perbaikan usulan Readiness Criteria untuk daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/ Green Book) 2021.

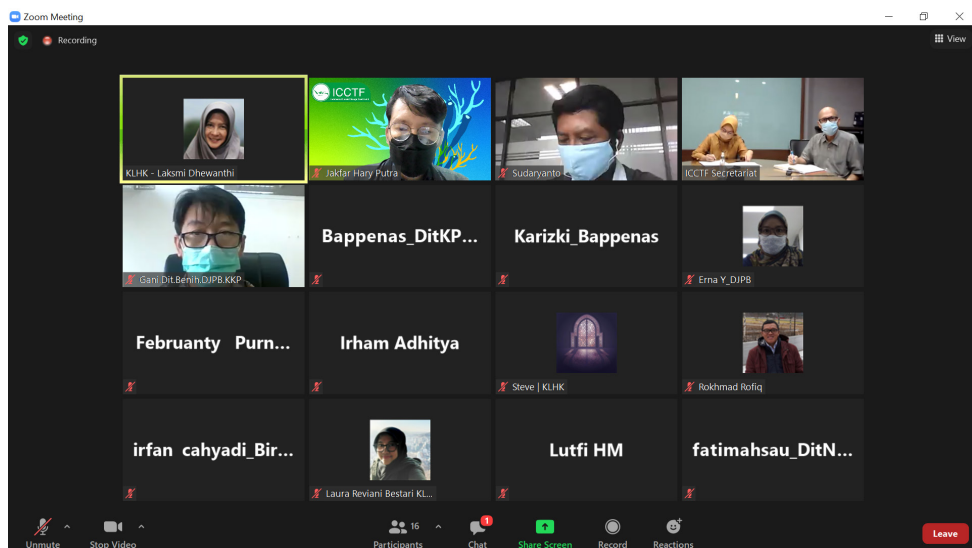


Gambar 2.2. Penyampaian paparan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas



Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

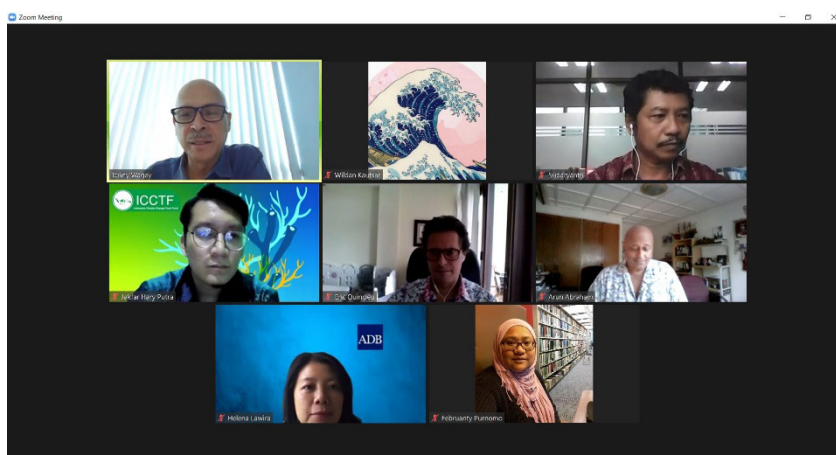
- Menambahkan referensi pada MOU atau Aide Mémoire
- Pertemuan dengan GEF Operational Focal Point yang telah dilaksanakan pada hari ini
- Pengiriman surat resmi dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada GEF Operational Focal Point untuk permohonan indikasi pendanaan co-financing dari GEF
- Menyusun TOR dan pelibatan ADB/GEF Senior Aquaculture Value Chain Specialist dalam pengembangan initial concept note untuk proyek multinegara.
- Penyampaian GEF Concept Note (PIF) pada Pertemuan ke-61 GEF Council Work Program pada bulan September 2021 mendatang.



Gambar 2.3. Diskusi Concept Note “Sustainable Shrimp Aquaculture Value Chain Development”

### 2.3 Rapat dengan ADB Manila

Pada tanggal 5 Mei 2021, ICCTF melaksanakan pertemuan untuk membahas rencana proyek “Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture” bersama dengan Pak Arun Abraham dan Tim ADB Manila. Pak Arun menyampaikan tantangan komunikasi dengan Timor Leste yang cukup membutuhkan tenaga ekstra dan kekhawatirannya terkait dana yang mungkin belum akan tersedia sampai dengan akhir desember. Pak Arun juga menyarankan agar proposal tidak hanya condong pada sustainable fisheries. Ibu Helena dari ADB Indonesia kemudian menyampaikan *healthy ocean and pollution* sebagai salah satu isu yang juga dapat diangkat. *Healthy ocean* ini berbeda dengan *livelihoods*. Pada akhir rapat Pak Arun kemudian menyampaikan dalam waktu dekat akan mencari konsultan untuk mempersiapkan dan menyusun informasi yang dibutuhkan untuk proyek ini. Pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Fitri 1442 H.



Gambar 2.4. Dokumentasi Peserta Rapat

### 2.4 Rapat dengan Media Partner

Pada tanggal 21 Mei 2021 dilakukan pembahasan rencana strategi komunikasi dengan media partner. ICCTF ingin menunjukkan brand tersendiri yang menunjukkan pemerintah involved di kelautan dan perikanan. Bahan-bahan materi yang ada di ICCTF saat ini cukup banyak. Isunya mungkin serius tapi perlu kemasan yang menarik. Pak Tonny mengharapkan media partner dapat memberikan ide, proposed activities, proposed product, dan yang paling dekat, artikel yang bisa dikeluarkan di media cetak untuk disampaikan kepada Ibu Direktur Kelautan dan Perikanan. Harapannya akhir Juni sudah bisa mulai bergerak. Mbak Mega menambahkan, nanti akan butuh minimal 3 video untuk ICCTF, WB, ADB. Kemudian medsos dan website perlu template yang menarik. Untuk media visit, tahun ini ICCTF menargetkan satu kegiatan untuk COREMAP-CTI WB. Terakhir adalah pelatihan komunikasi untuk ICCTF dan mitra.

## 2.5 Output Konvensi Jejaring's Zoom Meeting

Pada tanggal 23 Juni 2021, dilakukan diskusi Bersama KKP terkait Ocean Account. Pada pertemuan ini disampaikan bahwa melalui diskusi informal, KKP mempunyai tim kerja lintas K/L: KKP, BPS, Kemenkeu, BIG dan Lapan dalam menginisiasi penyusunan ocean account: Pilot di kawasan konservasi, yaitu Gili Matra (dari 3 rencana lokasi awal). Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dengan kegiatan ICCTF - COREMAP CTI. Ada 7 output: Ocean Asset (Survey terumbu karang & sea grass) oleh BIG, Menghitung flow to economy (valuasi ekonomi - added value) oleh DJKN, Flow to environment (emisi & polusi), Economy, Governence (manajemen, tataruang, zonasi, retribusi/PNPB), 1 Presentasi dari 5 output dan Ocean wealth. Tahun ini hanya sampai output 5 saja. Setelah diskusi ini akan ada pertemuan dengan tim lintas K/L. Diskusi awal dengan kedutaan Norway disampaikan bahwa penawaran grant untuk ruang laut diusulkan untuk mendukung Ocean Account. Hampir pasti dapat dukungan dari UK Global Ocean Partnership yang juga diarahkan juga untuk Ocean Account. Donor akan diarahkan untuk mengerjakan salah satu output atau kegiatan didalam output.

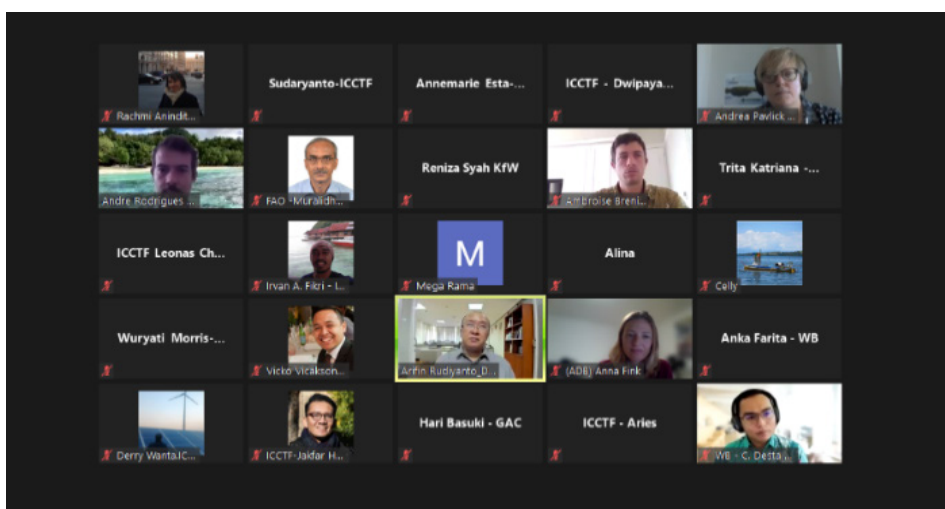


Gambar 2.5. diskusi Bersama KKP terkait Ocean Account

## 2.6 Indonesia Ocean Development Partners (IODP) Meeting

Pada tanggal 25 Juni 2021, ICCTF menghadiri Pertemuan IODP yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Dalam pertemuan online ini Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, Deputi Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan (BAPPENAS) menjelaskan tentang Blue Finance di Indonesia. Direktur Eksekutif kami, Dr. Tony Wagey kemudian menjelaskan tentang Blended Finance untuk Perikanan Berkelanjutan dan Kawasan Konservasi Laut.

Pengembangan ekonomi biru akan membutuhkan investasi dan pembiayaan biru yang kuat. UNDP memperkirakan bahwa diperlukan investasi tahunan sebesar US\$8-9 miliar di sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yang bertujuan untuk menggandakan kontribusi tahunan sektor maritim terhadap PDB dari 6% menjadi 12,5%. Pendanaan pemerintah (APBN) dan filantropi saat ini hanya mencakup sekitar 20% dari investasi yang diperlukan untuk memenuhi target sektor kelautan dan perikanan pemerintah di bawah RPJMN. Pilihan tersedia untuk mendukung kebutuhan mendesak Indonesia akan Pembiayaan Biru, termasuk memobilisasi dana dari bank dan lembaga keuangan, memperluas Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPDLH), obligasi biru, atau Sukuk biru sebagai instrumen pembiayaan biru utama jangka menengah dan panjang dan campuran keuangan.



Gambar 2.6. Pertemuan Indonesia Ocean Development Partners

### 3. **Komunikasi, Outreach dan Kemitraan**

Berbagai kegiatan komunikasi dan publikasi yang terkait dengan penanggulangan perubahan iklim bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mensosialisasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bappenas pada satker ICCTF dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2020 hingga di tahun 2021 ini, kegiatan komunikasi dan publikasi ICCTF juga diarahkan untuk mendukung implementasi Bappenas dalam konteks RPJMN serta monitoring ekosistem pesisir prioritas dan Rehabilitasi Terumbu Karang.

Kegiatan komunikasi ICCTF terbagi atas dua strategi yaitu komunikasi internal dan eksternal. Melalui kegiatan-kegiatan komunikasi ini, eksistensi ICCTF sebagai satu-satunya lembaga perwalian dana perubahan iklim yang dimandatkan oleh pemerintah di Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dan diakui, baik oleh pemangku kepentingan di dalam maupun

luar negeri. Komunikasi internal kepada seluruh staf ICCTF di semua level untuk meningkatkan manajemen pengetahuan untuk staf tentang visi-misi ICCTF, menginternalisasi nilai-nilai strategis organisasi, dan membangun soliditas staf agar terbangun suatu budaya kerja positif di ICCTF.

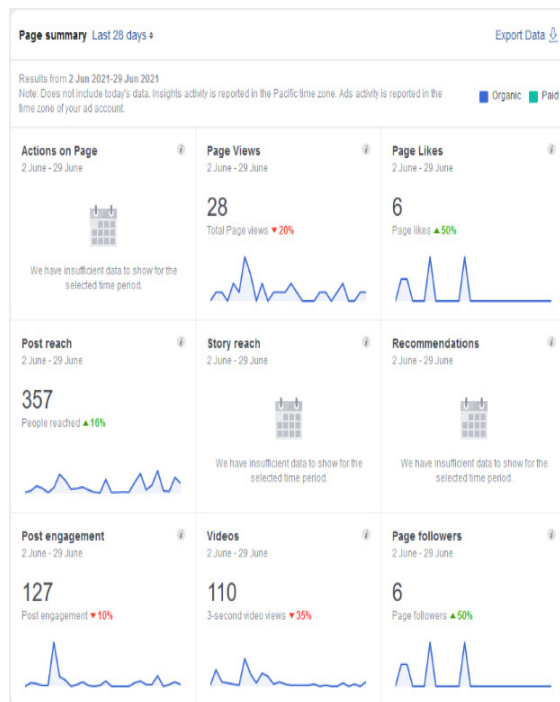
Sedangkan untuk kegiatan komunikasi eksternal, ICCTF menekankan pada pengenalan visi-misi organisasi, peranan strategis organisasi, serta eksistensi dan fungsi dari pengembangan program - program ICCTF. Selain itu juga menyebarluaskan capaian serta pembelajaran program-program ICCTF yang layak untuk disebarluaskan dan direplikasi di daerah lainnya yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa. Upaya pengenalan dan penjangkauan publik ICCTF dilakukan secara intens dengan pola yang beragam dan target yang variatif. Pola komunikasi yang diterapkan secara umum melalui media digital karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun pelibatan media massa tetap dilakukan ketika ada kegiatan sosialisasi, seminar, dan ekspose program-program ICCTF.

### 3.1 Media Sosial

Pada triwulan kedua 2021 ini ICCTF melakukan strategi pendekatan komunikasi digital karena dinilai lebih interaktif dan real time, melalui pengelolaan media sosial ICCTF yang terdiri atas Facebook (<https://www.facebook.com/IndonesiaClimateChangeTrustFund>); Twitter (@ICCTF\_ID); Instagram (@ICCTFofficial); Youtube (ICCTF Official) dan website ICCTF (<https://www.ICCTF.or.id/>). ICCTF berupaya untuk selalu mengoptimalkan kanal informasi yang tersedia termasuk media sosial dengan memperbaharui penyebaran konten informasi dan foto- foto kegiatan terkini yang dilakukan oleh ICCTF dan para mitra pelaksana di daerah. Portofolio pengelolaan media sosial ICCTF pada periode triwulan keempat terangkum pada Gambar di bawah. Adapun laporan traffic dari media sosial yang dikelola oleh ICCTF terangkum dalam infografis berikut.



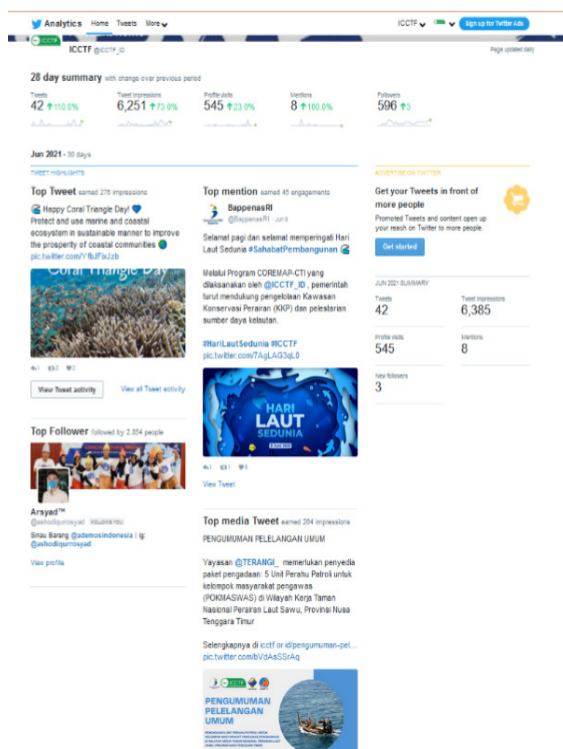
Gambar 3.1.1



Gambar 3.1.2



Gambar 3.1.3



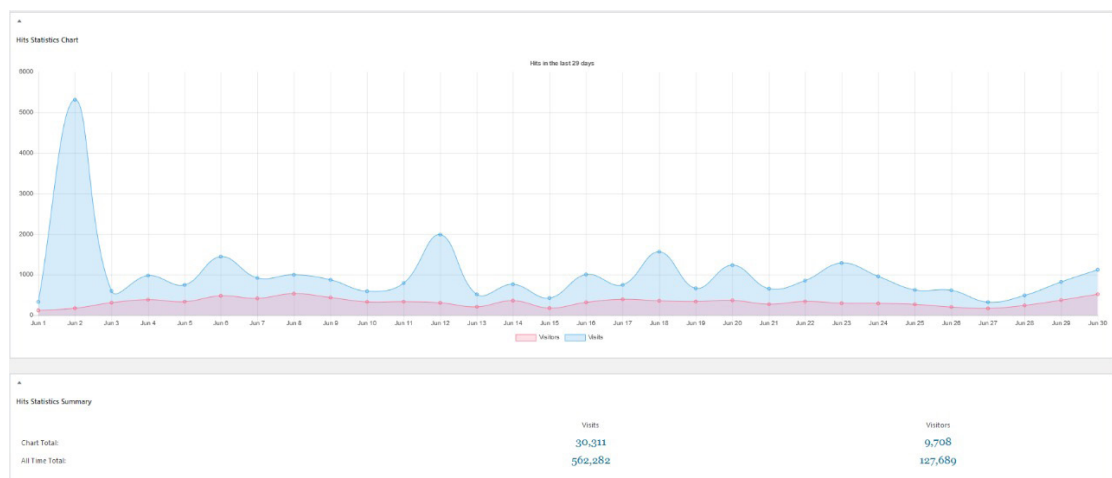
Gambar 3.1.4

Sementara itu untuk pengelolaan website, *traffic* merekam sekitar 9,708 kali jumlah kunjungan ke halaman website ICCTF dengan 127,689 total pengunjung hingga periode akhir Juni 2021. Pada triwulan kedua 2021 ini, tim komunikasi juga memperbarui tampilan website ICCTF dengan pembaruan layout pada halaman utama. Beberapa laman dalam website ICCTF pembaruan foto kegiatan, *homepage ICCTF*, *ICCTF History*, *ICCTF Organization Structure-Organogram*, *ICCTF Publication*, *Previous Event*, *Pop-up Information*, *ICCTF Video Gallery*, dan tentunya *ICCTF News*.

Beberapa judul artikel yang tayang di *ICCTF News* periode April-Juni 2021, di antaranya:

1. Siaran Pers Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Pemanfaatan Berkelanjutan
2. Mulai dari Karbon Biru untuk Menyelamatkan Bumi
3. Bappenas bersama ICCTF danai 2 juta dolar untuk Konservasi Terumbu Karang di NTB
4. Konservasi Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Nasional
5. Bappenas Mulai Garap Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di NTB
6. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberda
7. Pengelolaan terumbu Karang oleh ICCTF, Dua Gili Menuju Rehabilitasi
8. COREMAP-CTI ADB, Paket 6 Akan Rehabilitasi Mangrove Gili Balu di Poto Tano Sumbawa Barat
9. Donor Meeting World Bank: “Strategi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia”
10. Pengumuman Pelelangan Umum TERANGI

11. Blue Carbon Indonesia Simpan 17 Persen Cadangan Dunia
12. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
13. Penanganan Paus Cuvier Terdampar di Pantai Mertasari, Bali
14. Sosialisasi Pengenalan Pisces Guna Menghindari Bycatch
15. Selamat Hari Bumi Sedunia
16. Selamat Hari Kartini!
17. Donasi untuk Korban Badai Siklon Seroja
18. Sumber Daya Pesisir Untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
19. Kunjungan Lapangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Indonesian Coral Reef Garden (ICRG)
20. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
21. Kick Off COREMAP-CTI, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir untuk Penguatan Ekonomi Berkelanjutan
22. Ini Tiga Target Indonesia dalam Pengelolaan Terumbu Karang
23. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Jadi Prioritas RPJMN
24. Bappenas Harapkan Nusa Penida Jadi Contoh Pengelolaan Pemanfaatan Terumbu Karang
25. Perairan Nusa Penida Masuk Lokasi Percontohan Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang



Gambar 3.1.5



### 3.2 Produksi Media

Pada Q2 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan komunikasi massa secara digital. ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank mendukung pembuatan video perayaan *World Oceans Day* yang bertemakan *The Ocean: Life & Livelihood*. Pada 3 Juni 2021 dilakukan meeting melalui zoom yang membahas teknis pembuatan video dan pengumpulan cuplikan video yang terkait dengan ekosistem laut serta kegiatan-kegiatan masyarakat pesisir menunjang perekonomian yang diikuti ICCTF dan mitra pelaksana COREMAP-CTI WB. Meeting dilakukan meeting melalui zoom yang membahas teknis pembuatan video dan story line. Kemudian proses briefing dengan editor video dari konsultan editor video Terangi melauai zoom meeting pada tanggal 5 Juni, hingga proses editing dan finishing video di kantor ICCTF pada tanggal 6 Juni.

Video *The Ocean: Life & Livelihood* berdurasi 7 menit ditampilkan tepat pada tanggal 8 Juni 2021 di Youtube ICCTF dan website ICCTF, kemudian disebarakan lebih jauh dengan seluruh platform sosial media ICCTF seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Tidak hanya ICCTF, tapi seluruh mitra pelaksana COREMAP-CTI WB yang terlibat dalam pengumpulan cuplikan video juga mempublikasi video ini di akun sosial media masing-masing.

Tabel 3.2.1 Cuplikan video perayaan World Oceans Day 2021





**Community Livelihood**  
SEAWEED FARMER / YAPEKA



**Martinus**  
WEST KENSUWAI COMMUNITY LEADER  
In 1995-1996 when building the foundation (house) we took coral reefs from the front of the village.



**Dantje Ndoen**  
SECRETARY OF FORUM KOMUNIKASI TOKOH ADAT PEDULI BUDAYA (PANTAPB)  
By conserving the environment, such as forests, rice fields, and the sea, the environment is quickly destroyed or extinct due to irregular use.



**Solar Power Plant**  
ROTE / YAPEKA

Produksi media secara digital untuk mendukung kegiatan sekretariat termasuk dengan menyelesaikan layout dan publikasi Catatan Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi, Catatan Perjalanan Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Fact Sheet COREMAP-CTI Dana Hibah ADB

Tabel 3.2.2 Tampilan Catatan Seminar, Catatan Perjalanan, dan Fact Sheet COREMAP-CTI ADB



Catatan Seminar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi



Catatan Perjalanan Kick Off COREMAP-CTI ADB Provinsi Bali dan NTB

### FACTSHEET COREMAP-CTI DANA HIBAH ADB

#### Sekilas COREMAP-CTI

Goal dari Sustainable and Management Program – Coral Triangle Initiative (CTI) merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program strategis ini akan menghasilkan model inovasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut secara berkelanjutan serta membangun sikap yang gesam, dinamis, paripurna, dan di atas hal-hal dan perikanan.

1992 – 2004

Menjadi salah satu wilayah ANZAN pertama dan satu-satunya yang memiliki status sebagai salah satu wilayah di bawah APREKA

2007 – 2010

Perencanaan Perikanan Melayu dan perikanan lainnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya

2016 – Sekarang

Perencanaan Perikanan Melayu dan perikanan lainnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan perikanan

Sektor Perikanan Melayu dan perikanan lainnya merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor ini di dukung oleh investasi yang signifikan dari pemerintah dan swasta. Sektor ini juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Implementasi kegiatan COREMAP-CTI yang di dukung oleh ICCTF-Bappenas sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai amfah dalam pengembangan kawasan pesisir secara terpadu untuk menghasilkan model inovasi pembangunan pesisir yang dapat di dukung oleh masyarakat.

### Kegiatan yang dilakukan dalam COREMAP-CTI Dana Hibah Asian Development Bank

- Rehabilitasi akuakultur masinis (mangrove, tambak, kura-kura, dan lain-lain)
- Meningkatkan sistem pemantauan melalui partisipasi masyarakat pesisir (sistem berbasis masyarakat dan pemantauan pemukiman/pengelolaan pemukiman) dan tempat masyarakat pesisir
- Pengembangan usaha ekonomi berbasis kegiatan perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut secara berkelanjutan
- Meningkatkan kapasitas pasar melalui pendekatan Ecosystem Approach dan pelatihan berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut secara berkelanjutan

Rajuan rantai pasok (supply chain) untuk komoditas perikanan dan lainnya untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani dan nelayan

Mengajukan Konsep Payment Ecosystem Services (PES) untuk Nelayan Akademik

### Lokasi Proyek




Terdapat tiga lokasi proyek Coral Triangle Initiative and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dukungan dana hibah dari Asian Development Bank (ADB) yaitu di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Tenggara Barat dan Taman Wisata Perikanan (TWP) Gilli Maree dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gilli Bali di Provinsi NTB.

Lokasi proyek COREMAP-CTI ADB berada di kawasan perairan Lingsar-Sanda kawasan ini dikenal memiliki 76% spesies korang dengan 2681 spesies ikan karang. Di kawasan pulau Gilli ini ada juga zona mangrove habitat bagi mamalia laut seperti dugong dan manatee.

Fact Sheet COREMAP-CTI Dana Hibah ADB

Produksi media audio berupa podcast juga dilakukan untuk mendukung kegiatan kampanye program COREMAP-CTI, produksi ini bekerja sama dengan mitra pelaksana COREMAP-CTI WB

Tabel 3.2.3 Tampilan Daftar Unggahan Podcast “Cerita dari Laut” di Spotify

		
<p>17 Maret 2021 : Konservasi Laut dan Masyarakat Adat</p>	<p>11 Juni 2021 : Lampu LED sebagai mitigasi bycatch, bagaimana itu?</p>	<p>29 Juni 2021 : Potensi Pariwisata di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Kajian Investasi Ekowisata</p>

### 3.3 Media Monitoring

Pada Q2 ini Indonesia Climate Change Trust Fund melakukan Media Monitoring terhadap kegiatan yang melibatkan media massa di antaranya:

- **Entry Meeting COREMAP-CTI ADB di Nusa Tenggara Barat**

#### **Siaran Pers Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Pemanfaatan Berkelanjutan**

**LOMBOK** – Wilayah Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang tinggi, tersebar di daratan, lautan maupun daerah antara yaitu daerah pesisir. Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas (*megabiodiversity*) kedua terbesar di dunia. Indonesia memiliki 25% spesies dunia, 3.429 jenis ikan hidup di air laut dan 39% jenis ikan karang. Sebagian dari jenis ikan tersebut 120 jenis tercatat sebagai ikan endemik. Terumbu karang Indonesia meliputi 14% terumbu karang dunia dan yang terdiri atas 596 jenis karang. Sebagai upaya perlindungan biodiversitas tersebut, diperlukan daerah perlindungan laut yang dikelola dengan baik guna menjamin keberlanjutannya.

“Perlindungan ekosistem yang kita lakukan sejalan dengan komitmen global yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) butir 14 tentang kehidupan bawah laut. Dalam SDGs 14, pelestarian wilayah pesisir, pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut serta peningkatan manfaat ekonomi menjadi kelompok target yang harus dapat dicapai untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap sumber daya merupakan salah satu upaya menjamin keberlanjutan sumber daya tersebut, sehingga masyarakat dapat mengembangkan mata pencahariannya dan menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi maupun setelah pandemi ini berakhir,” ujar Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc, dalam kegiatan Entry Meeting Coral Reef Rehabilitation Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP CTI), di Senggigi, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (4/05/2021).

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai *implementing agency* kegiatan COREMAP-CTI atau dikenal dengan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang – Prakarsa Segitiga Karang, program ini merupakan program untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang mengandalkan laut dalam kehidupan mereka. Kegiatan Entry Meeting COREMAP-CTI di Nusa Tenggara Barat ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan rencana kegiatan COREMAP-CTI dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank yang akan dilakukan oleh

ICCTF serta mitra pelaksana yang akan mengerjakan 4 (empat) proyek di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra dan Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu-NTB kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.

Lokasi Proyek COREMAP-CTI ADB mencakup tiga kawasan perlindungan laut di Lesser Sunda yang memiliki keanekaragaman hayati kelautan yang tinggi, terdapat 76% spesies karang dan 2,631 spesies ikan karang. Bentang laut (*seascape*) Lesser Sunda meliputi tiga provinsi di Indonesia and merupakan jalur migrasi keluarga mamalia laut, Cetaceans dan juga 6 spesies penyu dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Melalui proyek ini, dua propinsi yang menjadi lokasi sasaran yaitu Propinsi Bali dan Propinsi NTB mengelola efektivitas tata kelola kawasan konservasi laut atau Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Nusa Penida-Bali, Gili Matra dan Gili Balu-Nusa Tenggara Barat.

Guna mendukung efektivitas tata kelola KKP di tiga lokasi tersebut, maka Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mengelola dana hibah COREMAP-CTI ADB yang bertujuan untuk mendukung pengelola kawasan konservasi perairan, perencanaan pengelolaan berdasar sumber daya dan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 dalam pembangunan kelautan dan perikanan, Bappenas berperan sebagai *enabler* bagi para pemangku kepentingan

baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat melalui pendekatan *convergence* dimana Bappenas menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif. Pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah Asian Development Bank ini merupakan bentuk *pilot project* dimana Gili Matra dan Gili Balu, Nusa Tenggara Barat menjadi lokasi *pilot project*. Tak hanya itu Nusa Penida, Bali juga menjadi area *pilot project* pelestarian terumbu karang ini. Yang pada akhirnya, *pilot project* dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait.

Pemerintah Provinsi NTB juga mendukung pencapaian program nasional penetapan kawasan konservasi seluas 20 juta ha pada tahun 2020 dan 30 juta ha pada tahun 2030. Komitmen itu ditunjukkan dengan mengalokasikan 341.641,45 ha wilayah perairan NTB sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD).

Sementara, terkait dengan program COREMAP-CTI di NTB, “kami memandang program ini telah banyak berperan besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di daerah ini, sehingga kami pun berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan dari program yang konstruktif ini. Kami akan berupaya menjaga dan merawat infrastruktur yang ada, dengan bersinergi melibatkan masyarakat, serta akan melakukan upaya replikasi program COREMAP-CTI di kabupaten/kota se-NTB yang belum mendapatkan intervensi dari program ini,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.

### **Substansi COREMAP CTI**

Peningkatan populasi penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan akan bahan baku yang bersumber dari ekosistem terumbu karang memunculkan permasalahan yang mengancam terumbu karang seperti polusi, sedimentasi, *coral bleaching*, *illegal fishing & destructive fishing*, serta aktivitas wisata yang melampaui *carrying capacity* kawasan. Hal-hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas terumbu karang, penurunan produktivitas perikanan karang, serta penurunan plasma nutfah dan biota laut.

Dibutuhkan strategi yang tepat dan terintegrasi dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang, implementasi COREMAP-CTI merupakan upaya penyelamatan terumbu karang yang sesuai dengan RPJMP 2020-2024 sesuai dengan Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan serta Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Intervensi COREMAP - CTI dengan dana hibah Asian Development Bank diantaranya adalah penguatan kelembagaan dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem, dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan berbasis kelautan. Harapannya pelaksanaan program COREMAP-CTI Asian Development Bank ke depan dapat menjadi salah satu pengungkit dalam

pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 bagi masyarakat pesisir. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan

### **Latar Belakang Pendanaan**

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM menerangkan bahwa pada tahun 2019 Bappenas melalui ICCTF telah dipercaya untuk mengelola proyek COREMAP-CTI dengan pendanaan hibah yang berasal dari Global Environment Facility (GEF), yang disalurkan melalui Asian Development Bank dan World Bank.

“Latar belakang pelaksanaan COREMAP-CTI dengan dana hibah dari ADB diantaranya adalah target untuk mencapai 10% Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2030, meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lesser Sunda, khususnya Nusa Penida di Bali, Gili Matra dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan,” jelas Sri Yanti

Dukungan COREMAP-CTI Asian Development Bank sebesar US\$5,2 juta telah dimulai pada 4 Maret 2020 dan akan berakhir pada 31 Desember 2022 ini bertujuan untuk mencapai 80% Kategori Biru di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Nusa Penida, mencapai 80% Kategori Biru di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, dan mencapai 100% Kategori Hijau di Taman Pulau Kecil (TPK) Gili Balu.

## Daftar Unggahan Publikasi Media Pada Kegiatan *Entry Meeting*

No	Media Massa	Judul	Link
1	Hariannusa.com	Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Pelestarian Terumbu Karang	<a href="https://hariannusa.com/2021/06/04/gili-matra-dan-gili-balu-jadi-pilot-project-pelestarian-terumbu-karang/">https://hariannusa.com/2021/06/04/gili-matra-dan-gili-balu-jadi-pilot-project-pelestarian-terumbu-karang/</a>
2	Gerbangindonesia.co.id	Konservasi Gili Matra dan Gili Balu Jadi Pilot Project Nasional	<a href="https://gerbangindonesia.co.id/2021/06/04/konservasi-gili-matra-dan-gili-balu-jadi-pilot-project-nasional/">https://gerbangindonesia.co.id/2021/06/04/konservasi-gili-matra-dan-gili-balu-jadi-pilot-project-nasional/</a>
3	Timesindonesia.co.id	Bappenas Mulai Garap Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di NTB	<a href="https://www.timesindonesia.co.id/read/news/350888/bappenas-mulai-garap-program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-di-ntb/">https://www.timesindonesia.co.id/read/news/350888/bappenas-mulai-garap-program-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-di-ntb/</a>
4	Detikntb.com	Bappenas bersama ICCTF danai 2 juta dolar untuk Konservasi terumbu karang di NTB	<a href="https://detikntb.com/2021/06/04/bappenas-bersama-ICCTF-danai-2-juta-dolar-untuk-konservasi-terumbu-karang-di-ntb/">https://detikntb.com/2021/06/04/bappenas-bersama-ICCTF-danai-2-juta-dolar-untuk-konservasi-terumbu-karang-di-ntb/</a>
5	Siarpost.com	Gili Matra dan Gili Balu Akan Jadi Pilot Project Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF	<a href="http://siarpost.com/2021/06/04/gili-matra-dan-gili-balu-akan-jadi-pilot-project-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF/">http://siarpost.com/2021/06/04/gili-matra-dan-gili-balu-akan-jadi-pilot-project-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF/</a>
6	Globallombok.co.id	Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF, Dua Gili Menuju Rehabilitasi	<a href="https://www.globallombok.co.id/2021/06/pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF.html?m=1">https://www.globallombok.co.id/2021/06/pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF.html?m=1</a>
7	Rri.co.id	Gili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF	<a href="https://rri.co.id/mataram/daerah/1069376/gili-matra-dan-gili-balu-menuju-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF">https://rri.co.id/mataram/daerah/1069376/gili-matra-dan-gili-balu-menuju-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF</a>
8	Diskomindotik.ntbprov.go.id	Gili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang oleh ICCTF	<a href="https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/gili-matra-dan-gili-balu-menuju-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF688.html">https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/gili-matra-dan-gili-balu-menuju-rehabilitasi-dan-pengelolaan-terumbu-karang-oleh-ICCTF688.html</a>





**3**

## **AUDIT, KEUANGAN DAN OPERASIONAL**

### 3.1 Laporan Audit Tahun 2021

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara. Pada tahun 2021 ini BPK sedang mengaudit Laporan Keuangan Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2020 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan audit untuk kegiatan Hibah Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) Tahun Anggaran 2020 juga sedang proses diaudit oleh BPK Audit Khusus di tahun 2021 ini dan sampai laporan ini disampaikan, laporan hasil audit masih belum final dari pihak BPK.

### 3.2 Informasi Keuangan Periode April – Juni 2021

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2021 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 7,68M dan dana Hibah Luar Negeri (Hibah Terencana) sebesar 44,82M sehingga total dana yang dikelola ICCTF Tahun Anggaran 2021 adalah 52,50M. Capaian pada kuartal 2 tahun 2021 adalah sebesar 26,65M yaitu 58,31% dari total dana yang dikelola.

**Tabel Rincian Penyerapan Dana sampai dengan bulan Juni tahun 2021**

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan		Sisa Anggaran
APBN - ICCTF	7.680.000.000	2.733.107.898	36%	4.946.892.102
Hibah – WorldBank (Reksus)	25.650.000.000	24.633.936.651	96%	1.016.063.349
Hibah – Asian Development Bank (Reksus)	19.170.000.000	3.247.821.986	17%	15.922.178.014
<b>TOTAL</b>	<b>52.500.000.000</b>	<b>30.614.866.535</b>	<b>58%</b>	<b>21.885.133.465</b>

### 3.3 Operasional / Kesekretariatan

Tenaga professional yang mendukung kegiatan ICCTF sampai kuartal 2 tahun 2021 sebanyak 29 orang yang terdiri dari 17 orang jasa konsultan time-based, 2 orang jasa konsultan Output-based dan 10 orang jasa lainnya. Penyebaran gender terdiri dari 19 jenis kelamin laki-laki dan 10 jenis kelamin Wanita. Untuk mendukung kegiatan blended finance ICCTF dibantu oleh World Bank dengan menyediakan 4 orang Technical Expert yang akan berakhir di bulan Juni 2021 ini.

Sampai kuartal 2, posisi yang belum terisi adalah Money Specialist COREMAP-CTI ADB, Creative Officer COREMAP-CTI ADB, Financial Management Specialist COREMAP-CTI WB, dan Pengemudi Operasional.

Adapun susunan personil ICCTF pada kuartal 2 ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Posisi	Pendanaan
1	Gabriel A. Wagey	Executive Director	Rupiah Murni (APBN)
2	Mega Gusti Rama	Finance and Operation Manager	Rupiah Murni (APBN)
3	Sudaryanto	Program Manager	Rupiah Murni (APBN)
4	Anggri Heravanthi	Accounting Specialist	Rupiah Murni (APBN)
5	SiwiHandinah	General Adm dan HR Coordinator	Rupiah Murni (APBN)
6	Gabrella Sabrina	Communication and Digital Off.	Rupiah Murni (APBN)
7	Muhammad Wildan Kautsar	Knowledge Management Officer	Rupiah Murni (APBN)
8	Joshua Arianto M	Program Officer	Rupiah Murni (APBN)
9	Affalia Maydi Hatika	Communication Assistant	Rupiah Murni (APBN)
10	Deta Kurnia Soundra	IT Officer	Rupiah Murni (APBN)
11	Eko Wahyudi	Finance and Administration Officer COREMAP-CTI WB	Rupiah Murni (APBN)
12	Uli Natul Khasanah	Adminstration Officer	Rupiah Murni (APBN)
13	Agus Salim	Logistic and General Support	Rupiah Murni (APBN)
14	Sugihartono	Office Assistant	Rupiah Murni (APBN)
15	Muhamad Nuryanto	Pengemudi	Rupiah Murni (APBN)
16	Nur Jali	Procurement Officer	Rupiah Murni (APBN)
17	Andrian Firmansyah	Tenaga Operasional Perkantoran	Rupiah Murni (APBN)

18	Februanty Suyatiningsih	Monev Specialist COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
19	Aris Arianto	Procurement Specialist COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
20	Dwipayana	ESSF COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
21	Irvan Ahmad Fikri	Program Officer COREMAP CTI WB	Hibah LN World Bank
22	Alya Prima Syanti	Financial Management Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
23	Leonas Chatim	Project Team Leader COREMAP-CTI ADB	Hibah LN ADB
24	Nia Kania	Administration Officer COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB
25	Dimas Darmawan	Procurement Specialist COREMAP CTI ADB	Hibah LN ADB

Kegiatan kesekretariatan ICCTF selama Kuartal 2, diantaranya:

**1. Rapat Koordinasi Permintaan BPK - Konsultasi Pembebanan Output Project pada tanggal 9 April 2021**

Diskusi yang dilakukan adalah penjelasan teknis pembebanan project pada Monex mitra pelaksana COREMAP – CTI World Bank. Hal ini dilakukan karena BPK sedang mencoba untuk mencocokkan output dan activity pada laporan keuangan mitra dengan laporan porogram (laporan bulanan dan laporan triwulan). Pengecekan dimaksudkan untuk melihat apakah angka – angka/ pengeluaran yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan laporan program atau tidak.

Secara teknis yang perlu dilakukan adalah merevisi monex dengan menambahkan 2 kolom pada monex untuk memasukan kode periode pelaporan (laporan bulanan dan laporan triwulan) serta mencocokkan kode activity pada monex dengan code activity pada laporan bulanan.

Tindak lanjut rapat: revisi Monex paket 1 – 6 Mitra Pelaksana COREMAP CTI WB.

**2. Negosiasi untuk posisi Procurement Specialist COREMAP-CTI ADB tanggal 13 April 2021**

Kegiatan ini merupakan bagian akhir dari proses perekrutan tenaga ahli Procurement Specialist COREMAP-CTI ADB. Konsultan efektif bekerja mulai bulan Mei 2021.

3. **Negosiasi harga konsultan Infrastruktur COREMAP-CTI WB tanggal 15 April 2021**

Ini merupakan bagian proses pengadaan langsung Konsultan Infrastruktur. Kontrak kegiatan konsultan ini adalah output Base. Konsultan mulai dikontrak bulan April 2021.

4. **Pada tanggal 11 Mei 2021, dilakukan rapat koordinasi staff dengan agenda progress target kegiatan setiap Bagian sebelum libur lebaran.**

5. **Selama bulan Mei 2021 masih dilakukan rapat pembahasan mengenai Audit BPK terhadap kegiatan pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF baik yang didanai Rupiah Murni (APBN) maupun Hibah World Bank dan Hibah ADB.**

6. **Focus Group Discussion (FGD), Analisa beban kerja (ABK) pada tanggal 17 Juni 2021.**

FGD ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti penataan kelembagaan yang meliputi restrukturisasi organisasi dan implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi maka diperlukan penyempurnaan terhadap rumusan Analisis Beban Kerja (ABK) di Kementerian PPN/Bappenas.

Kegiatan FGD difokuskan kepada penyempurnaan Peta Jabatan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan ABK dan akan difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli. Adapun peserta FGD menghadiri adalah setiap Unit Kerja Eselon (UKE) II dengan ketentuan minimal 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Ahli Madya atau Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya Tingkat Madya yang memahami peran dan tugasnya di lingkup unit kerjanya.

7. **Rapat Pembahasan Rekonfirmasi Usulan Pagu Anggaran PHLN Kementerian PPN/Bappenas TA 2022 dan Prakiraan Maju 2023-2026 tanggal 25 Juni 2021.**

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penetapan Pagu Indikatif 2022 melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, serta dalam rangka penyusunan Pagu Anggaran RAPBN 2022 yang lebih kredibel, terutama untuk penganggaran kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah.

8. **Sosialisasi Perdirjen No. Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga pada tanggal 28 Juni 2021.**
- Peraturan ini mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L menggunakan Indikator Penilaian Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan menggunakan aplikasi OM-SPAN
  - Indikator Penilaian Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi: (1) Kesesuaian Anggaran, (2) Efisiensi pelaksanaan Anggaran, (3) Efektivitas pelaksanaan Anggaran, dan (4) Kepatuhan terhadap regulasi.
9. **Dalam rangka memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kuartal 2, secara rutin Sekretariat ICCTF mengagendakan rapat yang melibatkan Tim Manajemen dan seluruh staff ICCTF.**

Selama kuartal 2, staf ICCTF menjalankan tugas kedinasan dengan 25% WFO, dan pada akhir bulan Juni 2021, sesuai arahan dari Sestama Bappenas, ICCTF menjalankan 100% WFH dikarenakan tingginya angka positif COVID-19 di Jakarta.



LAPORAN  
TRIWULAN **2**

